



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



LAPORAN KEUANGAN AUDITED

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Periode yang Berakhir
31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

JL. LETJEN SUTOYO NO. 12 CILILITAN - JAKARTA TIMUR
TELP. (021) 8093008

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2021

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Telah Direviu	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	75
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	86
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	94
VI. Lampiran – Lampiran	
A. Lampiran Utama	
B. Lampiran Pendukung	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13
Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 1.4 Capaian Output Strategis	17
Tabel 1.5 Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran	20
Tabel 2.1 Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2020	22
Tabel 2.2 Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	22
Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program	23
Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNB	23
Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNB	26
Tabel 2.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	26
Tabel 2.7 Rincian Belanja Berdasarkan Program	27
Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Belanja	28
Tabel 2.9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	28
Tabel 2.10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang	29
Tabel 2.11 Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	29
Tabel 2.12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal	30
Tabel 2.13 Rincian Belanja Modal Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	30
Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah	31
Tabel 2.15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31
Tabel 2.16 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker	32
Tabel 2.17 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi COVID-19 per Satker	32
Tabel 2.18 Rincian Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per Satker	33
Tabel 2.19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33
Tabel 2.20 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker	33

Tabel 2.21	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker	34
Tabel 2.22	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	34
Tabel 2.23	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya	35
Tabel 2.24	Rincian Belanja Modal Lainnya per Satker	35
Tabel 3.1	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	36
Tabel 3.2	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	37
Tabel 3.3	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	37
Tabel 3.4	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Tempat Penyimpanan	38
Tabel 3.5	Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	38
Tabel 3.6	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka	38
Tabel 3.7	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak	39
Tabel 3.8	Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satker	39
Tabel 3.9	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	40
Tabel 3.10	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Satker	40
Tabel 3.11	Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima	41
Tabel 3.12	Rincian Persediaan	42
Tabel 3.13	Rincian Persediaan Per Satker	42
Tabel 3.14	Rincian Persediaan Usang per Satker	42
Tabel 3.15	Mutasi Tanah Per 31 Desember 2020	43
Tabel 3.16	Rincian Koreksi Kesalahan Input IP Tanah per Satker	44
Tabel 3.17	Rincian Tanah Per Satker	45
Tabel 3.18	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020	46
Tabel 3.19	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	47
Tabel 3.20	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker	47
Tabel 3.21	Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin	48
Tabel 3.22	Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin per Satker	48
Tabel 3.23	Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin	49

Tabel 3.24	Rincian Reklasifikasi Masuk per Satker	49
Tabel 3.25	Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin	50
Tabel 3.26	Rincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin	50
Tabel 3.27	Rincian Reklasifikasi Keluar per Satker	50
Tabel 3.28	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan	51
Tabel 3.29	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan per Satker	51
Tabel 3.30	Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker	52
Tabel 3.31	Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	53
Tabel 3.32	Rincian Pengembangan Nilai Aset per Satker	54
Tabel 3.33	Rincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	54
Tabel 3.34	Rincian Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	55
Tabel 3.35	Rincian Koreksi Kesalahan Input IP	55
Tabel 3.36	Rincian Koreksi Kesalahan Input IP per Satker	55
Tabel 3.37	Rincian Pengembangan melalui KDP per Satker	56
Tabel 3.38	Rincian Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas per Satker	56
Tabel 3.39	Rincian Koreksi Kesalahan Input IP per Satker	56
Tabel 3.40	Rincian Koreksi Pencatatan per Satker	56
Tabel 3.41	Rincian Gedung dan Bangunan Per Satker	57
Tabel 3.42	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58
Tabel 3.43	Rincian Koreksi Kesalahan Input IP per Satker	58
Tabel 3.44	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Satker	59
Tabel 3.45	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	60
Tabel 3.46	Rincian Aset Tetap Lainnya	61
Tabel 3.47	Rincian Aset Tetap Lainnya Per Satker	61
Tabel 3.48	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	62
Tabel 3.49	Rincian Perolehan/Penambahan KDP Gedung dan Bangunan per Satker	63
Tabel 3.50	Rincian Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan per Satker	63

Tabel 3.51	Rincian Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	64
Tabel 3.52	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	64
Tabel 3.53	Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020	65
Tabel 3.54	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan	66
Tabel 3.55	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud	66
Tabel 3.56	Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker	67
Tabel 3.57	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020	68
Tabel 3.58	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker	68
Tabel 3.59	Rincian Penghapusan BMN yang Dihentikan	69
Tabel 3.60	Rincian Penghapusan BMN yang Dihentikan per Satker	69
Tabel 3.61	Rincian Aset Lain-lain	70
Tabel 3.62	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	70
Tabel 3.63	Rincian Utang Pihak Ketiga	71
Tabel 3.64	Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per Satker	71
Tabel 3.65	Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per Satker	72
Tabel 3.66	Rincian Tagihan Utang kepada Pihak Ketiga per Satker	73
Tabel 3.67	Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima di Muka	74
Tabel 4.1	Perbandingan Rincian PNB	75
Tabel 4.2	Perbandingan Rincian Beban Pegawai	76
Tabel 4.3	Rincian Beban Persediaan	77
Tabel 4.4	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa	78
Tabel 4.5	Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19	78
Tabel 4.6	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan	79
Tabel 4.7	Rincian Beban Perjalanan Dinas	80
Tabel 4.8	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	81
Tabel 4.9	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	82
Tabel 4.10	Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional	82

Tabel 4.11	Rincian Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	84
Tabel 4.12	Rincian Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	85
Tabel 4.13	Rincian Beban Persediaan Rusak/Usang	85
Tabel 5.1	Rincian Nilai Koreksi Aset Reklasifikasi	87
Tabel 5.2	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap	88
Tabel 5.3	Rincian Nilai Koreksi Aset Non Revaluasi	88
Tabel 5.4	Rincian Transaksi Antar Entitas	89
Tabel 5.5	Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2020	90
Tabel 5.6	Rincian Transfer Keluar berupa Barang Konsumsi	90
Tabel 5.7	Rincian Transfer Keluar berupa Peralatan dan Mesin	91
Tabel 5.8	Rincian Transfer Masuk	92
Tabel 6.1	Rincian MOU Pinjam Pakai Tahun 2015-2019	95
Tabel 6.2	Rincian MOU Pinjam Pakai Tahun 2020	96

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara untuk tahun anggaran 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Kepegawaian Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 24 Februari 2021
Plt. Inspektur Badan Kepegawaian Negara



Andi Anto, S.Sos, M.Si
NIP. 19730910 199403 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2021

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Hari Wibisana



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 3775/B-KU.04/SD/K/2021
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Jakarta, 29 April 2021

Kepada Yth.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat
di
Jakarta

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material, sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. BKN memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. BKN telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan BKN dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan Negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BKN.

Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp14.667.031.603,00 atau mencapai 128,78 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp11.388.920.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp595.325.743.616,00 atau mencapai 84,86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp701.558.963.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.166.461.233.445,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp11.810.375.864,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.145.938.853.486,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp8.712.004.095,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.073.268.636,00 dan Rp3.164.387.964.809,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.864.544.144,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp640.330.825.115,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp627.466.280.971,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.266.462.727,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp626.199.818.244,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp3.472.135.583.010,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp626.199.818.244,00, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp262.932.055.793,00) dan transaksi antar entitas senilai Rp581.384.255.836,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp3.164.387.964.809,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020		% thd Angg	31 DES 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.388.920.000,00	14.667.031.603,00	128,78	29.531.470.578,00
JUMLAH PENDAPATAN		11.388.920.000,00	14.667.031.603,00	128,78	29.531.470.578,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	363.258.569.000,00	298.246.157.774,00	82,10	332.810.746.831,00
Belanja Barang	B.4	298.465.899.000,00	258.381.290.483,00	86,57	214.197.780.568,00
Jumlah Belanja Operasi		661.724.468.000,00	556.627.448.257,00	84,12	547.008.527.399,00
Belanja Modal	B.5				
Belanja Modal Tanah	B.5.1	1.828.500.000,00	1.828.164.400,00	99,98	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	22.266.545.000,00	21.949.892.689,00	98,58	47.345.950.536,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	9.595.097.000,00	9.527.389.770,00	99,29	12.245.374.165,00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.5.4	-	-	0,00	410.749.588,00
Belanja Modal Lainnya	B.5.5	6.144.353.000,00	5.392.848.500,00	87,77	7.779.100.112,00
Jumlah Belanja Modal		39.834.495.000,00	38.698.295.359,00	97,15	67.781.174.401,00
JUMLAH BELANJA		701.558.963.000,00	595.325.743.616,00	84,86	614.789.701.800,00

Jakarta, April 2021
Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Hari Wibisana

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	2.205.725,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	4.071.600,00	44.019.000,00
Belanja Dibayar di Muka	C.4	19.259.312,00	6.650.000,00
Piutang Bukan Pajak	C.5	56.119.280,00	638.672.617,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(3.816.428,00)	(339.476.299,00)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	11.732.536.375,00	9.231.603.900,00
Jumlah Aset Lancar		11.810.375.864,00	9.581.469.218,00
ASET TETAP			
Tanah	C.11	2.302.109.905.449,00	2.551.874.317.382,00
Peralatan dan Mesin	C.12	568.440.548.093,00	557.396.934.784,00
Gedung dan Bangunan	C.13	833.845.886.323,00	839.776.988.996,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.14	22.986.611.820,00	21.187.821.770,00
Aset Tetap Lainnya	C.15	13.625.162.893,00	13.878.382.893,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.16	224.384.887,00	168.744.037,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	(595.293.645.979,00)	(529.214.206.460,00)
Jumlah Aset Tetap		3.145.938.853.486,00	3.455.068.983.402,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.18	150.148.317.195,00	182.079.955.859,00
Aset Lain-Lain	C.19	45.898.772.635,00	9.691.419.774,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.20	(187.335.085.735,00)	(182.401.733.389,00)
Jumlah Aset Lainnya		8.712.004.095,00	9.369.642.244,00
JUMLAH ASET		3.166.461.233.445,00	3.474.020.094.864,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.21	1.537.404.551,00	1.544.968.188,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.22	533.658.360,00	339.543.666,00
Uang Muka dari KPPN	C.23	2.205.725,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.073.268.636,00	1.884.511.854,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.073.268.636,00	1.884.511.854,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.24	3.164.387.964.809,00	3.472.135.583.010,00
JUMLAH EKUITAS		3.164.387.964.809,00	3.472.135.583.010,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.166.461.233.445,00	3.474.020.094.864,00

Jakarta, April 2021
Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Hari Wibisana

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	12.864.544.144,00	22.930.005.598,00
JUMLAH PENDAPATAN		12.864.544.144,00	22.930.005.598,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	298.270.216.854,00	332.657.688.878,00
Beban Persediaan	D.3	12.752.768.231,00	17.466.403.794,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	144.778.343.415,00	109.506.720.738,00
Beban Pemeliharaan	D.5	29.009.747.490,00	30.723.604.413,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	69.392.561.983,00	58.278.233.022,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	86.129.054.609,00	87.090.158.645,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(1.867.467,00)	25.814.023,00
JUMLAH BEBAN		640.330.825.115,00	635.748.623.513,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(627.466.280.971,00)	(612.818.617.915,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar		571.698.250,00	61.854.612,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		694.764.477,00	5.113.886.284,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.266.462.727,00	5.175.740.896,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(626.199.818.244,00)	(607.642.877.019,00)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(626.199.818.244,00)	(607.642.877.019,00)

Jakarta, April 2021
Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Haria Wibisana

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	3.472.135.583.010,00	1.157.181.353.925,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(626.199.818.244,00)	(607.642.877.019,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		(262.932.055.793,00)	2.337.334.074.882,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	-	(8,00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	14.577.025.804,00	2.340.402.705.522,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	(277.332.936.789,00)	(3.068.630.632,00)
LAIN-LAIN	E.5	(176.144.808,00)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	581.384.255.836,00	585.263.031.222,00
EKUITAS AKHIR	E.7	3.164.387.964.809,00	3.472.135.583.010,00

Jakarta, April 2021
Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Haria Wibisana

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Manajemen Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, BKN berkomitmen dengan visi “**Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut BKN melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Merumuskan Kebijakan Pembinaan PNS dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian.
3. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian.
4. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
6. Menyelenggarakan manajemen internal BKN.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan BKN memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pension.
3. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Sedangkan dalam lingkup tugas, BKN bertugas:

1. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN.
2. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah.
3. Membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian.
4. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif.

5. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN.
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN.
7. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKN sebagai berikut:

1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN dalam bentuk:
 - a. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
 - b. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dalam bentuk:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan BKN.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN.
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dalam bentuk Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Manajemen ASN.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN dalam bentuk Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi (SI) ASN.
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN dalam Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN dalam Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti.
7. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten dalam bentuk Indeks Profesionalitas ASN BKN.
8. Terwujudnya sistem informasi ASN yang handal dan mudah diakses dalam bentuk Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BKN.
9. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi Pelayanan Prima dalam bentuk:
 - a. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN.
 - b. Nilai Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
 - c. Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 - d. Indeks Pelaksanaan Sistem Merit BKN.

10. Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel dalam bentuk:

- a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN.
- b. Opini atas Laporan Keuangan BKN.

Menanggapi perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Kepala BKN menerbitkan beberapa kebijakan teknis dalam menghadapi masalah status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. Adapun beberapa kebijakan teknis yang telah dibuat Kepala BKN adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi COVID-19.
 - b. Melindungi kesehatan Pegawai BKN dari risiko penularan COVID-19.
 - c. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan Badan Kepegawaian Negara berjalan efektif dan efisien.
 - d. Memberikan panduan pelayanan publik, kehadiran pegawai, dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.
2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang menitikberatkan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Melalui surat edaran ini beberapa ketentuan terkait pembatasan seluruh kegiatan perkantoran yang diperluas dan keterwakilan pegawai yang bertugas pada unit kerja yang terkait dengan kegiatan diatur dengan komposisi 10% bekerja di kantor dan 90% bekerja di rumah.
3. Surat Edaran Nomor 13/SE/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker BKN yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
 - a. Sebagai pedoman dalam mengelola biaya/belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker BKN dalam masa darurat COVID-19.
 - b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan BKN berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
 - c. Sebagai pedoman dalam menentukan pegawai yang harus melaksanakan *Work From Office* (WFO) maupun *Work From Home* (WFH) didasarkan pada beban, jenis, urgensi pekerjaan, serta ketersediaan anggaran masing-masing unit kerja pada BKN Pusat/Kantor Regional/Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.
 - d. Sebagai pedoman dalam melakukan pencegahan dan meminimalisasi penyebaran COVID-19.

4. Surat Edaran Nomor 15/SE/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
 - a. Sebagai panduan bagi pegawai untuk beradaptasi dengan tataan normal baru yang produktif dan aman COVID-19.
 - b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan Badan Kepegawaian Negara berjalan efektif dan efisien.
 - c. Memberikan panduan pelayanan publik, kehadiran pegawai, penilaian kinerja, dan disiplin pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan.
 - d. Melindungi kesehatan pegawai BKN dari risiko penularan COVID-19.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini, merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BKN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Operasional serta Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan Keuangan BKN Tahun 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

BKN Tahun Anggaran 2020 ini memperoleh anggaran belanja yang berasal dari APBN sebesar sebesar Rp701.558.963.000,00 meliputi:

1. Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp437.925.516.000,00;
2. Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp263.633.447.000,00

Jumlah satuan kerja di lingkup BKN adalah 16 (enam belas) satker yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta;
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kantor Regional II BKN Surabaya;
4. Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Kantor Regional IV BKN Makassar;
6. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta;
7. Kantor Regional VI BKN Medan;
8. Kantor Regional VII BKN Palembang;
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;

10. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
11. Kantor Regional X BKN Denpasar;
12. Kantor Regional XI BKN Manado;
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
14. Kantor Regional XIII BKN Aceh;
15. Kantor Regional XIV BKN Manokwari; dan
16. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN).

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BKN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BKN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BKN adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan negara karena adanya tunggakan pungutan pendapatan yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Berdasarkan Surat Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 sesuai mekanisme yang berlaku.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang

secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- 1) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian Output

A.6. Capaian Output Strategis

Selama periode TA 2020, output strategis yang telah dicapai oleh BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Capaian Output Strategis

No	Kegiatan	Kode Output	Nama Output	Target Volume	Realisasi Volume	Progres Capaian
1	Perumusan Kebijakan Teknis Jabatan Aparatur Sipil Negara	3642.006	Indeks Profesional ASN	313 IP	625 IP	200%
		3642.010	Pedoman Penyusunan Pola Karir Instansi	1 Pedoman	1 Pedoman	100%
		3642.011	Fasilitasi Penyusunan Pola Karir Instansi Pemerintah	20 IP	68 IP	340%

No	Kegiatan	Kode Output	Nama Output	Target Volume	Realisasi Volume	Progres Capaian
2	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	3644.005	Standarisasi dan Implementasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Berbasis Sistem Merit	6 Pedoman	6 Pedoman	100%
3	Perumusan & Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian	3652.001	Sistem Informasi ASN Terintegrasi (ONE DATA ASN)	1 Sistem	1 Sistem	100%
4	Pelaksanaan Pengembangan Kinerja, Standarisasi Kinerja Jabatan, dan Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN	3660.008	Piloting Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D	25 K/L/D	32 K/L/D	120%
		3660.009	Pembinaan Penilaian Kinerja khusus wilayah Papua dan Papua Barat	8 K/L/D	12 K/L/D	150%
5	Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS	3663.004	Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	1536 JPT/admistrator	944 JPT/admistrator	61%
		3663.006	Pembangunan Database Talent	1 Database	1 Database	100%

No	Kegiatan	Kode Output	Nama Output	Target Volume	Realisasi Volume	Progres Capaian
		3663.003	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Potensi dan Kompetensi	9 Instansi	9 instansi	100%
6	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	3664.004	Pelatihan Fungsional Kepegawaian	150 PNS	150 PNS	100%
		3664.010	Coaching, Mentoring Teknis Kepegawaian	80 Pegawai	77 Pegawai	96%
7	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	3664.009	Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Pengelola Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	400 Pegawai	397 Pegawai	99%

A.7. Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran

Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran

Sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Badan Kepegawaian Negara melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran sebesar Rp19.011.258.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp15.626.513.000,00;
2. Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp3.384.745.000,00.

Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran yang dilakukan oleh BKN berasal dari anggaran Pemeliharaan atas Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan atas Peralatan dan Mesin serta sisa anggaran atas Belanja Modal dari seluruh Satuan Kerja. Adapun rincian atas *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran di masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran

No	Satuan Kerja	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	8.417.541.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	2.640.910.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	406.504.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	23.282.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	214.966.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	9.303.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	802.279.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	15.000.000,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	815.390.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	3.500.000,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	511.956.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	8.056.000,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	427.926.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	7.540.000,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	798.894.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	166.401.000,00

No	Satuan Kerja	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	430.355.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	15.000.000,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	243.775.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	409.074.000,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	473.153.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	21.810.000,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	262.751.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	1.600.000,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	146.633.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	177.670.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	5.000.000,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	177.670.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	5.000.000,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Kepegawaian Negara telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2020		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	11.388.920.000,00	11.388.920.000,00	-
Jumlah Pendapatan	11.388.920.000,00	11.388.920.000,00	-
BELANJA			
Belanja Pegawai	362.644.162.000,00	363.258.569.000,00	614.407.000,00
Belanja Barang	234.439.067.000,00	298.465.899.000,00	64.026.832.000,00
Belanja Modal	50.205.620.000,00	39.834.495.000,00	(10.371.125.000,00)
Jumlah Belanja	647.288.849.000,00	701.558.963.000,00	54.270.114.000,00

Revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu Belanja Pegawai sebesar Rp614.407.000,00 pada anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Penambahan pagu Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19, dengan kenaikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp64.026.832.000,00. Pengurangan pagu Belanja Modal sebesar Rp10.371.125.000,00 pada anggaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Lainnya. Adapun rincian perubahan anggaran berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai	362.644.162.000,00	363.258.569.000,00
Belanja Barang	234.439.067.000,00	282.839.386.000,00
Belanja Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	15.626.513.000,00
Belanja Modal	50.205.620.000,00	36.449.750.000,00
Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.384.745.000,00
Total Belanja	647.288.849.000,00	701.558.963.000,00

Sedangkan apabila dilihat dari program BKN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	31 DESEMBER 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	499.838.944.000,00	487.115.156.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur BKN	41.049.125.000,00	23.724.677.000,00
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (Rupiah Murni)	98.688.330.000,00	182.092.280.000,00
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (PNBP)	7.712.450.000,00	8.626.850.000,00
Total Belanja	647.288.849.000,00	701.558.963.000,00

Realisasi Pendapatan

Rp14.667.031.603,-

B.1 Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara BKN berasal dari Pendapatan PNBP. Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.667.031.603,00 atau mencapai 128,78% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp11.388.920.000,00. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	75.000.000,00	1.780.143.651,00	2373,52
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	11.313.920.000,00	12.299.883.000,00	108,71
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	-	4.000.000,00	-
Pendapatan Denda	-	2.468.988,00	-
Pendapatan Lain - lain	-	580.535.964,00	-
Jumlah	11.388.920.000,00	14.667.031.603,00	128,78

Realisasi Pendapatan PNBP pada 31 Desember 2020 sebesar Rp14.667.031.603,00 berasal dari:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp1.780.143.651,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp118.200.100,00 yang berasal dari:
 - 1) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp66.700.100,00 berupa penjualan 1 unit mini bus (penumpang 14 orang kebawah).

- 2) Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp51.500.000,00 berupa penjualan 6 unit mini bus (penumpang 14 orang kebawah) dan 3 unit sepeda motor.
- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp936.745.750,00 yang berasal dari:
 - 1) Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp756.345.750,00 berupa penjualan alat kantor, alat rumah tangga, alat bantu, alat angkutan darat bermotor dan komputer unit.
 - 2) Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp171.700.000,00 berupa penjualan alat kantor dan alat angkutan darat bermotor.
 - 3) Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar Rp8.700.000,00 berupa penjualan alat studio, alat kantor, alat rumah tangga, komputer unit dan peralatan komputer.
- c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp702.697.801,00 yang berasal dari:
 - 1) Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp500.198.950,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan dan sewa terhadap ruangan kantor.
 - 2) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp30.686.740,00 berupa pendapatan sewa terhadap ruangan kantor dan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 3) Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp56.100,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 4) Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp18.728.143,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan rumah negara.
 - 5) Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp7.752.509,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 6) Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp50.631.000,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 - 7) Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp7.196.745,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 8) Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp12.076.000,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai dan pendapatan sewa terhadap tanah bangunan rumah negara.
 - 9) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp1.723.675,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 10) Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 11) Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp36.757.289,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 12) Kantor Regional XI BKN Manado sebesar Rp25.781.150,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai dan pendapatan sewa terhadap tanah bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- 13) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp3.722.500 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
- 14) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp4.387.000,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tugas dan Fungsi sebesar Rp22.500.000,00 yang berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa penggunaan kamar asrama oleh Kementerian/Lembaga Lain.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp12.299.883.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN berupa Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp10.920.400.000,00 dan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan dari Satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp1.379.483.000,00.
3. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp4.000.000,00 yang berasal dari Kantor Regional IX BKN Jayapura berupa Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri.
4. Pendapatan Denda sebesar Rp2.468.988,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
5. Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp580.535.964,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp184.098.426,00.
 - b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp292.086.257,00.
 - c. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL Sebesar Rp57.439.868,00.
 - d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp15.802.364,00.
 - e. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp26.703.463,00.
 - f. Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp4.405.586,00.

Realisasi Pendapatan PNBPN 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 terdapat penurunan sebesar 50,33%. Penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh adanya Pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2020. Hal ini dapat terlihat dari adanya penurunan terhadap Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar 42,15% yang dikarenakan rencana penyelenggaraan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan oleh Satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN mengalami penundaan.

Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNB

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	1.780.143.651,00	2.101.945.257,00	(15,31)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan teknologi	12.299.883.000,00	21.260.712.000,00	(42,15)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	4.000.000,00	-	-
Pendapatan Denda	2.468.988,00	25.158.389,00	(90,19)
Pendapatan Lain - lain	580.535.964,00	6.143.654.932,00	(90,55)
Jumlah	14.667.031.603,00	29.531.470.578,00	(50,33)

Realisasi Belanja

Rp595.325.743.616,-

B.2 Belanja

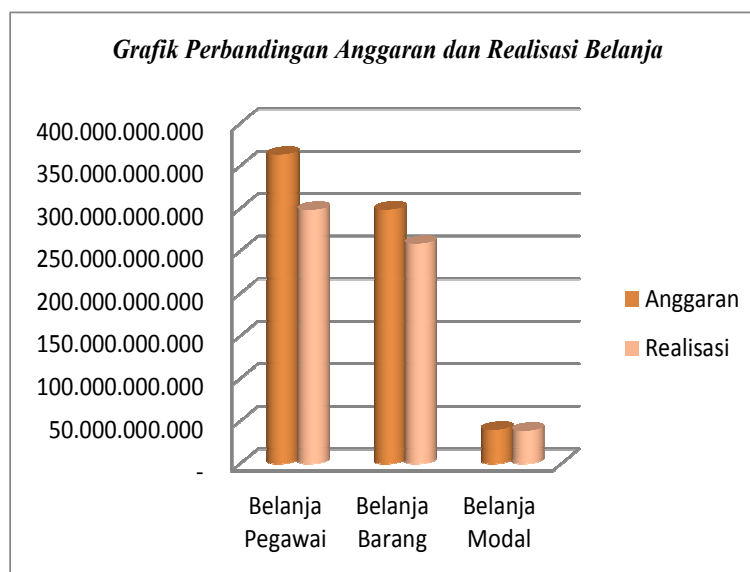
Realisasi Belanja BKN pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp595.325.743.616,00 atau 84,86% dari anggaran belanja sebesar Rp701.558.963.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	363.258.569.000,00	298.324.742.821,00	82,12
Belanja Barang	298.465.899.000,00	259.380.720.006,00	86,90
Belanja Modal	39.834.495.000,00	38.698.295.359,00	97,15
Total Belanja Kotor	701.558.963.000,00	596.403.758.186,00	85,01
Pengembalian	-	(1.078.014.570,00)	
Jumlah	701.558.963.000,00	595.325.743.616,00	84,86

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	31 DESEMBER 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	487.115.156.000,00	416.783.008.644,00	85,56
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur BKN	23.724.677.000,00	23.620.618.870,00	99,56
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (Rupiah Murni)	182.092.280.000,00	146.991.369.414,00	80,72
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (PNBP)	8.626.850.000,00	7.930.746.688,00	91,93
Total Belanja	701.558.963.000,00	595.325.743.616,00	84,86

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 3,17% dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini dikarenakan adanya penurunan di dua sektor jenis belanja yakni penurunan realisasi belanja pegawai sebesar 10,39% dan pada realisasi belanja modal yang cukup signifikan sebesar 42,91%.

Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	298.246.157.774,00	332.810.746.831,00	(10,39)
Belanja Barang	258.381.290.483,00	214.197.780.568,00	20,63
Belanja Modal	38.698.295.359,00	67.781.174.401,00	(42,91)
Jumlah	595.325.743.616,00	614.789.701.800,00	(3,17)

Belanja Pegawai
Rp298.246.157.774,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp298.246.157.774,00 dan Rp332.810.746.831,00 atau terjadi penurunan sebesar 10,39%. Penurunan Realisasi Belanja Pegawai disebabkan adanya penurunan yang cukup signifikan terhadap Realisasi Belanja Lembur dikarenakan dengan adanya Pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2020, maka pegawai tidak ada yang bisa bekerja di kantor sehingga realisasi belanja lembur tidak dapat terealisasi secara maksimal. Selain itu, penurunan realisasi belanja pegawai disebabkan juga terjadi pada Realisasi Belanja Tunjangan Khusus karena kebijakan pemerintah yang tidak memberikan Tunjangan Kinerja pada pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13.

Tabel 2.9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	181.036.003.794,00	191.601.169.220,00	(5,51)
Belanja Lembur	538.657.250,00	826.721.000,00	(34,84)
Belanja Tunj. Khusus dan Pegawai Transito	116.750.081.777,00	140.435.690.741,00	(16,87)
Jumlah Belanja Kotor	298.324.742.821,00	332.863.580.961,00	(10,38)
Pengembalian Belanja Pegawai	(78.585.047,00)	(52.834.130,00)	
Jumlah Belanja	298.246.157.774,00	332.810.746.831,00	(10,39)

Belanja Barang

Rp258.381.290.483,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp258.381.290.483,00 dan Rp214.197.780.568,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,63%. Kenaikan Belanja Barang disebabkan oleh adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap Realisasi Belanja Jasa sebagai tindak lanjut atas penanganan Pandemi COVID-19.

Tabel 2.10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	47.595.659.383,00	42.367.251.517,00	12,34
Belanja Barang Non Operasional	24.581.948.803,00	21.450.694.776,00	14,60
Belanja Barang Persediaan	16.752.818.487,00	16.821.641.811,00	(0,41)
Belanja Jasa	72.650.593.449,00	45.457.628.507,00	59,82
Belanja Pemeliharaan	27.432.630.464,00	29.899.805.539,00	(8,25)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	70.343.208.920,00	58.782.308.110,00	19,67
Belanja Perjalanan Luar Negeri	23.860.500,00	645.835.836,00	(96,31)
Jumlah Belanja Kotor	259.380.720.006,00	215.425.166.096,00	20,40
Pengembalian Belanja	(999.429.523,00)	(1.227.385.528,00)	
Jumlah Belanja	258.381.290.483,00	214.197.780.568,00	20,63

BKN mengalokasikan Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp15.626.513.000,00. Anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp13.629.151.364,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.285.403.000,00	2.862.493.708,00	87,13
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.135.244.000,00	864.186.328,00	76,12
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.782.186.000,00	2.606.191.286,00	93,67
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6.497.680.000,00	5.516.011.819,00	84,89
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	180.300.000,00	159.636.310,00	88,54
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.745.700.000,00	1.622.332.613,00	92,93
	Jumlah Belanja Kotor	15.626.513.000,00	13.630.852.064,00	87,23
	Pengembalian Belanja	-	(1.700.700,00)	
	Jumlah Belanja	15.626.513.000,00	13.629.151.364,00	87,22

Belanja Modal

Rp38.698.295.359,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp38.698.295.359,00 dan Rp67.781.174.401,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 42,91% yang disebabkan adanya *refocussing*/realokasi anggaran dari Belanja Modal ke Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 2.12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	1.828.164.400	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.949.892.689	47.346.444.536	(53,64)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.527.389.770	12.245.374.165	(22,20)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	415.557.588	-
Belanja Modal Lainnya	5.392.848.500	7.781.038.112	(30,69)
Jumlah Belanja Kotor	38.698.295.359	67.788.414.401	(42,91)
Pengembalian	-	(7.240.000)	
Jumlah Belanja	38.698.295.359	67.781.174.401	(42,91)

BKN melakukan efisiensi anggaran belanja modal yang semula dianggarkan sebesar Rp50.205.620.000,00 menjadi sebesar Rp39.834.495.000,00. Selain melakukan efisiensi anggaran, BKN juga melakukan *refocussing*/realokasi anggaran Belanja Modal untuk penanganan pandemi COVID-19. Belanja Modal untuk penanganan pandemi COVID-19 tersebut dianggarkan sebesar Rp3.384.745.000,00 dan telah terserap sebesar Rp3.137.039.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13 Rincian Belanja Modal dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	3.383.745.000	3.137.039.305	92,71
536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	1.000.000	-	-
	Jumlah Belanja Kotor	3.384.745.000	3.137.039.305	92,68
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	3.384.745.000	3.137.039.305	92,68

Belanja Modal Tanah **B.5.1 Belanja Modal Tanah**
Rp1.828.164.400,-

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.828.164.400,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2020 berasal dari Realisasi Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah pada Kantor Regional III BKN Bandung.

Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.828.164.400	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.828.164.400	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	1.828.164.400	-	-

Belanja Modal **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan Mesin
Rp21.949.892.689,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21.949.892.689,00 dan Rp47.345.950.536,00. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 53,64% dari Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya penurunan yang signifikan terhadap belanja penambahan nilai peralatan dan mesin dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin akibat *refocussing*/realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 2.15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.746.145.284,00	46.796.041.701,00	(59,94)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	3.137.039.305,00	-	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	66.708.100,00	550.402.835,00	(87,88)
Jumlah Belanja Kotor	21.949.892.689,00	47.346.444.536,00	(53,64)
Pengembalian	-	(494.000,00)	
Jumlah Belanja	21.949.892.689,00	47.345.950.536,00	(53,64)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2020 sebesar Rp21.949.892.689,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.746.145.284,00, berasal dari:

Tabel 2.16 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	10.224.323.995,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	935.493.248,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	280.083.117,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	332.457.000,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	700.715.500,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	373.366.229,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	646.325.375,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	997.670.000,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	484.951.000,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	445.901.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	342.000.000,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1.037.740.980,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	346.854.790,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	359.500.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	493.604.000,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	745.159.050,00
	Jumlah	18.746.145.284,00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp3.137.039.305,00, berasal dari:

Tabel 2.17 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi COVID-19 per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	2.415.156.905,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	23.194.500,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	9.298.300,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	14.855.000,00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	8.056.000,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	7.540.000,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	161.401.000,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	14.993.000,00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	21.710.000,00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1.400.000,00
11	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4.730.000,00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	454.704.600,00
	Jumlah	3.137.039.305,00

3. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp66.708.100,00, berasal dari:

Tabel 2.18 Rincian Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	36.708.100,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	30.000.000,00
	Jumlah	66.708.100,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp9.527.389.770,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.527.389.770,00 dan Rp12.245.374.165,00. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan 22,20% dari Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya penurunan terhadap Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

Tabel 2.19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	647.958.745,00	819.324.725,00	(20,92)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	8.879.431.025,00	11.426.049.440,00	(22,29)
Jumlah Belanja Kotor	9.527.389.770,00	12.245.374.165,00	(22,20)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	9.527.389.770,00	12.245.374.165,00	(22,20)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.527.389.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp647.958.745,00 berasal dari:

Tabel 2.20 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional XI BKN Manado	398.976.000,00
2	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	248.982.745,00
	Jumlah	647.958.745,00

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.879.431.025,00 berasal dari:

Tabel 2.21 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	526.837.542,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	890.331.595,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.853.326.781,00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	1.524.862.600,00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	295.136.500,00
6	Kantor Regional IX BKN Jayapura	69.217.549,00
7	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.795.701.648,00
8	Kantor Regional XI BKN Manado	899.977.655,00
9	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	870.132.635,00
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	153.906.520,00
Jumlah		8.879.431.025,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp410.749.588,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya realisasi terhadap belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel 2.22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	-	198,449,988.00	0.00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	217,107,600.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	415,557,588.00	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	(4,808,000.00)	0.00
Jumlah Belanja	-	410,749,588.00	0.00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

Belanja Modal
Lainnya
Rp5.392.848.500,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.392.848.500,00 dan Rp7.779.100.112,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 30,68% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya penurunan signifikan terhadap Belanja Modal Lainnya akibat *refocussing*/relokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 2.23 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	2,086,161,500.00	6,860,359,727.00	(69.59)
Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	3,306,687,000.00	920,678,385.00	259.16
Jumlah Belanja Kotor	5,392,848,500.00	7,781,038,112.00	(30.69)
Pengembalian Belanja Modal	-	(1,938,000.00)	
Jumlah Belanja	5,392,848,500.00	7,779,100,112.00	(30.68)

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.392.848.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp2.086.161.500,00 berasal dari:

Tabel 2.24 Rincian Belanja Modal Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	1,879,361,500.00
2	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	206,800,000.00
	Jumlah	2,086,161,500.00

2. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya sebesar Rp3.306.687.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp2.205.725,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKN per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.205.725,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DES 2020	31 DES 2019
Uang Tunai	2.205.725,00	-
Uang muka/persekot pada BPP	-	-
Uang di Bank	-	-
Kuitansi UP yg belum SP2D	-	-
Jumlah	2.205.725,00	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.205.725,00 berasal dari Kantor Regional II BKN Surabaya yang merupakan sisa dari Uang Persediaan (GU Nihil) yang belum disetorkan ke Kas Negara. Sisa uang persediaan tersebut baru disetorkan pada 6 Januari 2021 dengan kode NTPN: E7A227QLTSP43P6I (sebagaimana tertera pada Lampiran XV).

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing satker disajikan pada Lampiran Utama A3.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNPB. Bendahara Penerimaan BKN terdapat pada satker Kantor Pusat Jakarta dengan Nomor Rekening 0340-01-002735-30-2 pada Bank Rakyat Indonesia dan satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN 1224-01-000123-30-4 pada Bank Rakyat Indonesia (*Account Statement* per 31 Desember 2020 terlampir pada Lampiran Utama A3).

Tabel 3.2 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DES 2020	31 DES 2019
Uang Tunai	-	-
Uang di Bank BRI 0340-01-002735-30-2	-	-
Uang di Bank BRI 1224-01-000123-30-4	-	-
Jumlah	-	-

Mekanisme penerimaan PNBP dilakukan dengan penyetoran langsung ke kas negara dan tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing satker disajikan pada Lampiran Utama A3.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp4.071.600,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.071.600,00 dan Rp44.019.000,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DES 2020	31 DES 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4.071.600,00	44.019.000,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	4.071.600,00	44.019.000,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas selain Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa pengembalian belanja barang yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp44.019.000,00 merupakan uang makan yang telah dicairkan oleh Bendahara pada pertengahan bulan Desember 2019 yang terdapat pada Kantor Regional X BKN Denpasar, namun baru dibayarkan kepada PNS melalui *payroll* BNI pada bulan Januari 2020. Adapun saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada TA 2020 sebesar Rp4.071.600,00 merupakan saldo kas yang terdapat pada:

1. Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp2.346.000,00 yang merupakan uang pembayaran perjalanan dinas di Tahun 2020 yang belum disalurkan kepada pegawai per 31 Desember 2020.
2. Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar Rp1.725.600,00 yang merupakan uang pembayaran honor sebesar Rp285.000,00 dan uang makan bulan Desember sebesar Rp1.440.600,00 yang sudah direalisasikan pada Tahun 2020 namun belum disalurkan kepada pegawai per 31 Desember 2020.

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan tempat penyimpanan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Berdasarkan Tempat Penyimpanan

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DES 2020	31 DES 2019
Uang Tunai	1.725.600,00	44.019.000,00
Uang di Bank BRI 041-2010-00029-304	2.346.000,00	-
Jumlah	4.071.600,00	-

Uraian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo
Utang Belanja Pegawai (Uang Makan Pegawai)	1.440.600,00
Utang Belanja Barang (Honorarium Pegawai)	285.000,00
Utang Kepada Pihak Ketiga (Perjalanan Dinas)	2.346.000,00
Jumlah	4.071.600,00

Belanja Dibayar di
Muka Rp19.259.312,-

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp19.259.312,00 dan Rp6.650.000,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 DES 2020	31 DES 2019
Pembayaran Sewa Gedung Bangunan	6.500.000,00	6.650.000,00
Biaya Langganan Lisensi Video Convergence (Zoom)	12.759.312,00	-
Jumlah	19.259.312,00	6.650.000,00

Adapun rincian belanja dibayar dimuka sebesar Rp19.259.312,00 per satker tersaji pada Lampiran Utama A5.

Piutang Bukan Pajak
Rp56.119.280,-

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing - masing adalah sebesar Rp56.119.280,00 dan Rp638.672.617,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DES 2020	31 DES 2019
Piutang PNPB	-	332.721.672,00
Piutang Lainnya	56.119.280,00	305.950.945,00
Jumlah	56.119.280,00	638.672.617,00

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 pada BKN berasal dari Piutang Lainnya yang ada pada Kantor Pusat BKN.

Tabel 3.8 Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	PIUTANG TAHUN ANGGARAN 2020				31 DES 2020
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Kantor Pusat BKN					
	Piutang PNPB					
	a. Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pada:					20.619.280,00
	- CV. Dwi Cemerlang		11.413.160,00			
	- CV. Dwi Cemerlang		3.465.435,00			
	- CV. Galvin Mitra Tama		5.740.685,00			
	b. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada:					16.600.000,00
	- PT. Sugitech		14.400.000,00			
	- PT. Properindo		2.200.000,00			
	c. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada:					18.900.000,00
	- PT Pinang Abadi Jaya	18.900.000,00				
	JUMLAH PIUTANG	18.900.000,00	37.219.280,00	-	-	56.119.280,00

Rincian Piutang Bukan Pajak senilai Rp56.119.280,00 terdiri dari:

- Rincian piutang lainnya Kantor Pusat BKN senilai Rp56.119.280,00 yang terdiri dari:
 - CV Dwi Cemerlang atas piutang berupa kekurangan pekerjaan senilai Rp11.413.160,00 yang telah lunas dibayar pada tanggal 18 Februari 2021 dengan kode NTPN B390E6U8E2A0MIAR dan atas kekurangan pekerjaan senilai Rp3.465.435,00 yang telah lunas dibayar pada tanggal 18 Februari 2021 dengan kode NTPN 4EDBE2G4UTE2LIQK.
 - CV Galvin Mitratama atas piutang berupa kekurangan pekerjaan senilai Rp5.740.685,00 yang telah lunas dibayar pada tanggal 18 Februari 2021 dengan kode NTPN 241D21JNF2RM8JNV.

- c. PT Sugitech atas piutang berupa kekurangan pekerjaan senilai Rp14.400.000,00 yang telah lunas dibayar pada tanggal 21 Januari 2021 dengan kode NTPN B7DA06U8E2741P5J.
 - d. PT Properindo atas piutang berupa kekurangan pekerjaan senilai Rp2.200.000,00 yang telah lunas dibayar pada tanggal 21 Januari 2021 dengan kode NTPN EE9A555DED2B7T5V.
 - e. PT Pinang Abadi Jaya atas piutang berupa kekurangan pekerjaan senilai Rp18.900.000,00 yang telah lunas dibayar pada tanggal 24 Maret 2021 dengan kode NTPN DF4372G4UTH8HUJG.
- (Dokumen pendukung terlampir – Lampiran XV).

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
(Rp3.816.428,-)

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp3.816.428,00 dan Rp339.476.299,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	18.900.000,00	0,50%	94.500,00
Kurang Lancar	37.219.280,00	10%	3.721.928,00
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
JUMLAH	56.119.280,00		3.816.428,00

Tabel 3.10 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TA 2020				31 DES 2020
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Kantor Pusat BKN Piutang PNB					
	a. Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pada: - CV. Dwi Cemerlang - CV. Galvin Mitra Tama - CV. Dwi Cemerlang		1.141.316,00 574.068,50 346.543,50			2.061.928,00
	b. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada: - PT. Sugitech - PT. Properindo		1.440.000,00 220.000,00			1.660.000,00
	c. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada: - PT Pinang Abadi Jaya	94.500,00				94.500,00
	JUMLAH PIUTANG	94.500,00	3.721.928,00	-	-	3.816.428,00

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR Rp0,00

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Selama TA 2020, terdapat Tuntutan Ganti Rugi atas kehilangan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLPIII atau Honda Mega Pro Tahun 2004 dengan Nomor Polisi PA 4652 DZ senilai Rp4.000.000,00 di Kantor Regional IX BKN Jayapura dan telah terselesaikan dan disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 September 2020 dengan NTPN E29762G4UKGCGEV8 (sebagaimana tertera pada Lampiran XV).

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DES 2020	31 DES 2019
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp11.732.536.375,-

C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp11.732.536.375,00 dan Rp9.231.603.900,00.

Tabel 3.12 Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

Persediaan	31 DES 2020	31 DES 2019
Barang Konsumsi	10.141.036.187	8.191.135.592
Bahan untuk Pemeliharaan	615.236.900	498.691.609
Suku cadang	10.534.227	8.570.983
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	3.666.000
Bahan Baku	53.156.848	32.696.870
Persediaan Lainnya	912.572.213	496.842.846
Jumlah	11.732.536.375	9.231.603.900

Adapun rincian persediaan per satker sebagai berikut :

Tabel 3.13 Rincian Persediaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN	4.725.580.949,00	2.603.680.582,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	572.166.192,00	665.521.549,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	488.232.397,00	611.944.935,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	203.440.612,00	101.553.745,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	164.460.075,00	97.891.250,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	705.129.595,00	648.309.910,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	190.834.653,00	263.902.429,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	728.938.330,00	347.005.616,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	600.598.573,00	388.768.983,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	313.644.670,00	451.794.880,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	964.763.624,00	924.578.755,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	605.394.284,00	507.372.605,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	724.001.861,00	855.116.394,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	300.986.100,00	288.421.065,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	135.407.440,00	146.169.366,00
16	Pusat Pengembangan ASN	308.957.020,00	329.571.836,00
	Jumlah	11.732.536.375,00	9.231.603.900,00

Terdapat persediaan dalam kondisi usang sebesar Rp240.199.842,00 yang tidak disajikan dalam neraca. Persediaan dengan keadaan usang tersebut berasal dari:

Tabel 3.14 Rincian Persediaan Usang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Kantor Regional II BKN Surabaya	185.615.000,00	Blanko KP4, Blanko Cuti Tahunan, Blanko Peninjauan Masa Kerja (PMK)
2	Kantor Regional XI BKN Manado	1.004.100,00	Obat-obatan
3	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	27.204.742,00	Obat-obatan
4	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	26.376.000,00	Obat-obatan
	Jumlah	240.199.842,00	

Tanah

Rp2.302.109.905.449,-

C.11 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BKN per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.302.109.905.449,00 dan Rp2.551.874.317.382,00.

Tabel 3.15 Mutasi Tanah Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	2.551.874.317.382,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	1.828.164.400,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.450.000.000,00
Koreksi Kesalahan Input IP	2.593.916.667,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(256.636.493.000,00)
Saldo per 31 Desember 2020	2.302.109.905.449,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.302.109.905.449,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.828.164.400,00 dan sudah sesuai dengan penambahan nilai aset tanah yang berasal dari pengembangan nilai aset. Saldo Tanah BKN per 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar Rp249.764.411.933,00 yang berasal dari koreksi penambahan/pengurangan pencatatan pada Kantor Pusat BKN Jakarta, Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

Adapun rincian atas koreksi penambahan/pengurangan nilai aset Tanah adalah sebagai berikut:

1. **Mutasi Tambah** sebesar Rp6.872.081.067,00 atas transaksi Tanah berupa:
 - a. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.828.164.400,00 menggunakan akun 531115 berasal dari pekerjaan pengurukan dan pematangan tanah di Kantor Regional III BKN Bandung.
 - b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp2.450.000.000,00 berasal dari Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berasal dari selisih lebih akibat penambahan nilai hibah dari Pemerintah Kabupaten Sorong, dimana pada tanggal 28 September 2016, sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor : 800/416/ADPEM/2018, Pemerintah Kabupaten Sorong memberikan hibah berupa tanah seluas 50.000M² senilai Rp2.150.000.000,00 dan belum bersertifikat.

Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sorong mencabut Hibah Tanah seluas 50.000 M² tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 012.5/KEP.173/IV/TAHUN 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 800/415/KEP ADPEM/2016 tentang hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Sorong untuk Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan/atau Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN yang isinya tanahnya akan dipindahkan ke lokasi berbeda.

Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sorong baru mendapatkan Tanah Pengganti untuk Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang berlokasi di Aimas – Kabupaten Sorong dengan luas 30.000 M² dengan nilai Rp4.600.000.000,- sesuai dengan BAST Hibah Tanah No. 34/A/KS/IX/2020 tanggal 24 September 2020, disertai dengan penyerahan Sertifikat Tanah sebanyak dua Sertifikat dengan rincian satu sertifikat No. 33.02.06.01.4.00033 seluas 20.000 M² dan satu sertifikat No. 33.02.06.01.4.00034 seluas 10.000 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Kepegawaian Negara.

- c. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp2.593.916.667,00 merupakan koreksi nilai atas kesalahan input hasil revaluasi BMN yang terdapat pada satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rincian Koreksi Kesalahan Input IP Tanah per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Nomor LHIP
1	Kantor Pusat BKN	1.077.641.667,00	156/WKN.07/KNL.04/2020
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.516.275.000,00	577/REV/WKN.09/KNL.06/2020
	Jumlah	2.593.916.667,00	

2. **Mutasi Kurang** sebesar Rp256.636.493.000,00 atas transaksi Tanah berupa Koreksi Pencatatan yang ada pada Kantor Pusat BKN Jakarta. Koreksi pencatatan tersebut merupakan koreksi atas *double* catat kepemilikan atas tanah yang ada di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, yang sertifikat kepemilikan tanah tersebut disertifikatkan atas nama Kementerian Dalam Negeri dan dicatat sebagai BMN pada Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Rincian Tanah per satker adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Rincian Tanah Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN	778.309.895.000,00	1.033.868.746.333,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	150.838.792.000,00	149.322.517.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	351.559.532.000,00	351.559.532.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	51.116.757.449,00	49.288.593.049,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	90.329.976.000,00	90.329.976.000,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	62.661.915.000,00	62.661.915.000,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	164.724.060.000,00	164.724.060.000,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	263.158.430.000,00	263.158.430.000,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	17.136.158.000,00	17.136.158.000,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	40.113.517.000,00	40.113.517.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	166.256.748.000,00	166.256.748.000,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	47.708.637.000,00	47.708.637.000,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	16.983.000.000,00	16.983.000.000,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	13.376.538.000,00	13.376.538.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4.600.000.000,00	2.150.000.000,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	83.235.950.000,00	83.235.950.000,00
	Jumlah	2.302.109.905.449,00	2.551.874.317.382,00

Terdapat Tanah BKN yang dikuasai pihak lain dengan uraian sebagai berikut:

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:
 - a. Kampung Sopen GK.I/445 seluas 619 m² senilai Rp3.037.866.000,00.
 - b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m² senilai Rp7.906.640.000,00.
2. Kantor Pusat BKN Jakarta. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m² senilai Rp77.478.342.000,00.

Peralatan dan Mesin
Rp568.440.548.093,-

C.12 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp568.440.548.093,00 dan Rp557.396.934.784,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 3.18 Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	557.396.934.784,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	21.811.640.639,00
Transfer Masuk	2.286.265.900,00
Pengembangan Nilai Aset	71.708.100,00
Hibah (Masuk)	169.000.000,00
Reklasifikasi Masuk	587.767.375,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	129.431.978,00
Mutasi kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	(111.868.878,00)
Transfer Keluar	(2.286.265.900,00)
Reklasifikasi Keluar	(573.967.375,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(11.040.098.530,00)
Saldo per 31 Desember 2020	568.440.548.093,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(487.381.520.102,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	81.059.027.991,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.949.892.689,00, sedangkan Penambahan Peralatan dan Mesin dari Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp21.883.348.739,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp66.543.950,00. Selisih tersebut merupakan pencatatan beban aset ekstrakomptabel berupa pembelian Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi pada satker :

- Kantor Pusat BKN sebesar Rp625.800,00.
- Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp8.048.150,00.
- Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp945.000,00.
- Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp56.925.000,00.

Adapun rincian atas koreksi penambahan/pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- Mutasi Tambah** transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.055.813.992,00 berupa:
 - Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.811.640.639,00, menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin 532111 sebesar Rp18.675.546.334,00 dan menggunakan akun 532119 belanja modal peralatan dan mesin – penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp3.136.094.305,00.

Rincian atas pembelian peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	730.275.190,00
2	Komputer	8.513.658.820,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.170.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.838.815.079,00
5	Alat Laboratorium	35.432.500,00
6	Alat Angkutan	6.526.655.000,00
7	Alat Pertanian	4.034.800,00
8	Peralatan Proses/Produksi	8.498.600,00
9	Alat Keselamatan Kerja	1.995.386.000,00
10	Alat Kedokteran dan Kesehatan	153.714.650,00
	Jumlah	21.811.640.639,00

Pembelian Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.20 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	12.638.855.100,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	958.687.748,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	281.333.267,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	346.367.000,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	700.715.500,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	381.422.229,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	653.865.375,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.159.071.000,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	499.944.000,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	445.901.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	342.000.000,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1.054.450.980,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	348.254.790,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	359.500.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	498.334.000,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1.142.938.650,00
	Jumlah	21.811.640.639,00

- b. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.286.265.900,00 berupa:

Tabel 3.21 Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	124.700.000,00
2	Komputer	203.000.000,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	128.665.900,00
4	Alat Keselamatan Kerja	1.829.900.000,00
Jumlah		2.286.265.900,00

Transfer Masuk Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.22 Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	137.112.000,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	91.408.000,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	137.112.000,00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	274.224.000,00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	182.816.000,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	91.408.000,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	228.520.000,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	228.520.000,00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	91.408.000,00
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	137.112.000,00
11	Kantor Regional XI BKN Manado	182.816.000,00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	182.816.000,00
13	Kantor Regional XIII BKN Aceh	91.408.000,00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	138.177.900,00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	91.408.000,00
Jumlah		2.286.265.900,00

- c. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp71.708.100,00 menggunakan akun 532111 sebesar Rp5.000.000,00 dan menggunakan akun 532121 sebesar Rp66.708.100,00 berupa:
- 1) Komputer sebesar Rp36.708.100,00 yang berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
 - 2) Alat Angkutan sebesar Rp5.000.000,00 yang berasal dari Kantor Regional XI BKN Manado.
 - 3) Alat Besar sebesar Rp30.000.000,00 berasal dari Kantor Regional II BKN Surabaya.

- d. Hibah (Masuk) Peralatan dan Mesin sebesar Rp169.000.000,00 berupa Hibah Alat Angkutan dari Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) di Kantor Regional IV BKN Makassar.
- e. Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp587.767.375,00 berupa:

*Tabel 3.23 Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Komputer	299.646.375,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	105.637.500,00
3	Alat Besar	14.860.000,00
4	Alat Keselamatan Kerja	167.623.500,00
	Jumlah	587.767.375,00

Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin berasal dari:

*Tabel 3.24 Rincian Reklasifikasi Masuk per Satker
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	352.201.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	83.942.000,00
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	106.614.375,00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	14.860.000,00
5	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	30.150.000,00
	Jumlah	587.767.375,00

- f. Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp129.431.978,00 yang berasal dari:
 - 1) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp106.196.178,00 berupa Komputer.
 - 2) Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp17.563.100,00 berupa Komputer.
 - 3) Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp3.945.700,00 berupa Komputer.
 - 4) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp1.727.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
2. **Mutasi Kurang** transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.012.200.683,00 berupa:
 - a. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp111.868.878,00, yang berasal dari:
 - 1) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp106.196.178,00 berupa Komputer.

- 2) Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp3.945.700,00 berupa Komputer.
 - 3) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp1.727.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- b. Transfer Keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.286.265.900,00 berasal dari dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa:

Tabel 3.25 Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Komputer	203.000.000,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	128.665.900,00
3	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	124.700.000,00
4	Alat Keselamatan Kerja	1.829.900.000,00
	Jumlah	2.286.265.900,00

- c. Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp573.967.375,00 berupa:

Tabel 3.26 Rincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	14.860.000,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	273.261.000,00
3	Komputer	285.846.375,00
	Jumlah	573.967.375,00

Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.27 Rincian Reklasifikasi Keluar per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	338.401.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	83.942.000,00
3	Kantor Regional V BKN Jakarta	106.614.375,00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	14.860.000,00
5	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	30.150.000,00
	Jumlah	573.967.375,00

- d. Penghentian Aset dari Penggunaan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.040.098.530,00 berupa:

*Tabel 3.28 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	594.743.716,00
2	Komputer	5.227.189.927,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.743.196.887,00
4	Alat Angkutan	2.466.268.000,00
5	Peralatan Proses/Produksi	6.650.000,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.050.000,00
	Jumlah	11.040.098.530,00

Penghentian Aset dari Penggunaan pada Peralatan dan Mesin berasal dari:

*Tabel 3.29 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan per Satker
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	3.881.249.996,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.271.703.637,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	137.500,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	343.800.000,00
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	1.834.570.219,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	334.609.170,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.348.497.786,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	707.119.479,00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1.039.256.091,00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	217.906.988,00
11	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	61.247.664,00
	Jumlah	11.040.098.530,00

Rincian Peralatan dan Mesin per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.30 Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN	265.436.160.541,00	258.951.021.337,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	19.060.289.362,00	19.199.485.151,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	16.432.843.653,00	16.030.102.386,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	19.309.809.205,00	18.826.467.705,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	27.114.920.719,00	26.314.781.219,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	18.123.590.650,00	19.376.359.540,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	18.062.876.027,00	17.652.211.822,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	28.804.307.685,00	28.765.214.471,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	21.058.365.273,00	21.037.020.752,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	15.911.203.688,00	16.413.150.779,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	16.769.275.506,00	16.290.163.506,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	21.305.448.299,00	20.063.181.319,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	21.484.021.334,00	21.170.857.532,00
14	Kantor Regional XIII Aceh	5.540.485.452,00	5.089.577.452,00
15	Kantor Regional XIV Manokwari	8.169.566.328,00	7.594.302.092,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	45.857.384.371,00	44.623.037.721,00
	Jumlah	568.440.548.093,00	557.396.934.784,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2020-disajikan pada Lampiran Utama A1.

Gedung dan Bangunan
Rp833.845.886.323,-

C.13 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp833.845.886.323,00 dan Rp839.776.988.996,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	839.776.988.996,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	248.982.745,00
Pengembangan Nilai Aset	2.157.076.660,00
Reklasifikasi Masuk	154.950.000,00
Transfer Masuk	485.517.000,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.421.296.337,00
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	1.031.049.000,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN	37.386.000,00
Koreksi Kesalahan Input IP	13.260.525.000,00
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	43.770.000,00
Pengembangan Melalui KDP	5.976.900.190,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(79.361.336,00)
Koreksi Kesalahan Input IP	(1.450.803.000,00)
Reklasifikasi Keluar	(154.950.000,00)
Koreksi Pencatatan	(28.871.209.269,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(192.232.000,00)
Saldo per 31 Desember 2020	833.845.886.323,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(86.233.191.460,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	747.612.694.863,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.527.389.770,00, dari Pembelian, Pengembangan Nilai Aset, Penyelesaian Pembangunan dengan KDP, dan Pengembangan melalui KDP. Sedangkan Penambahan atas nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.804.255.932,00, terdapat selisih sebesar Rp276.866.162,00. Selisih tersebut berasal dari anggaran Belanja Barang yang direalisasikan untuk pengeluaran yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp234.277.012,00 dan transaksi atas pengurangan Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp168.744.037,00 terhadap Nilai Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan – Gedung dan Bangunan sebesar Rp126.154.887,00.

Adapun rincian atas koreksi penambahan/pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. **Mutasi Tambah** transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.817.452.932,00 berupa:
 - a. Pembelian sebesar Rp248.982.745,00 menggunakan akun 533111 berupa Bangunan Gedung Terbuka Semi Permanen dan Pos Jaga berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

- b. Pengembangan Nilai Aset berupa Bangunan Gedung sebesar Rp2.157.076.660,00 dengan rincian menggunakan akun 533121 sebesar Rp1.922.799.648,00 dan menggunakan akun 523111 sebesar Rp234.277.012,00. Adapun rincian pengembangan nilai aset berupa Bangunan Gedung berasal dari:

Tabel 3.32 Rincian Pengembangan Nilai Aset per Sater
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	568.961.267,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	149.358.594,00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	129.160.000,00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	417.801.900,00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	231.974.900,00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	69.217.549,00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	46.401.355,00
7	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	390.294.575,00
8	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	153.906.520,00
	Jumlah	2.157.076.660,00

- c. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp154.950.000,00 berupa Bangunan Gedung berasal dari Kantor Regional XIII BKN Aceh.
- d. Transfer Masuk sebesar Rp485.517.000,00 berupa Bangunan Gedung terdapat di Kantor Regional XI BKN Manado yang merupakan transfer masuk dari Kementerian Agama yang digunakan untuk operasional UPT Ternate.
- e. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP yang berasal dari Kantor Regional XI BKN Manado sebesar Rp1.421.296.337,00 dengan rincian menggunakan akun 533111 sebesar Rp398.976.000,00, menggunakan akun 533121 sebesar Rp853.576.300,00 dan saldo awal KDP sebesar Rp168.744.037,00. Adapun rincian pembangunan dengan KDP Gedung dan Bangunan berupa:

Tabel 3.33 Rincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Tugu Tanda Batas	1.022.320.337,00
2	Bangunan Gedung	398.976.000,00
	Jumlah	1.421.296.337,00

- f. Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar Rp1.031.049.000,00 yang berasal dari Kantor Regional VII BKN Palembang berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Nomor LHIP-019/REV/WKN.04/KNL.02/2020 berupa:

*Tabel 3.34 Rincian Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Tugu Tanda Batas	718.866.000,00
2	Bangunan Gedung	312.183.000,00
	Jumlah	1.031.049.000,00

- g. Koreksi Penilaian Kembali BMN sebesar Rp37.386.000,00 yang berasal dari Kantor Regional IV BKN Makasar berdasarkan LHIP Nomor LHIP-861/REV/WKN.15/KNL.02/2020 berupa Bangunan Gedung.

- h. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp13.260.525,00 berupa:

*Tabel 3.35 Rincian Koreksi Kesalahan Input IP
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Tugu Tanda Batas	21.629.000,00
2	Bangunan Gedung	13.238.896.000,00
	Jumlah	13.260.525.000,00

Koreksi Kesalahan Input IP pada Gedung dan Bangunan berasal dari:

*Tabel 3.36 Rincian Koreksi Kesalahan Input IP per Satker
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai	Nomor LHIP
1	Kantor Pusat BKN	1.841.000,00	157/WKN.07/KNL.04/2020
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	13.237.055.000,00	577/REV/WKN.09/KNL.06/2020
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	21.629.000,00	242/REV/WKN.15/KNL.02/2020
	Jumlah	13.260.525.000,00	

- i. Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali sebesar Rp43.770.000,00 yang berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta berdasarkan LHIP Nomor LHIP-578/REV/WKN.09/KNL.09/2020 berupa Bangunan Gedung.
- j. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp5.976.900.190,00 menggunakan akun 533121 berupa Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara yang berasal dari:

Tabel 3.37 Rincian Pengembangan melalui KDP per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	890.331.595,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.703.968.187,00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	1.107.060.700,00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.795.701.648,00
5	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	479.838.060,00
	Jumlah	5.976.900.190,00

2. **Mutasi Kurang** transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.748.555.605,00 berupa:

- a. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berupa Bangunan Gedung sebesar Rp79.361.336,00 berasal dari:

Tabel 3.38 Rincian Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Regional IV BKN Makasar	34.666.336,00
2	Kantor Regional IX BKN Jayapura	41.643.000,00
3	Kantor Regional XI BKN Manado	3.052.000,00
	Jumlah	79.361.336,00

- b. Koreksi Kesalahan Input IP berupa Bangunan Gedung sebesar Rp1.450.803.000,00 berasal dari:

Tabel 3.39 Rincian Koreksi Kesalahan Input IP per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Nomor LHIP
1	Kantor Regional III BKN Bandung	219.637.000,00	523/REV/WKN.08/KNL.01/2020
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	1.110.380.000,00	242/REV/WKN.15/KNL.02/2020
3	Kantor Regional V DKI Jakarta	56.906.000,00	523/REV/WKN.08/KNL.01/2020
4	Kantor Regional VII BKN Palembang	63.880.000,00	740/REV/WKN.04/KNL.01/2020
	Jumlah	1.450.803.000,00	

- c. Reklasifikasi Keluar berupa Bangunan Gedung sebesar Rp154.950.000,00 berasal dari Kantor Regional XIII BKN Aceh.
- d. Koreksi Pencatatan berupa Bangunan Gedung sebesar Rp28.871.209.269,00 sebagai hasil tindak lanjut revaluasi terhadap barang yang tidak ditemukan yang berasal dari:

Tabel 3.40 Rincian Koreksi Pencatatan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	10.557.935.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	6.400.000,00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	18.306.874.269,00
	Jumlah	28.871.209.269,00

- e. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp192.232.000,00 yang berasal dari Kantor Regional VI BKN Medan berupa Bangunan Gedung.

Rincian Gedung dan Bangunan per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.41 Rincian Gedung dan Bangunan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN	353.487.239.740,00	363.474.372.473,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	39.134.021.945,00	24.947.636.350,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	26.120.484.737,00	24.267.157.956,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	33.253.150.000,00	33.343.627.000,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	42.382.844.889,00	60.272.516.894,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	29.215.692.201,00	29.040.623.301,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	35.526.798.225,00	35.719.030.225,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	43.836.093.725,00	42.868.924.725,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	22.340.241.100,00	22.340.241.100,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	21.190.581.549,00	21.163.007.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	30.567.530.257,00	28.771.828.609,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	25.305.160.497,00	23.354.997.805,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	26.648.321.931,00	25.778.189.296,00
14	Kantor Regional XIII Aceh	5.655.405.004,00	5.655.405.004,00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	99.182.320.523,00	98.779.431.258,00
	Jumlah	833.845.886.323,00	839.776.988.996,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Utama A1.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp22.986.611.820,-

C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22.986.611.820,00 dan Rp21.187.821.770,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.42 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	21.187.821.770,00
Mutasi tambah:	
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	2.221.486.000,00
Koreksi Kesalahan Input IP	217.304.000,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN	10.106.000,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Kesalahan Input IP	(30.163.000,00)
Koreksi BMN Ditemukan Kembali	(61.245.863,00)
Koreksi Pencatatan	(541.118.000,00)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi	(17.579.087,00)
Saldo per 31 Desember 2020	22.986.611.820,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(16.175.754.222,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	6.810.857.598,00

Berdasarkan LRA, tidak terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, akan tetapi BKN mengalami penambahan nilai aset pada Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.798.790.050,00. Selisih tersebut berasal dari adanya penambahan/pengurangan nilai aset berupa koreksi atas hasil revaluasi.

Adapun rincian atas koreksi penambahan/pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

1. **Mutasi Tambah** transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.448.896.000,00 berupa:
 - a. Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar Rp2.221.486.000,00 yang berasal dari Kantor Regional VII BKN Palembang berdasarkan LHIP Nomor LHIP-740/REV/WKN.04/KNL.01/2020 berupa Bangunan Air sebesar Rp52.995.000,00 dan Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.168.491.000,00.
 - b. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp217.304.000,00 berupa Bangunan Air yang berasal dari:

Tabel 3.43 Rincian Koreksi Kesalahan Input IP per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Nomor LHIP
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	7.663.000,00	578/REV/WKN.09/KNL.09/2020
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	209.641.000,00	242/REV/WKN.15/KNL.02/2020
	Jumlah	217.304.000,00	

- c. Koreksi Penilaian Kembali BMN berasal dari Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp10.106.000,00 berupa Bangunan Air yang merupakan Hasil Revaluasi Tahun 2020 yang penilaian nominalnya dilakukan oleh Tim Revaluasi KPKNL.

2. **Mutasi Kurang** transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp650.105.950,00 berupa:
 - a. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp30.163.000,00 yang berasal dari Kantor Regional IV BKN Makasar berupa Bangunan Air berdasarkan LHIP Nomor LHIP-242/REV/WKN.15/KNL.02/2020.
 - b. Koreksi BMN Ditemukan Kembali sebesar Rp61.245.863,00 yang berasal dari Kantor Regional VII BKN Palembang berupa Jalan dan Jembatan.
 - c. Koreksi Pencatatan pada Jalan dan Jembatan sebesar Rp541.118.000,00 yang berasal dari Kantor Regional IV BKN Makasar.
 - d. Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi pada Jalan dan Jembatan sebesar Rp17.579.087,00 yang berasal dari Kantor Regional VII BKN Palembang.

Adapun Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.44 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN	56.071.000,00	56.071.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	925.565.400,00	917.902.400,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	20.000.000,00	20.000.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	290.456.867,00	290.456.867,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	7.399.412.500,00	7.750.946.500,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	2.108.128.600,00	2.108.128.600,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	2.879.491.700,00	736.830.650,00
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2.942.634.000,00	2.942.634.000,00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	2.062.182.000,00	2.062.182.000,00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	894.283.183,00	894.283.183,00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	308.174.570,00	308.174.570,00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	3.100.212.000,00	3.100.212.000,00
	Jumlah	22.986.611.820,00	21.187.821.770,00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Utama A1.

Aset Tetap Lainnya
Rp13.625.162.893,-

C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp13.625.162.893,00 dan Rp13.878.382.893,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	13.878.382.893,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	4.895.000,00
Pengembangan Nilai Aset	206.800.000,00
Mutasi kurang:	
Hibah (Keluar)	(464.915.000,00)
Saldo per 31 Desember 2020	13.625.162.893,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(1.300.175.866,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	12.324.987.027,00

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Modal Lainnya adalah senilai Rp5.392.848.500,00. Jumlah tersebut direalisasikan untuk perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp211.695.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp5.181.153.500,00. Realisasi penambahan nilai aset pada Aset Tetap Lainnya berupa pembelian bahan perpustakaan dan penambahan nilai atas Aset Tetap dalam Renovasi Gedung dan Bangunan sudah sesuai dengan realisasi Belanja Modal Lainnya yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sebesar Rp211.695.000,00.

Adapun rincian atas koreksi penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

1. **Mutasi Tambah** transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp211.695.000,00 berupa:
 - a. Pembelian Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.895.000,00 menggunakan akun 536111 berupa Bahan Perpustakaan pada Kantor Pusat BKN.
 - b. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp206.800.000,00 menggunakan akun 536111 berupa Aset Tetap Dalam Renovasi Gedung dan Bangunan berasal dari Kantor Regional XIV BKN Manokwari.
2. **Mutasi Kurang** transaksi Aset Tetap Lainnya berupa Hibah (Keluar) sebesar Rp464.915.000,00 yang merupakan Aset Tetap Dalam Renovasi Gedung dan Bangunan yang rusak akibat bencana alam sesuai dengan BAST Hibah Nomor 01/BAST-A/KR.IV/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 pada Kantor Regional IV BKN Makasar.

Rincian Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46 Rincian Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Koleksi Perpustakaan	1.667.252.595,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	120.600.000,00
3	Aset Tetap Renovasi	11.837.310.298,00
	Jumlah	13.625.162.893,00

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.47 Rincian Aset Tetap Lainnya Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	443.431.863,00	438.536.863,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	376.956.817,00	376.956.817,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	56.392.000,00	56.392.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	414.584.550,00	414.584.550,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	3.105.699.150,00	3.570.614.150,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	745.273.190,00	745.273.190,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	173.193.222,00	173.193.222,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	838.912.644,00	838.912.644,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.927.538.381,00	1.927.538.381,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	9.999.550,00	9.999.550,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	445.735.317,00	445.735.317,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1.102.669.039,00	1.102.669.039,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1.185.150.817,00	1.185.150.817,00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2.006.204.992,00	1.799.404.992,00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	793.421.361,00	793.421.361,00
	Jumlah	13.625.162.893,00	13.878.382.893,00

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2020 disajikan pada Lampiran Utama A1.

Konstruksi dalam
pengerjaan (KDP)
Rp224.384.887,-

C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp224.384.887,00 dan Rp168.744.037,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai dan belum digunakan sampai dengan tanggal neraca. Mutasi transaksi terhadap KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	168.744.037,00
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP Tanah	98.230.000,00
Perolehan/Penambahan KDP Aset Tak Berwujud	63.241.750,00
Perolehan/Penambahan KDP Gedung dan Bangunan	607.441.881,00
Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan	6.748.165.496,00
Pengembangan KDP Aset Tak Berwujud	34.053.250,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi ATB	(97.295.000,00)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi GB	(7.398.196.527,00)
Saldo per 31 Desember 2020	224.384.887,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	224.384.887,00

Adapun rincian atas koreksi penambahan/pengurangan nilai KDP adalah sebagai berikut:

1. **Mutasi Tambah** transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.719.876.414,00 berupa:
 - a. Perolehan/Penambahan KDP Tanah sebesar Rp98.230.000,00 melalui utang kepada pihak ketiga berupa jasa konsultan atas pengurusan tanah sesuai dengan kontrak kerja Nomor: 59.1/SPK/PPK/KANREG-XIII/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang berasal dari Kanreg XIII BKN Banda Aceh.
 - b. Perolehan/Penambahan KDP Aset Tak Berwujud sebesar Rp63.241.750,00 menggunakan akun 536121 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
 - c. Perolehan/Penambahan KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp607.441.881,00 dengan rincian menggunakan akun 533111 sebesar Rp23.320.000,00, akun 523111 sebesar Rp62.993.287,00 dan akun 533121 sebesar Rp521.128.594,00 berupa Konstruksi dalam pengerjaan yang berasal dari:

Tabel 3.49 Rincian Perolehan/Penambahan KDP
Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	62.993.287,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	29.920.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	88.882.750,00
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	292.838.750,00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	63.161.600,00
6	Kantor Regional X BKN Denpasar	9.332.219,00
7	Kantor Regional XI BKN Manado	23.320.000,00
8	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	36.993.275,00
	Jumlah	607.441.881,00

- d. Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.748.165.496,00 berupa Konstruksi dalam pengerjaan menggunakan akun 533111 sebesar Rp375.656.000,00 dan akun 533121 sebesar Rp6.372.509.496,00 yang berasal dari:

Tabel 3.50 Rincian Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	860.411.595,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.615.085.437,00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	814.221.950,00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.786.369.429,00
5	Kantor Regional XI BKN Manado	1.229.232.300,00
6	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	442.844.785,00
	Jumlah	6.748.165.496,00

- e. Pengembangan KDP Aset Tak Berwujud sebesar Rp34.053.250,00 berupa Konstruksi dalam pengerjaan menggunakan akun 536121 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
2. **Mutasi Kurang** transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp7.495.491.527,00 berupa:
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp97.295.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
 - Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi berupa Gedung Bangunan sebesar Rp7.398.196.527,00 yang berasal dari:

Tabel 3.51 Rincian Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	890.331.595,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.703.968.187,00
3	Kantor Regional IV BKN Makassar	1.107.060.700,00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.795.701.648,00
5	Kantor Regional XI BKN Manado	1.421.296.337,00
6	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	479.838.060,00
	Jumlah	7.398.196.527,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp593.554.832.820,-

C.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp593.554.832.820,00 dan Rp529.214.206.460,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020. Rincian Akumulasi Penyusutan pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.52 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	568.440.548.093,00	487.381.520.102,00	81.059.027.991,00
2	Gedung dan Bangunan	833.845.886.323,00	86.233.191.460,00	747.612.694.863,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.986.611.820,00	16.175.754.222,00	6.810.857.598,00
4	Aset Tetap Lainnya	13.625.162.893,00	5.503.180.195,00	8.121.982.698,00
	Jumlah	1.438.898.209.129,00	595.293.645.979,00	843.604.563.150,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Lampiran Utama A1.

Aset Tak Berwujud
Rp150.148.317.195,-

C.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp150.148.317.195,00 dan Rp182.079.955.859,00. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi ATB pada BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53 Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	182.079.955.859,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.874.466.500,00
Pengembangan Nilai Aset	3.209.392.000,00
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	517.926.000,00
Pengembangan melalui KDP	97.295.000,00
Mutasi kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	(517.926.000,00)
Reklasifikasi Keluar	(13.800.000,00)
Koreksi Pencatatan	(9.075.000,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(37.089.917.164,00)
Saldo per 31 Desember 2020	150.148.317.195,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(142.686.489.940,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	7.461.827.255,00

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Modal Lainnya perolehan Aset Lainnya sebesar Rp5.181.153.500,00. Tidak ada selisih jika dibandingkan dengan Penambahan ATB dari Pembelian, Pengembangan Nilai Aset, dan Pengembangan melalui KDP.

Adapun rincian atas koreksi penambahan/pengurangan nilai ATB adalah sebagai berikut:

1. **Mutasi Tambah** transaksi ATB sebesar Rp5.699.079.500,00 berupa:
 - a. Pembelian ATB senilai Rp1.874.466.500,00 menggunakan akun 536111 berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa *Software Komputer*.
 - b. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp3.209.392.000,00 menggunakan akun 536121 berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa *Software Komputer*.
 - c. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp517.926.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa *Software Komputer*.
 - d. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp97.295.000,00 menggunakan akun 536121 berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa *Software Komputer*.

2. **Mutasi Kurang** transaksi ATB sebesar Rp37.630.718.164,00 berupa:
 - a. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp517.926.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa *Software* Komputer.
 - b. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp13.800.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa *Software* Komputer.
 - c. Koreksi Pencatatan sebesar Rp9.075.000,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa *Software* Komputer.
 - d. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp37.089.917.164,00 berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa:

Tabel 3.54 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Software	36.552.521.164,00
2	Lisensi	347.196.000,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	190.200.000,00
Jumlah		37.089.917.164,00

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 3.55 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Hak Cipta	500.000,00	500.000,00
2	Software Komputer	149.913.158.345,00	181.307.401.009,00
3	Lisensi	39.658.850,00	386.854.850,00
4	Hasil Kajian/Penelitian	195.000.000,00	385.200.000,00
Jumlah Nilai Perolehan		150.148.317.195,00	182.079.955.859,00
Amortisasi ATB		(142.686.489.940)	(172.722.774.340)
Jumlah		7.461.827.255,00	9.357.181.519,00

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.56 Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	140.678.221.915,00	172.600.785.579,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	964.568.500,00	964.568.500,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	806.761.700,00	806.761.700,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	849.703.850,00	849.703.850,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	713.533.250,00	713.533.250,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	288.057.250,00	297.132.250,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	767.754.180,00	767.754.180,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	886.661.700,00	886.661.700,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	651.566.250,00	651.566.250,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	729.484.450,00	729.484.450,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	707.946.750,00	707.946.750,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	651.566.250,00	651.566.250,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	740.391.250,00	740.391.250,00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	712.099.900,00	712.099.900,00
	Jumlah	150.148.317.195,00	182.079.955.859,00

Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2020 disajikan pada Lampiran Utama A2.

Aset Lain-Lain

Rp45.898.772.635,-

C.19 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp45.898.772.635,00 dan Rp9.691.419.774,00. Aset Lain-lain berupa reklasifikasi atas Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan yang dibatasi penggunaannya. Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 3.57 Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	9.691.419.774,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	48.322.247.694,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN yang dihentikan	(12.056.017.583,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(17.563.100,00)
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(27.814.150,00)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(13.500.000,00)
Saldo per 31 Desember 2020	45.898.772.635,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(44.648.595.795,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1.250.176.840,00

Adapun rincian atas koreksi penambahan/pengurangan nilai Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1. **Mutasi Tambah** transaksi Aset Lain-Lain berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp48.322.247.694,00 yang berasal dari:

Tabel 3.58 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	40.971.167.160,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.271.703.637,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	137.500,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	343.800.000,00
5	Kantor Regional V BKN DKI	1.834.570.219,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	526.841.170,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.348.497.786,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	707.119.479,00
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1.039.256.091,00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	217.906.988,00
11	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	61.247.664,00
	Jumlah	48.322.247.694,00

2. **Mutasi Kurang** transaksi Aset Lain-Lain berupa Penghapusan BMN yang dihentikan sebesar Rp12.114.894.833,00 berupa:

- a. Penghapusan BMN yang dihentikan sebesar Rp12.056.017.583,00 berupa:

Tabel 3.59 Rincian Penghapusan BMN yang Dihentikan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Angkutan	1.946.888.000,00
2	Alat Besar	6.961.438.897,00
3	Alat Kantor & Rumah Tangga	1.536.106.145,00
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.451.424,00
5	Komputer	1.562.133.117,00
	Jumlah	12.056.017.583,00

Penghapusan BMN yang Dihentikan berasal dari:

Tabel 3.60 Rincian Penghapusan BMN yang Dihentikan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	9.126.746.083,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	99.940.500,00
3	Kantor Regional V BKN DKI	974.201.250,00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	229.042.000,00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1.626.087.750,00
	Jumlah	12.056.017.583,00

- b. Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan) sebesar Rp17.563.100,00 berasal dari Kantor Regional V BKN DKI Jakarta berupa Komputer.
- c. Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp27.814.150,00 berasal dari Kantor Regional VII BKN Palembang berupa *Software* Komputer.
- d. Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan) sebesar Rp13.500.000,00 berasal dari Kantor Regional IX BKN Jayapura berupa Alat Angkutan.

Rincian Aset Lain-lain Per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.61 Rincian Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	38.668.087.974,00	6.823.666.897,00
2	Kantor Regional I BKN Jogjakarta	1.171.763.137,00	-
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	517.793.691,00	517.793.691,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	120.107.691,00	119.970.191,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	343.800.000,00	-
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	842.805.869,00	-
7	Kantor Regional VI BKN Medan	526.841.170,00	-
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.348.497.786,00	27.814.150,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	707.119.479,00	229.042.000,00
10	Kantor Regional IX Jayapura	582.370.747,00	1.182.702.406,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	127.632.947,00	127.632.947,00
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	876.758.230,00	658.851.242,00
13	Kantor Regional XIII BKN Aceh	2.640.000,00	2.640.000,00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	62.553.914,00	1.306.250,00
	Jumlah	45.898.772.635,00	9.691.419.774,00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Utama A1.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp187.335.085.735,-

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp187.335.085.735,00 dan Rp182.401.733.389,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.62 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	500.000,00	42.853,00	457.147,00
2	Software Komputer	149.913.158.345,00	142.652.737.064,00	7.260.421.281,00
3	Lisensi	39.658.850,00	33.710.023,00	5.948.827,00
4	Hasil Kajian/Penelitian	195.000.000,00	-	195.000.000,00
	Jumlah	150.148.317.195,00	142.686.489.940,00	7.461.827.255,00
B	Aset Lain-lain	45.898.772.635,00	44.648.595.795,00	1.250.176.840,00
	Jumlah	196.047.089.830,00	187.335.085.735,00	8.712.004.095,00

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan dalam Lampiran Utama A2.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1.537.404.551,-

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.537.404.551,00 dan Rp1.544.968.188,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Rincian utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63 Rincian Utang Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	140.923.592,00
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	1.294.179.359,00
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	98.230.000,00
4	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	4.071.600,00
	Jumlah	1.537.404.551,00

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp140.923.592,00 merupakan pembayaran atas kekurangan gaji, tunjangan ataupun uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.64 Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	28.182.621,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	23.847.781,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	986.397,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.536.331,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	13.217.496,00
6	Kantor Regional V BKN DKI	105.200,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	7.807.499,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	2.050.020,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	14.461.450,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	1.202.495,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.085.973,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	15.168.317,00
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	1.363.712,00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	29.908.300,00
	Jumlah	140.923.592,00

2. Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp1.294.179.359,00 merupakan pembayaran atas tagihan pemakaian listrik, telepon, air, pengiriman surat dinas/pos dan tagihan lainnya yang seharusnya masih menjadi beban tahun 2020 namun baru dibayarkan pada tahun 2021. Adapun rincian per satker, yaitu:

*Tabel 3.65 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per Satker
(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	630.411.936,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	42.376.346,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	48.702.639,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	35.401.206,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	67.104.085,00
6	Kantor Regional V BKN DKI	40.096.758,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	38.996.738,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	61.579.411,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	40.617.820,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	19.860.939,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	34.458.328,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	67.683.613,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	61.990.606,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	11.755.215,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	14.364.882,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	78.778.837,00
	Jumlah	1.294.179.359,00

3. Belanja Modal yang masih harus dibayar sebesar Rp98.230.000,00 merupakan pembayaran atas jasa konsultan perencanaan penimbunan dan pematangan tanah tahun 2020 pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh sesuai kontrak kerja nomor 59.1/SPK/PPK/KANREG-XIII/IV/2020 tanggal 3 April 2020, yang belum bisa dibayarkan kepada pihak ketiga dikarenakan adanya pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi.
4. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp4.071.600,00 merupakan koreksi kas lainnya berupa honor pegawai sebesar Rp285.000,00 dan uang makan pegawai yang sudah direalisasikan pada tahun 2020, namun belum disalurkan ke yang bersangkutan per 31 Desember 2020.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.66 Rincian Tagihan Utang kepada Pihak Ketiga per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	658.594.557,00	700.276.317,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	66.224.127,00	47.083.627,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	52.035.036,00	68.828.975,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	36.937.537,00	47.023.421,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	80.321.581,00	94.443.424,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	40.201.958,00	55.842.912,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	46.804.237,00	43.256.333,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	63.629.431,00	67.384.470,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	55.079.270,00	52.485.048,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	22.789.034,00	26.966.065,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	35.544.301,00	98.933.001,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	82.851.930,00	59.336.362,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	61.990.606,00	63.118.788,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	109.985.215,00	14.107.955,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	15.728.594,00	33.853.833,00
16	Pusat Pengembangan ASN	108.687.137,00	72.027.657,00
	Jumlah	1.537.404.551,00	1.544.968.188,00

Pendapatan Diterima di Muka Rp533.658.360,-

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp533.658.360,00 dan Rp339.543.666,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan diterima dimuka pada BKN bersumber dari sewa tanah, gedung dan bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun anggaran. Perbandingan Pendapatan Diterima di Muka sebagai berikut:

Tabel 3.67 Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima di Muka
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	466,759,777	309,746,999
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1,000,000	2,000,000
3	Kantor Regional V BKN DKI	33,754,000	-
4	Kantor Regional XI BKN Manado	20,344,000	4,926,667
5	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	11,435,000	22,870,000
6	Pusat Pengembangan ASN	365,583	-
	Jumlah	533,658,360	339,543,666

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 berdasarkan nomor kontrak, jangka waktu dan nilai kontrak tersaji pada Lampiran Utama A6.

Uang Muka dari KPPN
Rp2.205.725,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.205.725,00 dan Rp0,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp3.434.549.903.261,-

C.24 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.164.387.964.809,00 dan Rp3.472.135.583.010,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp12.864.544.144,-

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah PNBPN pada BKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.864.544.144,00 dan Rp22.930.005.598,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Rincian PNBPN

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	508.583.107,00	501.242.973,00	1,46
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusnya	22.500.000,00	1.126.050.000,00	(98,00)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.379.483.000,00	3.268.400.000,00	(57,79)
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	10.920.400.000,00	17.992.312.000,00	(39,31)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.468.988,00	25.158.389,00	(90,19)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	26.703.463,00	16.842.176,00	58,55
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	4.405.586,00	60,00	7.342.543,33
TOTAL	12.864.544.144,00	22.930.005.598,00	(43,90)

Pendapatan Operasional pada BKN mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 43,90% dari tahun sebelumnya disebabkan menurunnya aktivitas pelayanan sosial yang diberikan sehubungan adanya pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB di wilayah kerja satker. Pendapatan yang mengalami penurunan yang sangat signifikan berasal dari pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tugas fungsinya yang ada pada satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dan pendapatan pengembangan SDM lainnya di Kantor Pusat karena berkurangnya permintaan jasa akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan LRA, BKN memperoleh PNBPN sebesar Rp14.667.031.603,00. Sedangkan Pendapatan LO sebesar Rp12.864.544.144,00, terdapat selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp1.802.487.459,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA yang dicatat sebagai Pendapatan Non Operasional pada Laporan Operasional Rp1.426.399.520,00.
2. Penyesuaian Pendapatan LO atas transaksi Piutang Rp181.973.245,00.
3. Penyesuaian Pendapatan LO atas transaksi Pendapatan Diterima Dimuka Rp194.114.694,00

Beban Pegawai

Rp298.270.216.854,-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp298.270.216.854,00 dan Rp332.657.688.878,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan aset.

Tabel 4.2 Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	125.231.201.564,00	133.218.016.394,00	(6,00)
Beban Tunjangan- Tunjangan	55.750.276.263,00	58.324.652.788,00	(4,41)
Beban Lembur	538.657.250,00	826.711.550,00	(34,84)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	116.750.081.777,00	140.288.308.146,00	(16,78)
JUMLAH	298.270.216.854,00	332.657.688.878,00	(10,34)

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Pegawai pada BKN adalah sebesar Rp298.246.157.774,00, sedangkan Beban Pegawai LO sebesar Rp298.270.216.854,00. Terdapat selisih antara Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO sebesar Rp24.059.080,00. Selisih tersebut merupakan selisih nilai dari penyesuaian akrual atas Beban Pegawai pada periode Desember 2020 yang masih harus dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp140.923.592,00 dan Beban Pegawai pada periode Desember 2019 yang telah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp116.864.512,00.

Beban Persediaan

Rp12.752.768.231,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.752.768.231,00 dan Rp17.466.403.794,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 4.3 Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	10.298.125.109,00	16.023.712.133,00	(35,73)
Beban Persediaan Pita, Cukai, Materai dan Leges	-	12.024.000,00	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Baku	224.165.944,00	439.798.816,00	(49,03)
Beban Persediaan Lainnya	2.230.477.178,00	990.868.845,00	125,10
JUMLAH	12.752.768.231,00	17.466.403.794,00	(26,99)

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban yang tidak berkaitan langsung dengan pengeluaran kas, seperti pemakaian persediaan akan sangat sulit untuk diidentifikasi. Hal ini dikarenakan persediaan yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dicatat menggunakan kode barang yang sama dengan BMN pada umumnya, berdasarkan ketentuan mengenai kodefikasi BMN.

Pada TA 2020 terdapat perbaikan *posting rule*, dimana Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges yang pada *posting rule* sebelumnya tercatat pada "Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat" diperbaiki melalui *update* aplikasi SAIBA terbaru sehingga berubah menjadi "Beban Persediaan Konsumsi".

Beban Barang dan Jasa
Rp144.778.343.415,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp144.778.343.415,00 dan Rp109.506.720.738,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 4.4 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	44.698.349.408,00	42.389.508.880,00	5,45
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.853.804.397,00	-	0,00
Beban Barang Non Operasional	23.713.174.975,00	21.445.164.769,00	10,58
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	864.186.328,00	-	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa	14.979.589.740,00	15.581.987.868,00	(3,87)
Beban Jasa Konsultan	1.675.309.788,00	1.809.913.814,00	(7,44)
Beban Sewa	43.290.130.738,00	17.338.269.457,00	149,68
Beban Jasa Profesi	3.658.819.000,00	6.842.244.000,00	(46,53)
Beban Jasa Lain	3.464.123.272,00	3.943.977.750,00	(12,17)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.514.311.819,00	-	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	66.543.950,00	155.654.200,00	(57,25)
JUMLAH	144.778.343.415,00	109.506.720.738,00	32,21

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban khusus penanganan pandemi COVID-19 dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.5 Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

(Dalam Rupiah)

NO	BEBAN	JUMLAH
1	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.844.981.237,00
2	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	864.186.328,00
3	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.514.311.819,00
	JUMLAH	9.223.479.384,00

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Barang dan Belanja Jasa pada BKN adalah sebesar Rp144.828.201.635,00, sedangkan nilai Beban Barang dan Beban Jasa pada LO sebesar Rp144.778.343.415,00. Terdapat selisih nilai antara Beban Barang Jasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Barang dan Belanja Jasa pada LRA sebesar Rp49.858.220,00.

Selisih sebesar Rp49.858.220,00 merupakan selisih penyesuaian transaksi Beban Barang Jasa LO sebesar Rp102.514.634, perolehan Beban Ekstrakomptabel (Rp66.543.950) dan pengembalian Belanja Barang dan Belanja Jasa sebesar Rp13.887.536,00.

Beban Pemeliharaan
Rp29.009.747.490,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.009.747.490,00 dan Rp30.723.604.413,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 4.6 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.206.070.243,00	12.337.560.362,00	(9,17)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	159.636.310,00	-	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	483.642.280,00	503.994.879,00	(4,04)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.120.001.631,00	15.632.835.340,00	(9,68)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.155.754,00	-	0,00
Beban Pemeliharaan Irigasi	4.983.000,00	-	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	131.977.800,00	-	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	578.183.523,00	804.955.527,00	(28,17)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.258.877.093,00	1.433.565.585,00	57,57
Beban Persediaan Suku Cadang	17.219.856,00	10.692.720,00	61,04
JUMLAH	29.009.747.490,00	30.723.604.413,00	(5,58)

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban khusus penanganan pandemi COVID-19 pada beban pemeliharaan adalah Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp159.636.310,00.

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Pemeliharaan pada BKN adalah sebesar Rp27.432.630.464,00, sedangkan Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp29.009.747.490,00. Terdapat selisih nilai antara Beban Pemeliharaan pada LO dengan Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp1.577.117.026,00. Selisih tersebut merupakan mutasi penambahan dan penggunaan persediaan Bahan Pemeliharaan Rp1.588.084.876,00,00 dan Pengembalian Belanja Pemeliharaan sebesar Rp10.967.850,00.

Beban Perjalanan Dinas
Rp69.392.561.983,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp69.392.561.983,00 dan Rp58.278.233.022,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

Tabel 4.7 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	55.734.773.460,00	44.307.878.520,00	25,79
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.358.106.083,00	841.443.000,00	180,25
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.778.907.000,00	6.934.180.982,00	(2,24)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.622.332.613,00	-	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.893.842.827,00	5.549.449.684,00	(47,85)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	4.600.000,00	645.280.836,00	(99,29)
JUMLAH	69.392.561.983,00	58.278.233.022,00	19,07

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban khusus penanganan pandemi COVID-19 pada beban perjalanan dinas adalah beban perjalanan dinas – penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.622.332.613,00.

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas pada BKN adalah sebesar Rp70.367.069.420,00. Terdapat selisih nilai antara Belanja Perjalanan Dinas pada LRA dan Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp974.507.437,00 yang merupakan Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp86.129.054.609,-.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp86.129.054.609,00 dan Rp87.090.158.645,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.726.737.129,00	52.121.563.842,00	(10,35)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.971.424.125,00	25.877.851.284,00	0,36
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.999.710.992,00	4.129.560.126,00	45,29
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.928.848.212,00	444.429.542,00	334,01
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	24.972.486,00	61.658.097,00	(59,50)
Jumlah Penyusutan	80.651.692.944,00	82.635.062.891,00	(2,40)
Beban Amortisasi			
Beban Amortisasi Software	5.247.046.787,00	4.433.762.927,00	18,34
Beban Amortisasi Hak Cipta	7.142,00	7.142,00	0,00
Beban Amortisasi Lisensi	21.325.685,00	21.325.685,00	0,00
Beban Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan	208.982.051,00	-	0,00
Jumlah Amortisasi	5.477.361.665,00	4.455.095.754,00	22,95
JUMLAH	86.129.054.609,00	87.090.158.645,00	(1,10)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
(Rp1.867.467,-)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp1.867.467,00) dan Rp25.814.023,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	26.777.569,00	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(1.867.467,00)	(963.546,00)	93,81
JUMLAH	(1.867.467,00)	25.814.023,00	(107,23)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih bernilai negatif dikarenakan adanya penyesuaian nilai akrual terhadap Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Pembayaran Piutang periode Desember 2019 yang telah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan Non
Operasional
Rp1.266.462.727,-

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.266.462.727,00 dan Rp5.175.740.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10 Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	571.698.250,00	61.854.612,00	824,26
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.054.945.850,00	401.441.298,00	162,79
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	483.247.600,00	339.586.686,00	42,30
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	694.764.477,00	5.113.886.284,00	(86,41)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	1.814.631.448,00	6.463.868.075,00	(71,93)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.119.866.971,00	1.349.981.791,00	(17,05)
Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	1.266.462.727,00	5.175.740.896,00	(75,53)

Surplus Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.266.462.727,00 berasal dari:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.054.945.850,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp118.200.100,00 yang berasal dari:
 - 1) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp66.700.100,00 berupa penjualan satu unit mini bus (penumpang 14 orang kebawah).
 - 2) Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp51.500.000,00 berupa penjualan enam unit mini bus (penumpang 14 orang kebawah), tiga unit sepeda motor.
 - b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp936.745.750,00 yang berasal dari:
 - 1) Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp756.345.750,00 berupa alat kantor, alat rumah tangga, alat bantu, alat angkutan darat bermotor dan komputer unit.

- 2) Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp171.700.000,00 berupa alat kantor dan alat angkutan darat bermotor.
 - 3) Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar Rp8.700.000,00 berupa alat studio, alat kantor, alat rumah tangga, komputer unit dan peralatan komputer.
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp483.247.600,00 yang merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset yang berasal dari:
- a. Kantor Regional IV BKN Makasar berupa Hibah Keluar (Gedung dan Bangunan dalam Renovasi/UPT) sebesar Rp464.915.000,00.
 - b. Kantor Regional IX BKN Jayapura berupa UPS sebesar Rp2.365.000,00 dan Mesin Absensi sebesar Rp15.967.600,00.
3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.814.631.448,00 yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp4.000.000,00 berupa Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri berasal dari Kantor Regional IX BKN Jayapura.
 - b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp35.805.181,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, realisasi atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu pada Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp184.098.426,00. Terdapat selisih nilai sebesar Rp148.293.245,00 yang merupakan penyesuaian akrual atas pembayaran piutang pada Kantor Pusat BKN Jakarta.
 - c. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp258.406.257,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, realisasi atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp292.086.257,00. Terdapat selisih nilai sebesar Rp33.680.000,00 yang merupakan penyesuaian akrual atas pembayaran piutang pada Kantor Pusat BKN Jakarta.
 - d. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp57.439.868,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, realisasi atas Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu pada Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp57.439.868,00, sehingga tidak ada selisih atas Penerimaan tersebut.
 - e. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp15.802.364,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, realisasi atas Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS pada Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp15.802.364,00, sehingga tidak ada selisih atas pendapatan tersebut.

- f. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp1.443.177.778,00. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan yang menggunakan metode harga perolehan terakhir. Adapun pendapatan penyesuaian nilai persediaan pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.11 Rincian Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
(Dalam Rupiah)*

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	937.251.687,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	29.309.147,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	9.591.408,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	9.991.258,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	193.052.674,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	9.932.940,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2.076.475,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	21.322.936,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	30.419.538,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	53.114.820,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	15.754.955,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	29.058.920,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	17.031.718,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	12.871.860,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	30.569.082,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	41.825.360,00
	Jumlah	1.443.174.778,00

4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.119.866.971,00 yang terdiri atas:
- a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp951.528.796,00. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan yang menggunakan metode harga perolehan terakhir. Adapun rincian atas Beban Penyesuaian Nilai Persediaan pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rincian Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	513.528.548,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	23.727.609,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	19.174.479,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2.095.256,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	147.832.164,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	9.863.920,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	2.691.175,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	38.817.128,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	9.191.558,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	23.041.448,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	6.615.100,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	20.055.304,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	10.837.747,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	759.200,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	20.816.950,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	102.481.210,00
Jumlah		951.528.796,00

- b. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp168.338.175,00. Adapun rincian atas Beban Persediaan Rusak/Usang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Rincian Beban Persediaan Rusak/Usang

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional IX BKN Jayapura	140.929.200,00
2	Kantor Regional XI BKN Manado	1.032.975,00
3	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	26.376.000,00
Jumlah		168.338.175,00

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp3.472.135.583.010,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.472.135.583.010,00 dan Rp1.157.181.353.925,00.

Defisit LO

Rp626.199.818.244,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp626.199.818.244,00 dan Rp607.642.877.019,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,-

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,-

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,-

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi yang merupakan bagian dari pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (391151) yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN. Koreksi atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp8,00).

Tabel 5.1 Rincian Nilai Koreksi Aset Reklasifikasi
(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Reklas Masuk	Reklas Keluar	
Kantor Pusat	276.051.000,00	276.051.000,00	-
Peralatan dan Mesin	276.051.000,00	276.051.000,00	-
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	165.409.000,00	165.409.000,00	-
Peralatan dan Mesin	83.942.000,00	83.942.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	81.467.000,00	81.467.000,00	-
Kantor Regional V BKN DKI	213.228.750,00	213.228.750,00	-
Peralatan dan Mesin	106.614.375,00	106.614.375,00	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	106.614.375,00	106.614.375,00	-
Kantor Regional VI BKN Medan	29.720.000,00	29.720.000,00	-
Peralatan dan Mesin	14.860.000,00	14.860.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.860.000,00	14.860.000,00	-
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	37.405.000,00	37.405.000,00	-
Peralatan dan Mesin	30.150.000,00	30.150.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.255.000,00	7.255.000,00	-
Kantor Regional XI BKN Manado	3.666.000,00	3.666.000,00	-
Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	3.666.000,00	(3.666.000,00)
Barang Konsumsi	3.666.000,00	-	3.666.000,00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	160.096.500,00	160.096.500,00	-
Peralatan dan Mesin	154.950.000,00	154.950.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.146.500,00	5.146.500,00	-
Jumlah	885.576.250,00	885.576.250,00	-

Selisih Revaluasi Aset
Tetap
Rp14.577.025.804,-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.577.025.804,00 dan Rp2.340.402.705.522,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan, jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per Satker pada Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

Entitas	Aset	Nilai (Rp)
Kantor Pusat BKN Jakarta	Tanah	1.077.641.667,00
	Gedung dan Bangunan	1.841.000,00
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Tanah	1.516.275.000,00
	Gedung dan Bangunan	13.258.684.000,00
	Irigasi	7.663.000,00
Kantor Regional III BKN Bandung	Gedung dan Bangunan	(219.637.000,00)
Kantor Regional IV BKN Makassar	Gedung dan Bangunan	(1.072.994.000,00)
	Irigasi	189.584.000,00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	Gedung dan Bangunan	(56.906.000,00)
Kantor Regional VII BKN Palembang	Gedung dan Bangunan	(63.880.000,00)
	Jalan dan Jembatan	(78.824.950,00)
	Akum. Penyusutan Jalan dan Jembatan	17.579.087,00
JUMLAH		14.577.025.804,00

Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp277.332.936.789,-)

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp277.332.936.789,00) dan (Rp3.068.630.632,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 5.3 Rincian Nilai Koreksi Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
A. Aset Tetap			
Tanah	2.450.000.000,00	256.636.493.000,00	(254.186.493.000,00)
Peralatan dan Mesin	129.431.978,00	111.868.878,00	17.563.100,00
Gedung dan Bangunan	1.074.819.000,00	28.950.570.605,00	(27.875.751.605,00)
Jalan, Irigasi dan, Jaringan	2.221.486.000,00	541.118.000,00	1.680.368.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	117.671.091,00	(117.671.091,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.520.457.629,00	855.607.987,00	4.664.849.642,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.039.013.705,00	25.406.882,00	2.013.606.823,00
Akumulasi Aset Tetap Lainnya	33.389.387,00	3.034.098.858,00	(3.000.709.471,00)
B . Aset Lainnya			
Software	517.926.000,00	527.001.000,00	(9.075.000,00)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	17.563.100,00	(17.563.100,00)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	27.814.150,00	(27.814.150,00)
Akumulasi Amortisasi Software	9.075.000,00	517.926.000,00	(508.851.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6.789.913,00	-	6.789.913,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	27.814.150,00	-	27.814.150,00
Jumlah	14.030.202.762,00	291.363.139.551,00	(277.332.936.789,00)

Koreksi Lain-lain
(Rp176.144.808,-)

E.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp176.144.808,00) dan Rp0,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain sebesar (Rp176.144.808,00) ini berasal dari:

1. Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara sebesar (Rp151.370.808,00) berupa:
 - a) Koreksi pencatatan atas hibah langsung tahun anggaran yang lalu yang belum disahkan sebesar (Rp109.357.115,00);
 - b) Koreksi pencatatan atas kesalahan jurnal balik atas nilai beban air di tahun 2019 sebesar (Rp5,00);
 - c) Koreksi pencatatan atas kesalahan pencatatan piutang penerimaan bukan pajak sebesar (Rp45.081.147,00);
 - d) Koreksi pencatatan atas kesalahan pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih – piutang penerimaan bukan pajak sebesar Rp3.067.459,00.
2. Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar (Rp24.774.000,00) berupa koreksi pencatatan atas kesalahan pencatatan beban penyisihan piutang penerimaan bukan pajak.

Transaksi Antar Entitas
Rp581.384.255.836,-

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp581.384.255.836,00 dan Rp585.263.031.222,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 5.4 Rincian Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
1. Ditagihkan ke Entitas Lain	595.325.743.616,00
2. Diterima dari Entitas Lain	(14.667.031.603,00)
3. Transfer Keluar	(2.291.697.310,00)
4. Transfer Masuk	2.738.884.018,00
5. Pengesahan Hibah Langsung	169.000.000,00
6. Pengesahan Hibah Langsung TAYL	109.357.115,00
Jumlah	581.384.255.836,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2020, Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp595.325.743.616,00.

2. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2020, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp14.667.031.603,00).

3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.291.697.310,00) terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Entitas Asal	Uraian	Nilai
Kantor Pusat BKN Jakarta	Barang Konsumsi	5.538.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.286.265.900,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(106.590,00)
JUMLAH		2.291.697.310,00

Transfer keluar sebesar Rp2.291.697.310,00 berasal dari Kantor Pusat BKN. Berikut ini rincian transfer keluar sebagai berikut:

- a. Barang Konsumsi sebesar Rp5.538.000,00 dengan entitas tujuan:

Tabel 5.6 Rincian Transfer Keluar berupa Barang Konsumsi

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Nilai
Kantor Regional II BKN Surabaya	5.225.000,00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	313.000,00
JUMLAH	5.538.000,00

- b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.286.265.900,00 dengan entitas tujuan:

Tabel 5.7 Rincian Transfer Keluar berupa Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Nilai
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	137.112.000,00
Kantor Regional II BKN Surabaya	91.408.000,00
Kantor Regional III BKN Bandung	137.112.000,00
Kantor Regional IV BKN Makassar	274.224.000,00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	182.816.000,00
Kantor Regional VI BKN Medan	91.408.000,00
Kantor Regional VII BKN Palembang	228.520.000,00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	228.520.000,00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	91.408.000,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	137.112.000,00
Kantor Regional XI BKN Manado	182.816.000,00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	182.816.000,00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	91.408.000,00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	138.177.900,00
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	91.408.000,00
JUMLAH	2.286.265.900,00

- c. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp106.590,00) dengan entitas tujuan Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.738.884.018,00 terdiri dari:

Tabel 5.8 Rincian Transfer Masuk

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Nilai (Rp)
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	137.112.000,00
Kantor Regional II BKN Surabaya	96.633.000,00
Kantor Regional III BKN Bandung	137.112.000,00
Kantor Regional IV BKN Makassar	274.224.000,00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	182.816.000,00
Kantor Regional VI BKN Medan	91.408.000,00
Kantor Regional VII BKN Palembang	228.520.000,00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	228.833.000,00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	91.408.000,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	137.112.000,00
Kantor Regional XI BKN Manado	630.002.708,00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	182.816.000,00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	91.408.000,00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	138.071.310,00
Pusat Pengembangan ASN	91.408.000,00
JUMLAH	2.738.884.018,00

Transfer Masuk sebesar Rp2.738.884.018,00 berasal dari:

- a. Kantor Regional I BKN Yogyakarta berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp137.112.000,00.
- b. Kantor Regional II BKN Surabaya berupa:
 - 1) Barang Konsumsi sebesar Rp5.225.000,00.
 - 2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.408.000,00.
- c. Kantor Regional III BKN Bandung berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp137.112.000,00.
- d. Kantor Regional IV BKN Makassar berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp274.224.000,00.
- e. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp182.816.000,00.
- f. Kantor Regional VI BKN Medan berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.408.000,00.
- g. Kantor Regional VII BKN Palembang berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp228.520.000,00.

- h. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin berupa:
 - 1) Barang Konsumsi sebesar Rp313.000,00.
 - 2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp228.520.000,00.
- i. Kantor Regional IX BKN Jayapura berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.408.000,00.
- j. Kantor Regional X BKN Denpasar berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp137.112.000,00.
- k. Kantor Regional XI BKN Manado berupa:
 - 1) Gedung dan Bangunan sebesar Rp485.517.000,00.
 - 2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp38.330.292),00.
 - 3) Peralatan dan Mesin sebesar Rp182.816.000,00.
- l. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp182.816.000,00.
- m. Kantor Regional XIII BKN Aceh berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.408.000,00.
- n. Kantor Regional XIV BKN Manokwari, berupa:
 - 1) Peralatan dan Mesin sebesar Rp138.177.900,00.
 - 2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp106.590,00).
- o. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.408.000,00.

5. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 169.000.000,00 berasal dari Kantor Regional IV BKN Makassar.

6. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp109.357.115,00 berasal dari Kantor Pusat BKN berupa Hibah Luar Negeri dari Kegiatan Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA) sesuai dengan BAST Nomor: 39.1/A/KS/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0,00.

Ekuitas Akhir
Rp3.164.387.964.809,-

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing – masing sebesar Rp3.164.387.964.809,00 dan Rp3.472.135.583.010,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Pada tanggal 20 Januari 2021, Badan Kepegawaian Negara menerima Hibah Tanah dan Bangunan Gedung dari Pemerintah Kota Ternate sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Barang Nomor: 641.6/01/2021, Nomor: 2/K/KS/I/2021. Hibah Tanah dan Bangunan Gedung tersebut terletak di Jalan Jati Nomor 475, Kelurahan: Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, yang dipergunakan untuk Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di Wilayah Provinsi Maluku Utara.
2. Pada tanggal 17 September 2020 sampai dengan 30 November 2020, Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh memiliki Pekerjaan atas Penimbunan Kompleks dengan volume penimbunan seluas 23.523,15 M³. Total biaya atas pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp4.986.860.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya jasa konsultan perencanaan sebesar Rp98.230.000,00 dibebankan pada DIPA Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Tahun Anggaran 2020, namun anggaran tersebut direvisi ke DIPA Tahun Anggaran 2021.
 - b. Biaya penimbunan kompleks kantor sebesar Rp4.688.700.000,00 dan Biaya pengawasan penimbunan komplek sebesar Rp298.160.000,00 yang didanai oleh Biaya Otonomi Khusus Pemerintah Aceh sesuai dengan BAST Hibah Nomor: 32/BAST/PPTK.WIL.III/TB/PERKIM/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat Nomor S-4130/A/144/1992, tanggal 28 Oktober 1992, Kantor Regional III BKN Bandung telah mengajukan permohonan peminjaman tanah tersebut. Kementerian Keuangan telah menanggapi dengan Surat Nomor 432/I/1992 dan Surat Kepala PPDIA Bandung tanggal 22 September 1992 tentang Hak Guna Tanah, akan tetapi permohonan pinjam pakai tersebut belum terealisasi sampai sekarang.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di ibu kota seluruh Indonesia. Pembentukan Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) BKN ini dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian khususnya layanan penyelenggara seleksi calon dan kompetensi Aparatur Sipil Negara serta mempercepat perbaikan kualitas sistem seleksi dan SDM ASN, BKN mendorong terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memfasilitasi pemanfaatan *Computer Assisted Test* (CAT) dan *Assesment* yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pemetaan kompetensi pegawai ASN di daerah-daerah yang tidak terdapat Kantor Regional BKN.

Adapun Rincian MOU Pinjam Pakai antara BKN dan Pemerintah Daerah selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rincian MOU Pinjam Pakai Tahun 2015-2019

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional
1	Mataram	900/3824.9/BPKAD/2015 06/K/KS/II/2016 21 Desember 2015	Mataram Barat, Selarapang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125	Kantor Regional X BKN Denpasar
2	Semarang	030/000639 04/A/KS/II/2016 12 Januari 2016	Jl Soekarno Hatta KM. 29 Bergas, Semarang, Jawa Tengah, 50552	Kantor Regional I BKN Yogyakarta
3	Jambi	144/SPP.Gub/BPKAD/2016 08/K/KS/II/2016 18 Januari 2016	Lorong Riska Tani No. 90 Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361	Kantor Regional VII BKN Palembang
4	Kendari	3/Tahun2016 09/K/KS/II/Tahun 2016 29 Januari 2016	Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93122	Kantor Regional IV BKN Makassar
5	Serang	032/Penj 4-HUK/2016 22/A/KS/III/2016 03 Maret 2016	Jalan KH. Sokhari No. 40, Cipare Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten	Kantor Regional III BKN Bandung
6	Gorontalo	47/HKM-ORG/PK/III/2016 18/A/KS/III/2016 21 Maret 2016	Jl. H.D.I Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Gorontalo 96181	Kantor Regional XI BKN Manado
7	Padang	030/117/VI/2016 24/A/KS/VI/2016 14 Juni 2016	Jl. Rimbo Kaluang No. 52, Rimbo Kaluang Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
8	Bengkulu	43/PPA/Roum/VII/2016 29 Juli 2016	Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu 38119	Kantor Regional VII BKN Palembang
9	Ambon	077-85 Tahun 2017 23/A/KS/V/2017 19 Mei 2017	Jl. A.I.S Nasution No. 8, Karang Panjang, Kel. Amantelu Sirimau, Kota Ambon, Maluku	Kantor Regional IV BKN Makassar
10	Sorong	030/449/2017 01/SDJ/V/2017 23 Mei 2017	Jl. Pemda Kompleks Kantor Pemda Kelurahan Airmas Distrik Airmas Km. 24 Kabupaten Sorong	Kantor Regional XIV BKN Manokwari
11	Pontianak	11/PK/PA/2017 29/A/KS/VII/2017 20 Juli 2017	Jl. Veteran No. 29 Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113	Kantor Regional V BKN Jakarta
12	Mamuju	008.005/754/SET 07/A/KS/VII/2017 09 Maret 2018	Jl. Martadinata Simboro Kec. Simboro Dan Kepulauan Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, 91512	Kantor Regional IV BKN Makassar
13	Palangkaraya	900/342/BPKAD/2018 01/SPJ/IV/2018 18 April 2018	Jl. W. Sudirohusodo No. 20 Langkai Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 74874	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional
14	Lampung	032/304/VI.04/2018 16/A/KS/VI/2018 23 Mei 2018	Jl. Nusa Indah 1 No 02A Sumur Batu Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 35214	Kantor Regional V BKN Jakarta
15	Batam	01/BA.PP.ASET/BPKAD/VII/2018 23/A/KS/VII/2018 06 Juli 2018	Gedung Bersama Pemko Belian Batam Kota Batam Kepulauan Riau	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
16	Donggala	011/231/BPKAD/2018 42/A/KS/2018 17 Desember 2018	Jl. Bantilan No. 20 Lere Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah 94111	Kantor Regional IV BKN Makassar
17	Ternate	800/101/SETDA/2018 01/K/KS/2019 04 Januari 2019	Jl. Jato no. 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	Kantor Regional XI BKN Manado
18	Balikpapan	032/103/BPKD 05/K/KS/II/2019 07 Februari 2019	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 11 No. 3 Sepinggan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
19	Pangkal Pinang	06/K/KS/II/2016 01/PP/BAKEUDA/II/2019 28 Februari 2019	Jl. Bukit Intan No. 223, Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung 33684	Kantor Regional VII BKN Palembang
20	Tarakan	032/ASET-VI/006/2019 15/K/KS/VI/2019 13 Juni 2019	Jl. Kalimantan No. 1 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Adapun Rincian MOU Perpanjangan Pinjam Pakai antara BKN dan Pemerintah Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Rincian MOU Pinjam Pakai Tahun 2020

No	UPT	Nomor MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional
1	Mataram	900/1702.b/BPKAD/2020 37.3/A/KS/XII/2020 02 Nopember 2020	Mataram Barat, Selarapang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125	Kantor Regional X BKN Denpasar
2	Kupang	BU.028/1635/BPKAD/XI/2020 37.1/A/KS/XI/2020 02 Nopember 2020	Mataram Barat, Selarapang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125	Kantor Regional X BKN Denpasar
3	Semarang	030/0017332 10 Desember 2020	Jalan Soekarno Hatta KM. 29 Bergas, Kebonan Randugunting Bergas, Semarang, Jawa Tengah, 50552	Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Jakarta, April 2021
Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Hari Wibisana

LAMPIRAN UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2020

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG				SALDO 31 DESEMBER 2020				NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITA S	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	62.888	568.440.548.093,00	451.523.348.089,00	46.726.737.129,00	(10.868.565.116,00)	487.381.520.102,00	81.059.027.991,00
30103	ALAT BANTU	166	33.427.385.106,00	21.146.739.067,00	2.711.009.997,00	0,00	23.857.749.064,00	9.569.636.042,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	220	38.002.375.200,00	26.529.102.891,00	2.904.643.729,00	(2.458.588.000,00)	26.975.158.620,00	11.027.216.580,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	84	153.450.250,00	151.067.089,00	6.193.775,00	(7.680.000,00)	149.580.864,00	3.869.386,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	18	5.012.660.335,00	4.519.753.525,00	80.633.625,00	0,00	4.600.387.150,00	412.273.185,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	35	109.626.600,00	78.065.280,00	17.473.480,00	0,00	95.538.760,00	14.087.840,00
30303	ALAT UKUR	6	11.549.050,00	9.533.010,00	1.217.360,00	0,00	10.750.370,00	798.680,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	7	199.807.300,00	195.772.500,00	504.350,00	0,00	196.276.850,00	3.530.450,00
30501	ALAT KANTOR	10.341	83.445.297.073,00	74.515.978.018,00	4.024.397.275,00	(1.120.754.781,00)	77.419.620.512,00	6.025.676.561,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37.326	132.701.432.583,00	115.621.142.696,00	7.217.732.973,00	(1.593.607.844,00)	121.245.267.825,00	11.456.164.758,00
30601	ALAT STUDIO	948	25.535.450.220,00	19.937.327.791,00	2.597.700.670,00	(571.306.016,00)	21.963.722.445,00	3.571.727.775,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	709	5.162.839.543,00	4.475.953.514,00	274.685.471,00	(20.147.600,00)	4.730.491.385,00	432.348.158,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1.440.181.793,00	540.566.980,00	144.026.390,00	0,00	684.593.370,00	755.588.423,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	341	809.596.090,00	538.890.228,00	68.906.435,00	(2.050.000,00)	605.746.663,00	203.849.427,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	8	20.907.750,00	11.503.325,00	3.279.550,00	0,00	14.782.875,00	6.124.875,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	97	5.689.140.494,00	4.383.750.807,00	395.760.905,00	0,00	4.779.511.712,00	909.628.782,00
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA	1	18.616.500,00	0,00	620.550,00	0,00	620.550,00	17.995.950,00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	5	18.205.000,00	231.786,00	1.532.144,00	0,00	1.763.930,00	16.441.070,00
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	7.159	86.487.723.689,00	68.617.332.912,00	8.410.010.139,00	(3.477.462.612,00)	73.549.880.439,00	12.937.843.250,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	5.309	147.317.812.607,00	109.667.439.106,00	17.256.098.178,00	(1.610.318.263,00)	125.313.219.021,00	22.004.593.586,00
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	ALAT PELINDUNG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31503	ALAT SAR	57	2.169.719.500,00	3.355.000,00	544.107.376,00	0,00	547.462.376,00	1.622.257.124,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	511.948.410,00	391.401.720,00	63.649.890,00	(6.650.000,00)	448.401.610,00	63.546.800,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	24	140.065.000,00	133.682.844,00	2.552.867,00	0,00	136.235.711,00	3.829.289,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	6	54.758.000,00	54.758.000,00	0,00	0,00	54.758.000,00	0,00
133111	Gedung dan Bangunan	460	833.845.886.323,00	64.910.006.719,00	25.500.764.948,00	(4.177.580.207,00)	86.233.191.460,00	747.612.694.863,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	150	724.064.184.493,00	57.731.468.520,00	22.221.091.900,00	(4.058.179.356,00)	75.894.381.064,00	648.169.803.429,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	286	97.155.986.864,00	6.678.448.565,00	2.878.600.071,00	(174.249.176,00)	9.382.799.460,00	87.773.187.404,00
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45.569.000,00	2.003.032,00	1.001.516,00	0,00	3.004.548,00	42.564.452,00
40401	TUGU/TANDA BATAS	23	12.580.145.966,00	498.086.602,00	400.071.461,00	54.848.325,00	953.006.388,00	11.627.139.578,00
134111	Jalan dan Jembatan	53.426	16.124.321.000,00	9.965.698.149,00	5.784.582.091,00	(2.029.536.892,00)	13.720.743.348,00	2.403.577.652,00
50101	JALAN	53.416	16.122.161.000,00	9.944.123.812,00	5.784.526.707,00	(2.008.101.015,00)	13.720.549.504,00	2.401.611.496,00
50102	JEMBATAN	10	2.160.000,00	21.574.337,00	55.384,00	(21.435.877,00)	193.844,00	1.966.156,00
134112	Irigasi	27	2.764.941.783,00	327.107.793,00	104.137.050,00	25.406.882,00	456.651.725,00	2.308.290.058,00
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257.076.600,00	10.273.417,00	5.587.530,00	0,00	15.860.947,00	241.215.653,00
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159.020.000,00	9.661.710,00	3.864.684,00	0,00	13.526.394,00	145.493.606,00
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	16.428.500,00	3.285.700,00	1.642.850,00	0,00	4.928.550,00	11.499.950,00
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	11	1.541.794.683,00	236.976.960,00	66.119.223,00	25.009.982,00	328.106.165,00	1.213.688.518,00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440.714.000,00	37.934.790,00	15.332.676,00	396.900,00	53.664.366,00	387.049.634,00
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349.908.000,00	28.975.216,00	11.590.087,00	0,00	40.565.303,00	309.342.697,00
134113	Jaringan	31	4.097.349.037,00	1.914.423.198,00	83.935.951,00	0,00	1.998.359.149,00	2.098.989.888,00
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335.572.500,00	158.801.161,00	11.185.751,00	0,00	169.986.912,00	165.585.588,00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	613.242.000,00	120.110.800,00	15.331.050,00	0,00	135.441.850,00	477.800.150,00
50310	INSTALASI LAIN	7	951.173.820,00	951.173.820,00	0,00	0,00	951.173.820,00	0,00
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103.840.700,00	46.728.310,00	3.461.357,00	0,00	50.189.667,00	53.651.033,00
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2.028.728.367,00	604.481.015,00	50.718.211,00	0,00	655.199.226,00	1.373.529.141,00
50403	JARINGAN TELEPON	2	64.791.650,00	33.128.092,00	3.239.582,00	0,00	36.367.674,00	28.423.976,00
135111	Aset Tetap Renovasi	28	11.837.310.298,00	543.822.512,00	1.842.427.348,00	2.698.236.449,00	5.084.486.309,00	6.752.823.989,00
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3.998.500,00	999.625,00	1.999.250,00	0,00	2.998.875,00	999.625,00
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	24	11.574.407.398,00	542.822.887,00	1.806.581.618,00	2.591.641.209,00	4.941.045.714,00	6.633.361.684,00
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258.904.400,00	0,00	33.846.480,00	106.595.240,00	140.441.720,00	118.462.680,00
135121	Aset Tetap Lainnya	25	40.600.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	10.800.000,00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	25	40.600.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	10.800.000,00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1.037	8.808.855.471,00	9.651.144.899,00	16.846.573,00	(1.041.892.742,00)	8.626.098.730,00	182.756.741,00
30103	ALAT BANTU	0	0,00	6.961.438.897,00	0,00	(6.961.438.897,00)	0,00	0,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	961.200.000,00	463.000.000,00	0,00	498.200.000,00	961.200.000,00	0,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	6	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30303	ALAT UKUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30501	ALAT KANTOR	90	340.285.981,00	172.381.700,00	(7.311.700,00)	175.215.981,00	340.285.981,00	0,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	501	1.167.324.041,00	126.984.355,00	5.980.987,00	1.029.568.799,00	1.162.534.141,00	4.789.900,00
30601	ALAT STUDIO	15	715.850.847,00	191.631.255,00	(473.000,00)	524.692.592,00	715.850.847,00	0,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	9	475.810.500,00	454.737.800,00	925.100,00	20.147.600,00	475.810.500,00	0,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436.185.894,00	424.878.394,00	11.307.500,00	0,00	436.185.894,00	0,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	216	2.739.201.248,00					

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2020						NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTI TAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162121	Hak Cipta	1	500.000,00	35.711,00	7.142,00	0,00	42.853,00	457.147,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500.000,00	35.711,00	7.142,00	0,00	42.853,00	457.147,00
162151	Software	305	149.913.158.345,00	172.675.634.691,00	5.247.046.787,00	(35.269.944.414,00)	142.652.737.064,00	7.260.421.281,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	305	149.913.158.345,00	172.675.634.691,00	5.247.046.787,00	(35.269.944.414,00)	142.652.737.064,00	7.260.421.281,00
162161	Lisensi	1	39.658.850,00	47.103.938,00	21.325.685,00	(34.719.600,00)	33.710.023,00	5.948.827,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	39.658.850,00	47.103.938,00	21.325.685,00	(34.719.600,00)	33.710.023,00	5.948.827,00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	33	36.899.717.164,00	27.814.150,00	208.982.051,00	35.785.700.864,00	36.022.497.065,00	877.220.099,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	33	36.899.717.164,00	27.814.150,00	208.982.051,00	35.785.700.864,00	36.022.497.065,00	877.220.099,00
JUMLAH		340	186.853.034.359,00	172.750.588.490,00	5.477.361.665,00	481.036.850,00	178.708.987.005,00	8.144.047.354,00

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 DAFTAR REKENING BENDAHARA SATKER BKN
 PER 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	SALDO 31 DES 2020	REKENING		
			NOMOR	NAMA	BANK & CABANG
REKENING PENGELUARAN					
1	Kantor Pusat BKN	-	034001002055304	BPG 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA	BRI KC JAKARTA OTISTA
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	-	1370090011475	BPG 030 KANREG I BKN YOGYA	MANDIRI KC YOGYAKARTA SUDIRMAN
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2.346.000,00	041201000029304	BPG 165 KANREG II BKN SURABAYA	BRI KC JEMURSARI SURABAYA
4	Kantor Regional III BKN Bandung	-	0185887374	BPG 095 KANTOR REGIONAL III BKN	BNI KCP PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	0083188177	BPG 136 KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	BNI KC MATTOANGIN
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	-	34530381	BPG 088 KANREG V BKN JAKARTA	BNI KC JATINEGARA
7	Kantor Regional VI BKN Medan	-	1050098020088	BPG 004 KANREG VI BKN	MANDIRI KC MEDAN IMAM BONJOL
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	0070571040	BPG 014 KANREG VII BKN PLG	BNI KC. PALEMBANG SUDIRMAN
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	-	00081310008	BPG 045 BKN KANREG VIII BANJARMASIN	BNI KC. BANJARBARU
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	-	030701001118309	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	0117450856	BPG 037 KANREG X BKN DENPASAR	BNI KC RENON DENPASAR
12	Kantor Regional XI BKN Manado	-	380937505	BPG 049 KANREG XI BKN MANADO	BNI KLN BANDARA SAMRATULANGI MANADO
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	-	017001001215302	BPG 008 KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	BRI KC PEKANBARU
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	-	003701003509307	BPG 001 BKN KANTOR REGIONAL XIII	BRI KC. BANDA ACEH CUT MEUTIA
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	035301001570306	BPG 065 KANREG XIV BKN MANOKWARI	BRI KC Manokwari
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000108304	BPG 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KCP KPPN BOGOR
REKENING PENERIMAAN					
17	Kantor Pusat BKN	-	034001002735302	BPN 088 BKN 017220	BRI KC JAKARTA OTISTA
18	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000123304	BPN 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KCP KPPN BOGOR
REKENING LAINNYA					
19	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000127308	RPL 023 KS PUSBANG ASN UTK DIKLAT	BRI KCP KPPN BOGOR

Lampiran A4

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DDAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

NO	PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	KET
1	Prospera	Jasa	DN	109.357.115,00	109.357.115,00	
2	PT Bank Sulselbar	Barang	DN	169.000.000,00	169.000.000,00	
Jumlah				278.357.115,00	278.357.115,00	

Jakarta, April 2021

Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Haria Wibisana

Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Informasi Belanja Dibayar Dimuka
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

Bagian Anggaran : (088) **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
Eselon I / UAPPA-E1 : (01) **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Perjanjian	Nilai Kontrak	Jumlah
1	Kanreg II BKN Surabaya	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	22 Juni 2020 s/d 21 Juni 2021	INV 27145034	1.768.136,00	884.068,00
2	Kanreg III BKN Bandung	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	1 Juni 2020 s/d 31 Mei 2021	866/KWI/F	5.088.805,00	2.120.335,00
3	Kanreg IV BKN Makasar	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	10 Juni 2020 s/d 9 Juni 2021	INV 25318467	2.111.042,00	1.055.521,00
		Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	10 Juni 2020 s/d 9 Juni 2021	INV 25318710	2.111.042,00	1.055.521,00
4	Kanreg V BKN DKI Jakarta	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	27 Juli 2020 s/d 26 Juli 2021	INV 33318828	2.267.238,00	1.322.555,00
5	Kanreg XII BKN Pekanbaru	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	17 Juni 2020 s/d 17 Juni 2021	Kuitansi : 000479	3.008.500,00	1.504.250,00
6	Kanreg XIII Banda Aceh	Biaya Sewa Gedung Tata Naskah	12 bulan	1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021	340/PTTSDBT/VII/2020	13.000.000,00	6.500.000,00
7	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	13 Mei 2020 s/d 12 Mei 2021	009/PEP/KW/VI/2020	12.845.500,00	4.817.062,00
Jumlah							19.259.312,00

Catatan : Nilai kontrak merupakan nilai bersih setelah dikurangi dengan nilai pengembalian belanja (*dokumen terlampir pada Lampiran Pendukung XV*)

Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Informasi Pendapatan Diterima Dimuka
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

Bagian Anggaran : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Eselon I / UAPPA-E1 : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(Dalam Rupiah)

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Jumlah
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	PT. Infrasia Investama	60 bulan	27 Mei 2018 s.d 27 Mei 2023	42.1/A/KS/XII/2018 002/INF/PKS-BKN/XII/2018	93.840.000,00	54.740.000,00
		PT. BRI (ATM)	36 bulan	15 Feb 2020 s.d 15 Feb 2023	26.1/A/KS/VI/2020 3318/KC-V/LOG/06/2020	78.634.000,00	54.606.944,00
		PT Telekomunikasi Selular	60 bulan	01 Des 2018 s.d 30 Nov 2023	11.1/A/V-5/IV/2019 PKS.0746/LG05/RC-03/V/2019	102.310.000,00	59.680.833,00
		PT. BRI (Kantor)	36 bulan	01 Agst 2018 s.d 31 Jul 2021	08/A/KS/III/2019 B1359 KCV/LOG/03/2019	206.478.000,00	40.148.500,00
		PT. BNI	24 bulan	01 Jan 2020 s.d 31 Des 2021	JNG/PK/35/2019 36/A/KS/2019	385.716.000,00	192.858.000,00
		PT. Bank DKI	24 bulan	01 Okt 2020 s.d 30 Sep 2022	35.1/A/KS/X/2020	33.516.000,00	29.326.500,00
		PT Fidac Inovasi Teknologi	60 bulan	20 Mar 2019 s.d 19 Mar 2024	09/A/KS/III/2019 12/FIT/III/2019	54.460.000,00	35.399.000,00
2	Kanreg I BKN Yogyakarta	KPRI SEDAR	60 bulan	01 Jan 2017 s.d 31 Des 2021	151/SK-REG.I/2016	5.000.000,00	1.000.000,00
3	Kanreg V BKN DKI Jakarta	PT. BNI (ATM)	36 bulan	02 Jan 2020 s.d 01 Jan 2023	063/KR.V.25.1/II/2020 JNG/PKS/05/2020	50.631.000,00	33.754.000,00
4	Kanreg XI BKN Manado	PT. BNI (ATM)	36 bulan	01 Sept 2020 s.d 31 Agus 2023	MDO/01/019/PKS SEWA ATM/2020	22.887.000,00	20.344.000,00
5	Kanreg XII BKN Pekanbaru	PT. BRI (ATM)	36 bulan	01 Jan 2019 s.d 31 Des 2021	001/PS-ATM/KR.XII/5-2019	34.305.000,00	11.435.000,00
6	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	PT. BRI (ATM)	12 bulan	28 Jan 2020 s.d 28 Jan 2021	010/PSM/PusbanASN/I/2020	4.387.000,00	365.583,00
Jumlah							533.658.360,00

LAMPIRAN PENDUKUNG

LAMPIRAN I

Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 20/04/21 2:22 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	11,388,920,000	14,667,031,603	(3,278,111,603)	129	21,368,692,000	29,531,470,578	(8,162,778,578)	138
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	11,388,920,000	14,667,031,603	(3,278,111,603)	129	21,368,692,000	29,531,470,578	(8,162,778,578)	138
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	363,258,569,000	298,246,157,774	65,012,411,226	82	339,969,961,000	332,810,746,831	7,159,214,169	98
	BELANJA BARANG	298,465,899,000	258,381,290,483	40,084,608,517	87	224,950,672,000	214,197,780,568	10,752,891,432	95
	BELANJA MODAL	39,834,495,000	38,698,295,359	1,136,199,641	97	68,743,699,000	67,781,174,401	962,524,599	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	701,558,963,000	595,325,743,616	106,233,219,384	85	633,664,332,000	614,789,701,800	18,874,630,200	97
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 20/04/21 4:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	140,740,270,000	142,900,142,000	125,253,363,170	742,600	125,252,620,570	87.65	17,647,521,430
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3,717,000	3,822,000	1,762,315	30,302	1,732,013	46.11	2,089,987
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10,499,384,000	10,616,191,000	8,618,933,158	1,713,030	8,617,220,128	81.19	1,998,970,872
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,759,028,000	2,713,626,000	2,058,773,596	539,836	2,058,233,760	75.87	655,392,240
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	8,469,111,000	8,411,013,000	7,715,590,000	6,089,000	7,709,501,000	91.73	701,512,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,723,101,000	9,850,007,000	9,323,163,000	10,320,200	9,312,842,800	94.65	537,164,200
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,278,888,000	916,115,000	706,586,685	0	706,586,685	77.13	209,528,315
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,680,848,000	6,597,733,000	5,352,519,870	144,840	5,352,375,030	81.13	1,245,357,970
511129	Belanja Uang Makan PNS	25,765,018,000	24,351,397,000	19,310,127,000	4,632,400	19,305,494,600	79.3	5,045,902,400
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	655,255,000	591,774,000	589,850,000	475,000	589,375,000	99.67	2,399,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4,221,718,000	3,789,245,000	2,105,335,000	53,897,839	2,051,437,161	55.56	1,737,807,839
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	209,796,338,000	210,741,065,000	181,036,003,794	78,585,047	180,957,418,747	85.9	29,783,646,253
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,272,798,000	1,080,958,000	538,657,250	0	538,657,250	49.83	542,300,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,272,798,000	1,080,958,000	538,657,250	0	538,657,250	49.83	542,300,750
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	151,575,026,000	151,436,546,000	116,750,081,777	0	116,750,081,777	77.1	34,686,464,223
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	151,575,026,000	151,436,546,000	116,750,081,777	0	116,750,081,777	77.1	34,686,464,223
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	362,644,162,000	363,258,569,000	298,324,742,821	78,585,047	298,246,157,774	82.12	65,012,411,226
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	38,700,343,000	39,263,159,000	38,667,386,460	821,000	38,666,565,460	98.48	596,593,540
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,247,170,000	543,670,000	535,548,700	0	535,548,700	98.51	8,121,300
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,202,077,000	1,192,253,000	1,115,581,755	0	1,115,581,755	93.57	76,671,245
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,817,040,000	3,737,550,000	3,703,560,000	0	3,703,560,000	99.09	33,990,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	899,022,000	952,543,000	711,088,760	744,500	710,344,260	74.65	242,198,740
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,285,403,000	2,862,493,708	0	2,862,493,708	87.13	422,909,292
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	45,865,652,000	48,974,578,000	47,595,659,383	1,565,500	47,594,093,883	97.18	1,380,484,117
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	16,514,077,000	14,666,413,000	12,013,542,195	0	12,013,542,195	81.91	2,652,870,805
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,237,215,000	12,041,150,000	10,194,885,000	4,587,500	10,190,297,500	84.67	1,850,852,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,584,155,000	1,587,547,000	1,509,335,280	0	1,509,335,280	95.07	78,211,720
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,135,244,000	864,186,328	0	864,186,328	76.12	271,057,672

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 20/04/21 4:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	23,335,447,000	29,430,354,000	24,581,948,803	4,587,500	24,577,361,303	83.53	4,852,992,697
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,422,685,000	14,660,657,000	14,091,905,201	66,000	14,091,839,201	96.12	568,817,799
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	61,974,000	69,285,000	54,722,000	0	54,722,000	78.98	14,563,000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,782,186,000	2,606,191,286	700	2,606,190,586	93.67	175,995,414
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	16,484,659,000	17,512,128,000	16,752,818,487	66,700	16,752,751,787	95.66	759,376,213
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	16,970,997,000	15,571,950,000	14,158,465,628	36	14,158,465,592	90.92	1,413,484,408
522112	Belanja Langganan Telepon	977,148,000	599,198,000	476,996,876	359,500	476,637,376	79.61	122,560,624
522113	Belanja Langganan Air	463,068,000	465,172,000	398,460,473	0	398,460,473	85.66	66,711,527
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	140,000,000	138,000,000	137,940,000	0	137,940,000	99.96	60,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	2,354,426,000	1,952,850,000	1,675,309,788	0	1,675,309,788	85.79	277,540,212
522141	Belanja Sewa	18,466,160,000	46,410,640,000	43,158,791,593	0	43,158,791,593	92.99	3,251,848,407
522151	Belanja Jasa Profesi	8,174,930,000	4,625,779,000	3,664,494,000	5,675,000	3,658,819,000	79.22	966,960,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,193,442,000	3,718,906,000	3,464,123,272	0	3,464,123,272	93.15	254,782,728
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,497,680,000	5,516,011,819	1,700,000	5,514,311,819	84.89	983,368,181
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	53,740,171,000	79,980,175,000	72,650,593,449	7,734,536	72,642,858,913	90.84	7,337,316,087
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,199,654,000	11,592,673,000	11,440,347,255	0	11,440,347,255	98.69	152,325,745
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	283,554,000	212,754,000	188,896,500	0	188,896,500	88.79	23,857,500
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	180,300,000	159,636,310	0	159,636,310	88.54	20,663,690
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	791,709,000	507,995,000	483,642,280	0	483,642,280	95.21	24,352,720
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,691,349,000	14,654,264,000	14,130,969,481	10,967,850	14,120,001,631	96.43	534,262,369
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	386,700,000	287,500,000	264,838,561	0	264,838,561	92.12	22,661,439
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109,000,000	56,500,000	49,155,754	0	49,155,754	87	7,344,246
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	4,983,000	4,983,000	0	4,983,000	100	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10,000,000	133,500,000	131,977,800	0	131,977,800	98.86	1,522,200
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	199,000,000	0	0	0	0		0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	976,800,000	592,634,000	578,183,523	0	578,183,523	97.56	14,450,477
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	31,652,766,000	28,223,103,000	27,432,630,464	10,967,850	27,421,662,614	97.2	801,440,386
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	49,087,169,000	75,619,904,000	56,632,542,365	897,768,905	55,734,773,460	74.89	19,885,130,540
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,191,824,000	5,927,994,000	2,412,124,115	54,018,032	2,358,106,083	40.69	3,569,887,917
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,896,446,000	7,449,386,000	6,780,329,500	1,422,500	6,778,907,000	91.02	670,479,000
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,745,700,000	1,622,332,613	0	1,622,332,613	92.93	123,367,387

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 20/04/21 4:03 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,184,933,000	3,552,577,000	2,895,880,327	2,037,500	2,893,842,827	81.51	658,734,173
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	63,360,372,000	94,295,561,000	70,343,208,920	955,246,937	69,387,961,983	74.6	24,907,599,017
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	50,000,000	23,860,500	19,260,500	4,600,000	47.72	45,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	50,000,000	23,860,500	19,260,500	4,600,000	47.72	45,400,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	234,439,067,000	298,465,899,000	259,380,720,006	999,429,523	258,381,290,483	86.9	40,084,608,517
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	7,000,000,000	1,828,500,000	1,828,164,400	0	1,828,164,400	99.98	335,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	7,000,000,000	1,828,500,000	1,828,164,400	0	1,828,164,400	99.98	335,600
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,591,065,000	18,815,995,000	18,746,145,284	0	18,746,145,284	99.63	69,849,716
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-	0	3,383,745,000	3,137,039,305	0	3,137,039,305	92.71	246,705,695
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	104,212,000	66,805,000	66,708,100	0	66,708,100	99.85	96,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	16,695,277,000	22,266,545,000	21,949,892,689	0	21,949,892,689	98.58	316,652,311
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	770,000,000	650,242,000	647,958,745	0	647,958,745	99.65	2,283,255
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	18,462,154,000	8,944,855,000	8,879,431,025	0	8,879,431,025	99.27	65,423,975
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	19,232,154,000	9,595,097,000	9,527,389,770	0	9,527,389,770	99.29	67,707,230
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	3,271,115,000	2,588,979,000	2,086,161,500	0	2,086,161,500	80.58	502,817,500
536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	4,007,074,000	3,554,374,000	3,306,687,000	0	3,306,687,000	93.03	247,687,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	7,278,189,000	6,144,353,000	5,392,848,500	0	5,392,848,500	87.77	751,504,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	50,205,620,000	39,834,495,000	38,698,295,359	0	38,698,295,359	97.15	1,136,199,641
	JUMLAH BELANJA	647,288,849,000	701,558,963,000	596,403,758,186	1,078,014,570	595,325,743,616	85.01	106,233,219,384

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 20/04/21 4:04 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN							
3630	Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Operasional Pimpinan	1,783,640,000	961,990,000	940,379,827	706,005	939,673,822	97.68	22,316,178
3631	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Bkn	7,072,546,000	5,095,649,000	4,712,084,253	25,817,565	4,686,266,688	91.97	409,382,312
3632	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bkn	261,264,488,000	260,956,028,000	200,115,998,638	25,492,333	200,090,506,305	76.68	60,865,521,695
3633	Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bkn dan Kerjasama Antar Instansi dalam dan Luar Negeri	2,300,000,000	1,761,268,000	1,494,263,882	25,263,920	1,468,999,962	83.41	292,268,038
3634	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	37,144,722,000	36,519,194,000	35,088,427,106	0	35,088,427,106	96.08	1,430,766,894
3635	Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	1,609,283,000	1,223,737,000	1,131,613,968	18,431,352	1,113,182,616	90.97	110,554,384
3636	Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya Kantor Regional I S/D Xii Bkn	188,664,265,000	180,597,290,000	173,472,875,502	76,923,357	173,395,952,145	1439.01	7,201,337,855
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	499,838,944,000	487,115,156,000	416,955,643,176	172,634,532	416,783,008,644	85.597	70,332,147,356
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN							
3637	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	9,107,575,000	3,909,575,000	3,864,645,053	0	3,864,645,053	98.85	44,929,947
3638	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Regional I S/D Xii	31,941,550,000	19,815,102,000	19,755,973,817	0	19,755,973,817	1494.65	59,128,183
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 02	41,049,125,000	23,724,677,000	23,620,618,870	0	23,620,618,870	99.561	104,058,130
06	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara							
3639	Penyelenggaraan Pertimbangan Kepegawaian	1,000,000,000	807,002,000	800,003,510	10,956,590	789,046,920	97.78	17,955,080
3640	Perumusan Kebijakan di Bidang Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan	1,000,000,000	917,466,000	901,701,774	81,307,296	820,394,478	89.42	97,071,522
3641	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	1,120,000,000	883,396,000	870,471,577	360,000	870,111,577	98.5	13,284,423
3642	Perumusan Kebijakan di Bidang Jabatan Karier	4,000,000,000	2,072,627,000	2,016,681,534	0	2,016,681,534	97.3	55,945,466
3643	Penetapan Persetujuan dan Pertimbangan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Lainnya	1,050,000,000	817,910,000	788,723,561	475,000	788,248,561	96.37	29,661,439

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 20/04/21 4:04 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
3644	Perumusan Kebijakan di Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	2,600,000,000	1,916,206,000	1,839,482,997	0	1,839,482,997	96	76,723,003
3646	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian Pns I	2,500,000,000	1,857,050,000	1,788,217,513	0	1,788,217,513	96.29	68,832,487
3647	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian Pns II	2,500,000,000	1,794,200,000	1,711,199,962	0	1,711,199,962	95.37	83,000,038
3648	Pengembangan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Kepegawaian	12,610,566,000	12,381,454,000	12,142,091,932	0	12,142,091,932	98.07	239,362,068
3649	Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah I	1,442,973,000	1,023,934,000	960,504,541	456,000	960,048,541	93.76	63,885,459
3650	Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah II	1,433,097,000	1,019,752,000	927,825,225	0	927,825,225	90.99	91,926,775
3651	Pelaksanaan Wasdal dan Bimtek Bidang Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah III	974,465,000	691,027,000	547,679,655	612,500	547,067,155	79.17	143,959,845
3652	Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Kepegawaian	10,700,000,000	7,292,326,000	6,544,015,694	0	6,544,015,694	89.74	748,310,306
3653	Penetapan Sk dan Pertek Pensiun Pns dan Pejabat Negara Serta Janda/Dudanya	1,000,000,000	752,326,000	746,993,080	0	746,993,080	99.29	5,332,920
3654	Perencanaan Kepegawaian dan Formasi	2,700,000,000	391,328,000	333,479,904	664,000	332,815,904	85.05	58,512,096
3655	Perumusan Kebijakan di Bidang Rekrutment dan Kinerja Pegawai	750,000,000	74,893,743,000	48,308,693,032	123,579,241	48,185,113,791	64.34	26,708,629,209
3657	Penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian	825,000,000	537,412,000	483,064,162	0	483,064,162	89.89	54,347,838
3658	Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional I - Xii Bkn	24,539,319,000	55,346,223,000	52,391,894,322	171,655,736	52,220,238,586	1324.15	3,125,984,414
3659	Analisis/Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum	950,000,000	601,695,000	574,466,889	31,526,115	542,940,774	90.24	58,754,226
3660	Analisis/Evaluasi Implementasi Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil	4,500,000,000	2,795,954,000	2,660,479,740	0	2,660,479,740	95.15	135,474,260
3662	Pengkajian dan Penelitian Bidang Kepegawaian	700,000,000	502,655,000	474,379,070	0	474,379,070	94.37	28,275,930
3663	Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi Pns	5,525,000,000	4,252,458,000	3,649,031,864	470,592,390	3,178,439,474	74.74	1,074,018,526
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	11,843,445,000	6,938,582,000	4,971,100,059	13,195,170	4,957,904,889	71.45	1,980,677,111
5290	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kode Etik, dan Disiplin, Serta Pemberhentian	2,424,465,000	1,605,554,000	1,464,567,855	0	1,464,567,855	91.22	140,986,145
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	98,688,330,000	182,092,280,000	147,896,749,452	905,380,038	146,991,369,414	81.221	35,100,910,586

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 20/04/21 4:04 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	639,576,399,000	692,932,113,000	588,473,011,498	1,078,014,570	587,394,996,928	84.925	105,537,116,072
04	PNBP							
06	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara							
3655	Perumusan Kebijakan di Bidang Rekrutment dan Kinerja Pegawai	4,724,200,000	6,315,000,000	5,974,814,228	0	5,974,814,228	94.61	340,185,772
3663	Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi Pns	2,052,000,000	1,375,600,000	1,194,168,260	0	1,194,168,260	86.81	181,431,740
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	936,250,000	936,250,000	761,764,200	0	761,764,200	81.36	174,485,800
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	7,712,450,000	8,626,850,000	7,930,746,688	0	7,930,746,688	91.931	696,103,312
	JUMLAH BELANJA PNBP	7,712,450,000	8,626,850,000	7,930,746,688	0	7,930,746,688	91.931	696,103,312
	JUMLAH	647,288,849,000	701,558,963,000	596,403,758,186	1,078,014,570	595,325,743,616	85.01	106,233,219,384

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 20/04/21 4:51 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
088010100K	kanreg V BKN							
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	17,451,495,000	19,546,282,000	18,360,507,548	54,586,685	18,305,920,863	93.65	1,240,361,137
	JUMLAH BELANJA kanreg V BKN	17,451,495,000	19,546,282,000	18,360,507,548	54,586,685	18,305,920,863	93.93	1,240,361,137
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA							
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	389,364,020,000	437,925,516,000	345,050,150,286	816,240,307	344,233,909,979	78.61	93,691,606,021
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	389,364,020,000	437,925,516,000	345,050,150,286	816,240,307	344,233,909,979	78.79	93,691,606,021
088010200K	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT							
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	20,620,154,000	22,137,548,000	21,895,557,815	3,673,449	21,891,884,366	98.89	245,663,634
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	20,620,154,000	22,137,548,000	21,895,557,815	3,673,449	21,891,884,366	98.91	245,663,634
088010400K	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA							
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	21,859,148,000	23,384,185,000	22,995,455,118	25,869,661	22,969,585,457	98.23	414,599,543
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	21,859,148,000	23,384,185,000	22,995,455,118	25,869,661	22,969,585,457	98.34	414,599,543
088010500K	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR							
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	20,483,131,000	20,518,335,000	20,064,988,085	11,002,231	20,053,985,854	97.74	464,349,146
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	20,483,131,000	20,518,335,000	20,064,988,085	11,002,231	20,053,985,854	97.79	464,349,146
088010600K	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN Banda Aceh	13,652,734,000	9,674,452,000	9,090,397,739	2,110,459	9,088,287,280	93.94	586,164,720
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	13,652,734,000	9,674,452,000	9,090,397,739	2,110,459	9,088,287,280	93.96	586,164,720
088010700K	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA							
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	13,026,535,000	15,170,610,000	15,055,156,106	13,288,570	15,041,867,536	99.15	128,742,464
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	13,026,535,000	15,170,610,000	15,055,156,106	13,288,570	15,041,867,536	99.24	128,742,464
088010900K	BA(088) ES1(01) RIAU							
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	14,907,282,000	17,160,983,000	16,825,332,602	3,950,810	16,821,381,792	98.02	339,601,208
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) RIAU	14,907,282,000	17,160,983,000	16,825,332,602	3,950,810	16,821,381,792	98.04	339,601,208
088011100K	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	17,116,014,000	20,401,680,000	19,435,737,826	55,368,273	19,380,369,553	94.99	1,021,310,447
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	17,116,014,000	20,401,680,000	19,435,737,826	55,368,273	19,380,369,553	95.27	1,021,310,447
088011500K	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	15,203,911,000	18,853,754,000	17,157,864,858	13,324,321	17,144,540,537	90.93	1,709,213,463
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	15,203,911,000	18,853,754,000	17,157,864,858	13,324,321	17,144,540,537	91.01	1,709,213,463

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 20/04/21 4:51 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
088011700K 667896	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	14,934,812,000	15,743,225,000	15,284,694,783	4,743,112	15,279,951,671	97.06	463,273,329
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	14,934,812,000	15,743,225,000	15,284,694,783	4,743,112	15,279,951,671	97.09	463,273,329
088011900K 560635	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	27,098,908,000	24,800,087,000	23,372,044,737	9,579,204	23,362,465,533	94.2	1,437,621,467
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	27,098,908,000	24,800,087,000	23,372,044,737	9,579,204	23,362,465,533	94.24	1,437,621,467
088012200K 667882	BA(088) ES1(01) BALI KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	14,581,879,000	16,669,341,000	16,387,036,908	4,569,030	16,382,467,878	98.28	286,873,122
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) BALI	14,581,879,000	16,669,341,000	16,387,036,908	4,569,030	16,382,467,878	98.31	286,873,122
088012500K 622390	BA(088) ES1(01) PAPUA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	10,366,703,000	9,566,802,000	9,141,085,574	35,553,710	9,105,531,864	95.18	461,270,136
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA	10,366,703,000	9,566,802,000	9,141,085,574	35,553,710	9,105,531,864	95.55	461,270,136
088013300K 667652	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	9,718,723,000	8,962,779,000	8,574,662,866	728	8,574,662,138	95.67	388,116,862
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	9,718,723,000	8,962,779,000	8,574,662,866	728	8,574,662,138	95.67	388,116,862
null 020505	Kode UAPPAW Tidak Ada PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	26,903,400,000	21,043,384,000	17,713,085,335	24,154,020	17,688,931,315	84.06	3,354,452,685
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	26,903,400,000	21,043,384,000	17,713,085,335	24,154,020	17,688,931,315	84.17	3,354,452,685
	JUMLAH BELANJA 01	647,288,849,000	701,558,963,000	596,403,758,186	1,078,014,570	595,325,743,616	85.01	106233219384
	JUMLAH BELANJA	647,288,849,000	701,558,963,000	596,403,758,186	1,078,014,570	595,325,743,616	85.01	106,233,219,384

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 20/04/21 4:51 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,285,403,000	2,862,493,708	0	2,862,493,708	87.13	422,909,292
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	3,285,403,000	2,862,493,708	0	2,862,493,708	87.13	422,909,292
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,135,244,000	864,186,328	0	864,186,328	76.12	271,057,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	1,135,244,000	864,186,328	0	864,186,328	76.12	271,057,672
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,782,186,000	2,606,191,286	700	2,606,190,586	93.67	175,995,414
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	2,782,186,000	2,606,191,286	700	2,606,190,586	93.67	175,995,414
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,497,680,000	5,516,011,819	1,700,000	5,514,311,819	84.89	983,368,181
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	6,497,680,000	5,516,011,819	1,700,000	5,514,311,819	84.89	983,368,181
5231	Belanja Pemeliharaan							
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	180,300,000	159,636,310	0	159,636,310	88.54	20,663,690
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	180,300,000	159,636,310	0	159,636,310	88.54	20,663,690
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,745,700,000	1,622,332,613	0	1,622,332,613	92.93	123,367,387
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	1,745,700,000	1,622,332,613	0	1,622,332,613	92.93	123,367,387
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	15,626,513,000	13,630,852,064	1,700,700	13,629,151,364	87.23	1,997,361,636
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,383,745,000	3,137,039,305	0	3,137,039,305	92.71	246,705,695
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	3,383,745,000	3,137,039,305	0	3,137,039,305	92.71	246,705,695
5361	Belanja Modal Lainnya							
536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	3,384,745,000	3,137,039,305	0	3,137,039,305	92.68	247,705,695
	JUMLAH BELANJA	0	19,011,258,000	16,767,891,369	1,700,700	16,766,190,669	88.2	2,245,067,331

LAMPIRAN II

Neraca

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 19/04/2021 4:52 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,205,725	0	2,205,725	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,071,600	44,019,000	(39,947,400)	(90.75)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	19,259,312	6,650,000	12,609,312	189.61
Piutang Bukan Pajak	56,119,280	638,672,617	(582,553,337)	(91.21)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(3,816,428)	(339,476,299)	335,659,871	(98.88)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	52,302,852	299,196,318	(246,893,466)	(82.52)
Persediaan	11,732,536,375	9,231,603,900	2,500,932,475	27.09
JUMLAH ASET LANCAR	11,810,375,864	9,581,469,218	2,228,906,646	23.26
ASET TETAP				
Tanah	2,302,109,905,449	2,551,874,317,382	(249,764,411,933)	(9.79)
Peralatan dan Mesin	568,440,548,093	557,396,934,784	11,043,613,309	1.98
Gedung dan Bangunan	833,845,886,323	839,776,988,996	(5,931,102,673)	(0.71)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,986,611,820	21,187,821,770	1,798,790,050	8.49
Aset Tetap Lainnya	13,625,162,893	13,878,382,893	(253,220,000)	(1.82)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	224,384,887	168,744,037	55,640,850	32.97
AKUMULASI PENYUSUTAN	(595,293,645,979)	(529,214,206,460)	(66,079,439,519)	12.49
JUMLAH ASET TETAP	3,145,938,853,486	3,455,068,983,402	(309,130,129,916)	(8.95)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	150,148,317,195	182,079,955,859	(31,931,638,664)	(17.54)
Aset Lain-lain	45,898,772,635	9,691,419,774	36,207,352,861	373.60
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(187,335,085,735)	(182,401,733,389)	(4,933,352,346)	2.70
JUMLAH ASET LAINNYA	8,712,004,095	9,369,642,244	(657,638,149)	(7.02)
JUMLAH ASET	3,166,461,233,445	3,474,020,094,864	(307,558,861,419)	(8.85)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,537,404,551	1,544,968,188	(7,563,637)	(0.49)
Pendapatan Diterima Dimuka	533,658,360	339,543,666	194,114,694	57.17
Uang Muka dari KPPN	2,205,725	0	2,205,725	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,073,268,636	1,884,511,854	188,756,782	10.02
JUMLAH KEWAJIBAN	2,073,268,636	1,884,511,854	188,756,782	10.02
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,164,387,964,809	3,472,135,583,010	(307,747,618,201)	(8.86)
JUMLAH EKUITAS	3,164,387,964,809	3,472,135,583,010	(307,747,618,201)	(8.86)
JUMLAH EKUITAS	3,164,387,964,809	3,472,135,583,010	(307,747,618,201)	(8.86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,166,461,233,445	3,474,020,094,864	(307,558,861,419)	(8.85)

LAMPIRAN III

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 20/04/21 3:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,864,544,144	22,930,005,598	(10,065,461,454)	(43.896)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,864,544,144	22,930,005,598	(10,065,461,454)	(43.896)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	12,864,544,144	22,930,005,598	(10,065,461,454)	(43.896)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	298,270,216,854	332,657,688,878	(34,387,472,024)	(10.337)
Beban Persediaan	12,752,768,231	17,466,403,794	(4,713,635,563)	(26.987)
Beban Barang dan Jasa	144,778,343,415	109,506,720,738	35,271,622,677	32.21
Beban Pemeliharaan	29,009,747,490	30,723,604,413	(1,713,856,923)	(5.578)
Beban Perjalanan Dinas	69,392,561,983	58,278,233,022	11,114,328,961	19.071
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 20/04/21 3:11 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	86,129,054,609	87,090,158,645	(961,104,036)	(1.104)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,867,467)	25,814,023	(27,681,490)	(107.234)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	640,330,825,115	635,748,623,513	4,582,201,602	0.721
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(627,466,280,971)	(612,818,617,915)	(14,647,663,056)	2.39
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	571,698,250	61,854,612	509,843,638	824.261
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,054,945,850	401,441,298	653,504,552	162.79
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	483,247,600	339,586,686	143,660,914	42.305
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	694,764,477	5,113,886,284	(4,419,121,807)	(86.414)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,814,631,448	6,463,868,075	(4,649,236,627)	(71.927)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,119,866,971	1,349,981,791	(230,114,820)	(17.046)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,266,462,727	5,175,740,896	(3,909,278,169)	(75.531)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(626,199,818,244)	(607,642,877,019)	(18,556,941,225)	3.054
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(626,199,818,244)	(607,642,877,019)	(18,556,941,225)	3.054

LAMPIRAN IV

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 19/04/21 4:05 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,472,135,583,010	1,157,181,353,925	2,314,954,229,085	200.051
SURPLUS/DEFISIT-LO	(626,199,818,244)	(607,642,877,019)	(18,556,941,225)	3.054
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(262,932,055,793)	2,337,334,074,882	(2,600,266,130,675)	(111.24 9)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(8)	8	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	14,577,025,804	2,340,402,705,522	(2,325,825,679,718)	(99.377)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(277,332,936,789)	(3,068,630,632)	(274,264,306,157)	8,937.6 77
LAIN-LAIN	(176,144,808)	0	(176,144,808)	()
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	581,384,255,836	585,263,031,222	(3,878,775,386)	(0.663)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(307,747,618,201)	2,314,954,229,085	(2,622,701,847,286)	(113.29 4)
EKUITAS AKHIR	3,164,387,964,809	3,472,135,583,010	(307,747,618,201)	(8.863)

LAMPIRAN V

Neraca Percobaan

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,205,725	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,071,600	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	19,259,312	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	56,119,280	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	3,816,428
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,141,036,187	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	606,908,833	0
0.0	117114	Suku Cadang	10,534,227	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	53,156,848	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	920,900,280	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	2,302,109,905,449	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	568,440,548,093	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	833,845,886,323	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,124,321,000	0
0.0	134112	Irigasi	2,764,941,783	0
0.0	134113	Jaringan	4,097,349,037	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	11,837,310,298	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,787,852,595	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	224,384,887	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	487,381,520,102
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	86,233,191,460
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	13,720,743,348
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	456,651,725
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,998,359,149
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	5,503,180,195
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	149,913,158,345	0
0.0	162161	Lisensi	39,658,850	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	8,808,855,471	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	37,089,917,164	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	8,626,098,730
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	42,853

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	142,652,737,064
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	33,710,023
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	36,022,497,065
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	140,923,592
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,294,179,359
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	98,230,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,071,600
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	533,658,360
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,205,725
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	595,325,743,616
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,667,031,603	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,291,697,310	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,738,884,018
0.0	391111	Ekuitas	0	3,472,135,583,010
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	14,577,025,804
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	276,804,237,602	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	528,699,187	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	176,144,808	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	169,000,000
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	109,357,115
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	118,200,100
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	936,745,750
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	508,583,107
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	40,500,000
3.1	425151	Pengembalian Pendapatan Penggunaan Sarana dan	18,000,000	0
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	1,379,483,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	10,920,400,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	4,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,468,988
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	35,805,181
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	258,406,257
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	57,439,868
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	15,802,364
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	26,703,463
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,405,586
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,443,177,778
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	125,230,212,567	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	742,600
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,761,899	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	30,302
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	8,617,813,259	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,713,030

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,058,528,480	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	539,836
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,734,090,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	6,089,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,330,907,750	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	10,320,200
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	710,439,999	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	5,352,519,870	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	144,840
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	19,329,329,050	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	4,632,400
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	589,850,000	0
3.1	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	475,000
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,104,610,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	53,897,839
3.0	512211	Beban Uang Lembur	538,657,250	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	116,750,081,777	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	38,680,517,700	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	821,000
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	535,548,700	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,069,199,748	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,703,560,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	711,088,760	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	744,500
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	2,853,804,397	0
3.0	521211	Beban Bahan	12,013,542,195	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	10,194,885,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	4,587,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,509,335,280	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	864,186,328	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	13,970,493,163	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	36
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	474,302,419	0
3.1	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	359,500
3.0	522113	Beban Langganan Air	397,213,694	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	137,940,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,675,309,788	0
3.0	522141	Beban Sewa	43,290,130,738	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,664,494,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	5,675,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,464,123,272	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,516,011,819	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,700,000
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,206,070,243	0
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	159,636,310	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	483,642,280	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,130,969,481	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	10,967,850
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,155,754	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	4,983,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	131,977,800	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	578,183,523	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	56,632,542,365	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	897,768,905
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,412,124,115	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	54,018,032
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,780,329,500	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	1,422,500
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1,622,332,613	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,895,880,327	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	2,037,500
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	23,860,500	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	19,260,500
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46,726,737,129	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25,968,321,263	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5,811,637,991	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	104,137,050	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	83,935,951	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,928,848,212	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	7,142	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	5,247,046,787	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	21,325,685	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	208,982,051	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	28,075,348	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	10,298,125,109	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,258,877,093	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	17,219,856	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	224,165,944	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	2,230,477,178	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	951,528,796	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	0	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	1,867,467
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	66,543,950	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	483,247,600	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	168,338,175	0
JUMLAH			4,886,593,347,120	4,886,593,347,120

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	106,233,219,384	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	3,278,111,603	0
2.0	425151	Estimasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	75,000,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	1,156,920,000	0
2.0	425429	Estimasi Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10,157,000,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	142,900,142,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,822,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	10,616,191,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	2,713,626,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	8,411,013,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	9,850,007,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	916,115,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	6,597,733,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	24,351,397,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	591,774,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,789,245,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	1,080,958,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	151,436,546,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	39,263,159,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	543,670,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,192,253,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	3,737,550,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	952,543,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	3,285,403,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	14,666,413,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	12,041,150,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,587,547,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	1,135,244,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	14,660,657,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai	0	69,285,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	2,782,186,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	15,571,950,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	599,198,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	465,172,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	138,000,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	1,952,850,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	46,410,640,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	4,625,779,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	3,718,906,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,497,680,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	11,592,673,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	0	212,754,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	0	180,300,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	507,995,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	14,654,264,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	287,500,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	56,500,000
2.0	523132	Allotment Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	4,983,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	133,500,000
2.0	523136	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	592,634,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	75,619,904,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	5,927,994,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	7,449,386,000
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	1,745,700,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3,552,577,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	50,000,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan	0	1,828,500,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	18,815,995,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	3,383,745,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	66,805,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	650,242,000
2.0	533119	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	0	0
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	8,944,855,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	2,588,979,000
2.0	536118	Allotment Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi	0	1,000,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	3,554,374,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	118,200,100
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	936,745,750
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	702,697,801
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	40,500,000
3.1	425151	Pengembalian Pendapatan Penggunaan Sarana dan	18,000,000	0
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	1,379,483,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	10,920,400,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	4,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,468,988
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	184,098,426
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	292,086,257
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	57,439,868
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	15,802,364
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	26,703,463
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,405,586
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	125,253,363,170	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	742,600

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,762,315	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	30,302
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	8,618,933,158	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,713,030
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,058,773,596	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	539,836
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,715,590,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	6,089,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,323,163,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	10,320,200
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	706,586,685	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5,352,519,870	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	144,840
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	19,310,127,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	4,632,400
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	589,850,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	475,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,105,335,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	53,897,839
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	538,657,250	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	116,750,081,777	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	38,667,386,460	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	821,000
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	535,548,700	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,115,581,755	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,703,560,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	711,088,760	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	744,500
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	2,862,493,708	0
3.0	521211	Belanja Bahan	12,013,542,195	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,194,885,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	4,587,500
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,509,335,280	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	864,186,328	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,091,905,201	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	66,000
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	54,722,000	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	2,606,191,286	0
3.1	521841	Pengembalian Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	700
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	14,158,465,628	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	36
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	476,996,876	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021 3:12 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	359,500
3.0	522113	Belanja Langganan Air	398,460,473	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	137,940,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,675,309,788	0
3.0	522141	Belanja Sewa	43,158,791,593	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,664,494,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	5,675,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,464,123,272	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,516,011,819	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-	0	1,700,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,440,347,255	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	188,896,500	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	159,636,310	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	483,642,280	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,130,969,481	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	10,967,850
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	264,838,561	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,155,754	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	4,983,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	131,977,800	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	578,183,523	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	56,632,542,365	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	897,768,905
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,412,124,115	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	54,018,032
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,780,329,500	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	1,422,500
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1,622,332,613	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,895,880,327	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	2,037,500
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	23,860,500	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	19,260,500
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1,828,164,400	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,746,145,284	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	3,137,039,305	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	66,708,100	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	647,958,745	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	8,879,431,025	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	2,086,161,500	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	3,306,687,000	0
JUMLAH			717,322,009,173	717,322,009,173

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2020 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	44,019,000	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	6,650,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	332,721,672	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	305,950,945	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	33,525,354
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	305,950,945
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,191,135,592	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	498,691,609	0
0.0	117114	Suku Cadang	8,570,983	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	3,666,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	32,696,870	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	496,842,846	0
0.0	131111	Tanah	2,551,874,317,382	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	557,396,934,784	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	839,776,988,996	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	14,575,772,950	0
0.0	134112	Irigasi	2,514,699,783	0
0.0	134113	Jaringan	4,097,349,037	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	12,095,425,298	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,782,957,595	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,744,037	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	451,523,348,089
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	64,910,006,719
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	9,965,698,149
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	327,107,793
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,914,423,198
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	573,622,512
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	181,307,401,009	0
0.0	162161	Lisensi	386,854,850	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	385,200,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	9,663,605,624	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	27,814,150	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	9,651,144,899
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	35,711
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	172,675,634,691
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	47,103,938
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	27,814,150
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	116,864,512

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2020 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 20/04/2021

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,384,084,676
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	44,019,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	339,543,666
0.0	391111	Ekuitas	0	3,472,135,583,010
JUMLAH			4,185,975,511,012	4,185,975,511,012

LAMPIRAN VI

Laporan Realisasi Pendapatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 20/04/21 3:14 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	118,200,100	0	118,200,100	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	936,745,750	0	936,745,750	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	702,697,801	0	702,697,801	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	75,000,000	40,500,000	18,000,000	22,500,000	30
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,156,920,000	1,379,483,000	0	1,379,483,000	119.24
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	10,157,000,000	10,920,400,000	0	10,920,400,000	107.52
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	4,000,000	0	4,000,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,468,988	0	2,468,988	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	184,098,426	0	184,098,426	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	292,086,257	0	292,086,257	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	57,439,868	0	57,439,868	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	15,802,364	0	15,802,364	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	26,703,463	0	26,703,463	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,405,586	0	4,405,586	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	11,388,920,000	14,685,031,603	18,000,000	14,667,031,603	128.94
	JUMLAH PENDAPATAN	11,388,920,000	14,685,031,603	18,000,000	14,667,031,603	128.94

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 20/04/21 3:14 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
088010100K	kanreg V BKN					
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	0	228,121,320	0	228,121,320	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KD kanreg V BKN	0	228,121,320	0	228,121,320	
088010100K	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA					
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	10,157,000,000	12,610,445,677	0	12,610,445,677	124.16
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KP BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	10,157,000,000	12,610,445,677	0	12,610,445,677	124.16
088010200K	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT					
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	0	71,862,377	0	71,862,377	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010200KD BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	0	71,862,377	0	71,862,377	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
020505	PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	1,231,920,000	1,472,112,398	18,000,000	1,454,112,398	118.04
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	1,231,920,000	1,472,112,398	18,000,000	1,454,112,398	119.5
088010400K	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA					
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	0	99,995,690	0	99,995,690	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010400KD BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	0	99,995,690	0	99,995,690	
088010500K	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR					
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	0	4,686,600	0	4,686,600	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010500KD BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	0	4,686,600	0	4,686,600	
088010600K	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	0	2,944,350	0	2,944,350	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010600KD BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	2,944,350	0	2,944,350	
088010700K	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 20/04/21 3:14 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	0	19,544,282	0	19,544,282	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010700KD BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	0	19,544,282	0	19,544,282	
088010900K 667901	BA(088) ES1(01) RIAU KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	0	10,677,648	0	10,677,648	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010900KD BA(088) ES1(01) RIAU	0	10,677,648	0	10,677,648	
088011100K 622372	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	0	12,321,150	0	12,321,150	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011100KD BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	0	12,321,150	0	12,321,150	
088011500K 622386	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	0	8,003,479	0	8,003,479	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011500KD BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	0	8,003,479	0	8,003,479	
088011700K 667896	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	0	25,781,150	0	25,781,150	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011700KD BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	25,781,150	0	25,781,150	
088011900K 560635	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	0	10,071,946	0	10,071,946	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011900KD BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	10,071,946	0	10,071,946	
088012200K 667882	BA(088) ES1(01) BALI KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	0	48,471,498	0	48,471,498	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088012200KD BA(088) ES1(01) BALI	0	48,471,498	0	48,471,498	
088012500K 622390	BA(088) ES1(01) PAPUA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	0	59,992,038	0	59,992,038	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088012500KD BA(088) ES1(01) PAPUA	0	59,992,038	0	59,992,038	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 20/04/21 3:14 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	11,388,920,000	14,685,031,603	18,000,000	14,667,031,603	128.94
	JUMLAH PENDAPATAN	11,388,920,000	14,685,031,603	18,000,000	14,667,031,603	128.94

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 20/04/21 2:26 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	118,200,100	0	118,200,100	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	936,745,750	0	936,745,750	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	702,697,801	0	702,697,801	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	75,000,000	40,500,000	18,000,000	22,500,000	30
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	75,000,000	1,798,143,651	18,000,000	1,780,143,651	2,373.52
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,156,920,000	1,379,483,000	0	1,379,483,000	119.24
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	10,157,000,000	10,920,400,000	0	10,920,400,000	107.52
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	11,313,920,000	12,299,883,000	0	12,299,883,000	108.71
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	4,000,000	0	4,000,000	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,468,988	0	2,468,988	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	2,468,988	0	2,468,988	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	184,098,426	0	184,098,426	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	292,086,257	0	292,086,257	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	57,439,868	0	57,439,868	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	15,802,364	0	15,802,364	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	26,703,463	0	26,703,463	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,405,586	0	4,405,586	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 20/04/21 2:26 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	580,535,964	0	580,535,964	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	11,388,920,000	14,685,031,603	18,000,000	14,667,031,603	128.78
	JUMLAH PENDAPATAN	11,388,920,000	14,685,031,603	18,000,000	14,667,031,603	128.78

LAMPIRAN VII

Laporan Posisi BMN di Neraca

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN 2020

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 20/04/21 3:15 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	10,141,036,187
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	606,908,833
117114	Suku Cadang	10,534,227
117131	Bahan Baku	53,156,848
117199	Persediaan Lainnya	920,900,280
131111	Tanah	2,302,109,905,449
132111	Peralatan dan Mesin	568,440,548,093
133111	Gedung dan Bangunan	833,845,886,323
134111	Jalan dan Jembatan	16,124,321,000
134112	Irigasi	2,764,941,783
134113	Jaringan	4,097,349,037
135111	Aset Tetap Renovasi	11,837,310,298
135121	Aset Tetap Lainnya	1,787,852,595
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	224,384,887
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(487,381,520,102)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(86,233,191,460)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(13,720,743,348)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(456,651,725)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,998,359,149)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5,114,286,309)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	149,913,158,345
162161	Lisensi	39,658,850
162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,808,855,471
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	37,089,917,164
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(8,626,098,730)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(42,853)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(142,652,737,064)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(33,710,023)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(36,022,497,065)
J U M L A H		3,166,772,287,842

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2020 (SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2020

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 20/04/21 3:15 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_k

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	8,191,135,592
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	498,691,609
117114	Suku Cadang	8,570,983
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	3,666,000
117131	Bahan Baku	32,696,870
117199	Persediaan Lainnya	496,842,846
131111	Tanah	2,551,874,317,382
132111	Peralatan dan Mesin	557,396,934,784
133111	Gedung dan Bangunan	839,776,988,996
134111	Jalan dan Jembatan	14,575,772,950
134112	Irigasi	2,514,699,783
134113	Jaringan	4,097,349,037
135111	Aset Tetap Renovasi	12,095,425,298
135121	Aset Tetap Lainnya	1,782,957,595
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,744,037
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(451,523,348,089)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(64,910,006,719)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(9,965,698,149)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(327,107,793)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,914,423,198)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(573,622,512)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	181,307,401,009
162161	Lisensi	386,854,850
162171	Hasil Kajian/Penelitian	385,200,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	9,663,605,624
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	27,814,150
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(9,651,144,899)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(35,711)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(172,675,634,691)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(47,103,938)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(27,814,150)
J U M L A H		3,473,670,229,546

LAMPIRAN VIII

Laporan Barang Kuasa Pengguna

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 20/04/21 3:16 AM

Halaman : 1

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	525,786	2,551,874,317,382	0	6,872,081,067	25,943	256,636,493,000	499,843	2,302,109,905,449
20101	TANAH PERSIL	525,786	2,551,874,317,382	0	6,872,081,067	25,943	256,636,493,000	499,843	2,302,109,905,449
20102	TANAH NON PERSIL	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	63,127	557,396,934,784	1,632	25,053,338,992	1,871	14,009,725,683	62,888	568,440,548,093
30103	ALAT BANTU	166	33,397,385,106	1	44,860,000	1	14,860,000	166	33,427,385,106
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	216	33,762,963,200	25	6,698,000,000	21	2,458,588,000	220	38,002,375,200
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	89	158,475,250	1	2,655,000	6	7,680,000	84	153,450,250
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	17	5,007,490,335	1	5,170,000	0	0	18	5,012,660,335
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	35	109,626,600	0	0	0	0	35	109,626,600
30303	ALAT UKUR	6	11,549,050	0	0	0	0	6	11,549,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	5	195,772,500	2	4,034,800	0	0	7	199,807,300
30501	ALAT KANTOR	10,527	83,571,327,130	99	1,207,453,824	285	1,333,483,881	10,341	83,445,297,073
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,696	131,647,407,834	564	2,867,391,655	934	1,813,366,906	37,326	132,701,432,583
30601	ALAT STUDIO	873	25,444,165,046	143	789,656,190	68	698,371,016	948	25,535,450,220
30602	ALAT KOMUNIKASI	710	5,118,593,243	7	65,319,000	8	21,072,700	709	5,162,839,543
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	0	0	0	0	12	1,440,181,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	276	657,931,440	67	153,714,650	2	2,050,000	341	809,596,090
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	8	20,907,750	0	0	0	0	8	20,907,750
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	96	5,687,284,494	1	1,856,000	0	0	97	5,689,140,494
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	1	18,616,500	0	0	1	18,616,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	3,245,000	4	14,960,000	0	0	5	18,205,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	7,049	86,114,441,900	423	4,160,462,525	313	3,787,180,736	7,159	86,487,723,689
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,299	144,336,554,303	186	5,017,780,748	176	2,036,522,444	5,309	147,317,812,607
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	ALAT SAR	1	6,710,000	106	3,992,909,500	50	1,829,900,000	57	2,169,719,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	15	510,099,810	1	8,498,600	7	6,650,000	9	511,948,410
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	24	140,065,000	0	0	0	0	24	140,065,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	6	54,758,000	0	0	0	0	6	54,758,000
133111	Gedung dan Bangunan	469	839,776,988,996	15	25,541,130,556	24	31,472,233,229	460	833,845,886,323

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 20/04/21 3:16 AM

Halaman : 2

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	156	731,395,377,867	13	21,972,707,895	19	29,303,901,269	150	724,064,184,493
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	291	97,518,711,500	0	1,805,607,324	5	2,168,331,960	286	97,155,986,864
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	0	0	0	0	1	45,569,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	21	10,817,330,629	2	1,762,815,337	0	0	23	12,580,145,966
134111	Jalan dan Jembatan	45,544	14,575,772,950	7,883	2,168,491,000	1	619,942,950	53,426	16,124,321,000
50101	JALAN	45,543	14,495,868,000	7,874	2,167,411,000	1	541,118,000	53,416	16,122,161,000
50102	JEMBATAN	1	79,904,950	9	1,080,000	0	78,824,950	10	2,160,000
134112	Irigasi	26	2,514,699,783	1	280,405,000	0	30,163,000	27	2,764,941,783
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	10	1,288,500,683	1	270,299,000	0	17,005,000	11	1,541,794,683
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	443,766,000	0	10,106,000	0	13,158,000	4	440,714,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	31	4,097,349,037	0	0	0	0	31	4,097,349,037
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	613,242,000	0	0	0	0	3	613,242,000
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	0	0	7	951,173,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	32	12,095,425,298	14	7,181,972,132	18	7,440,087,132	28	11,837,310,298
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	28	11,832,522,398	11	6,923,067,732	15	7,181,182,732	24	11,574,407,398
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258,904,400	3	258,904,400	3	258,904,400	3	258,904,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	11,962	1,782,957,595	1	4,895,000	0	0	11,963	1,787,852,595
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,725	971,547,595	0	0	0	0	11,725	971,547,595
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	209	669,310,000	1	4,895,000	0	0	210	674,205,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	25	40,600,000	0	0	0	0	25	40,600,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	2	80,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	129	9,663,605,624	1,644	11,232,330,530	736	12,087,080,683	1,037	8,808,855,471
30103	ALAT BANTU	7	6,961,438,897	0	0	7	6,961,438,897	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5	463,000,000	21	2,458,588,000	18	1,960,388,000	8	961,200,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 20/04/21 3:16 AM

Halaman : 3

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	6	7,680,000	0	0	6	7,680,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	19	172,381,700	273	1,137,394,481	202	969,490,200	90	340,285,981
30502	ALAT RUMAH TANGGA	40	128,137,580	877	1,605,802,406	416	566,615,945	501	1,167,324,041
30601	ALAT STUDIO	6	191,631,255	18	573,671,016	9	49,451,424	15	715,850,847
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	454,737,800	8	21,072,700	0	0	9	475,810,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	2	2,050,000	0	0	2	2,050,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	0	0	0	0	3	436,185,894
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	28	432,387,390	255	3,407,423,736	67	1,100,609,878	216	2,739,201,248
31002	PERALATAN KOMPUTER	20	423,705,108	173	1,819,766,191	17	479,086,339	176	1,764,384,960
31503	ALAT SAR	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	7	6,650,000	0	0	7	6,650,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	4	192,232,000	0	0	4	192,232,000
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3,993,778,051,449		78,334,644,277		322,295,725,677		3,749,816,970,049

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tanggal : 20/04/21 2:29 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2020						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	62,888	568,440,548,093	451,523,348,089	46,726,737,129	(10,868,565,116)	487,381,520,102	81,059,027,991
30103	ALAT BANTU	166	33,427,385,106	21,146,739,067	2,711,009,997	0	23,857,749,064	9,569,636,042
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	220	38,002,375,200	26,529,102,891	2,904,643,729	(2,458,588,000)	26,975,158,620	11,027,216,580
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	84	153,450,250	151,067,089	6,193,775	(7,680,000)	149,580,864	3,869,386
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	18	5,012,660,335	4,519,753,525	80,633,625	0	4,600,387,150	412,273,185
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	35	109,626,600	78,065,280	17,473,480	0	95,538,760	14,087,840
30303	ALAT UKUR	6	11,549,050	9,533,010	1,217,360	0	10,750,370	798,680
30401	ALAT PENGOLAHAN	7	199,807,300	195,772,500	504,350	0	196,276,850	3,530,450
30501	ALAT KANTOR	10,341	83,445,297,073	74,515,978,018	4,024,397,275	(1,120,754,781)	77,419,620,512	6,025,676,561
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,326	132,701,432,583	115,621,142,696	7,217,732,973	(1,593,607,844)	121,245,267,825	11,456,164,758
30601	ALAT STUDIO	948	25,535,450,220	19,937,327,791	2,597,700,670	(571,306,016)	21,963,722,445	3,571,727,775
30602	ALAT KOMUNIKASI	709	5,162,839,543	4,475,953,514	274,685,471	(20,147,600)	4,730,491,385	432,348,158
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	540,566,980	144,026,390	0	684,593,370	755,588,423
30701	ALAT KEDOKTERAN	341	809,596,090	538,890,228	68,906,435	(2,050,000)	605,746,663	203,849,427
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	8	20,907,750	11,503,325	3,279,550	0	14,782,875	6,124,875
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	97	5,689,140,494	4,383,750,807	395,760,905	0	4,779,511,712	909,628,782
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	620,550	0	620,550	17,995,950
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	5	18,205,000	231,786	1,532,144	0	1,763,930	16,441,070
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	7,159	86,487,723,689	68,617,332,912	8,410,010,139	(3,477,462,612)	73,549,880,439	12,937,843,250
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,309	147,317,812,607	109,667,439,106	17,256,098,178	(1,610,318,263)	125,313,219,021	22,004,593,586
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	3,355,000	544,107,376	0	547,462,376	1,622,257,124
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	511,948,410	391,401,720	63,649,890	(6,650,000)	448,401,610	63,546,800
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	24	140,065,000	133,682,844	2,552,867	0	136,235,711	3,829,289
31901	PERALATAN OLAH RAGA	6	54,758,000	54,758,000	0	0	54,758,000	0
133111	Gedung dan Bangunan	460	833,845,886,323	64,910,006,719	25,500,764,948	(4,177,580,207)	86,233,191,460	747,612,694,863
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	150	724,064,184,493	57,731,468,520	22,221,091,900	(4,058,179,356)	75,894,381,064	648,169,803,429
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	286	97,155,986,864	6,678,448,565	2,878,600,071	(174,249,176)	9,382,799,460	87,773,187,404
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	2,003,032	1,001,516	0	3,004,548	42,564,452
40401	TUGU/TANDA BATAS	23	12,580,145,966	498,086,602	400,071,461	54,848,325	953,006,388	11,627,139,578

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tanggal : 20/04/21 2:29 PM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2020						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
134111	Jalan dan Jembatan	53,426	16,124,321,000	9,965,698,149	5,784,582,091	(2,029,536,892)	13,720,743,348	2,403,577,652
50101	JALAN	53,416	16,122,161,000	9,944,123,812	5,784,526,707	(2,008,101,015)	13,720,549,504	2,401,611,496
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	21,574,337	55,384	(21,435,877)	193,844	1,966,156
134112	Irigasi	27	2,764,941,783	327,107,793	104,137,050	25,406,882	456,651,725	2,308,290,058
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	10,273,417	5,587,530	0	15,860,947	241,215,653
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	9,661,710	3,864,684	0	13,526,394	145,493,606
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	16,428,500	3,285,700	1,642,850	0	4,928,550	11,499,950
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,541,794,683	236,976,960	66,119,223	25,009,982	328,106,165	1,213,688,518
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	37,934,790	15,332,676	396,900	53,664,366	387,049,634
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	28,975,216	11,590,087	0	40,565,303	309,342,697
134113	Jaringan	31	4,097,349,037	1,914,423,198	83,935,951	0	1,998,359,149	2,098,989,888
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	158,801,161	11,185,751	0	169,986,912	165,585,588
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	613,242,000	120,110,800	15,331,050	0	135,441,850	477,800,150
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	951,173,820	0	0	951,173,820	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	46,728,310	3,461,357	0	50,189,667	53,651,033
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	604,481,015	50,718,211	0	655,199,226	1,373,529,141
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	33,128,092	3,239,582	0	36,367,674	28,423,976
135111	Aset Tetap Renovasi	28	11,837,310,298	543,822,512	1,842,427,348	2,698,236,449	5,084,486,309	6,752,823,989
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	999,625	1,999,250	0	2,998,875	999,625
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	24	11,574,407,398	542,822,887	1,806,581,618	2,591,641,209	4,941,045,714	6,633,361,684
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258,904,400	0	33,846,480	106,595,240	140,441,720	118,462,680
135121	Aset Tetap Lainnya	25	40,600,000	29,800,000	0	0	29,800,000	10,800,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	25	40,600,000	29,800,000	0	0	29,800,000	10,800,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,037	8,808,855,471	9,651,144,899	16,846,573	(1,041,892,742)	8,626,098,730	182,756,741
30103	ALAT BANTU	0	0	6,961,438,897	0	(6,961,438,897)	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	961,200,000	463,000,000	0	498,200,000	961,200,000	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	6	7,680,000	0	0	7,680,000	7,680,000	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	90	340,285,981	172,381,700	(7,311,700)	175,215,981	340,285,981	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	501	1,167,324,041	126,984,355	5,980,987	1,029,568,799	1,162,534,141	4,789,900
30601	ALAT STUDIO	15	715,850,847	191,631,255	(473,000)	524,692,592	715,850,847	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	9	475,810,500	454,737,800	925,100	20,147,600	475,810,500	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	2,050,000	0	0	2,050,000	2,050,000	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	424,878,394	11,307,500	0	436,185,894	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tanggal : 20/04/21 2:29 PM
 Halaman : 3
 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2020						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	216	2,739,201,248	432,387,390	2,223,874	2,297,135,109	2,731,746,373	7,454,875
31002	PERALATAN KOMPUTER	176	1,764,384,960	423,705,108	1,090,950	1,339,588,902	1,764,384,960	0
31503	ALAT SAR	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	6,650,000	0	0	6,650,000	6,650,000	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	192,232,000	0	3,102,862	18,617,172	21,720,034	170,511,966
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		117,922	1,445,959,812,005	538,865,351,359	80,059,431,090	(15,393,931,626)	603,530,850,823	842,428,961,182

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 20/04/21 3:17 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	95,227	2,242,459,509	267	175,271,455	90,075	685,574,775	5,419	1,732,156,189
30103	ALAT BANTU	5	4,032,000	0	0	0	0	5	4,032,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	2,324,920	1	700,000	0	0	4	3,024,920
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	3,173,800	0	0	0	0	5	3,173,800
30303	ALAT UKUR	0	0	5	1,540,000	0	0	5	1,540,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	90,136	701,604,600	0	0	90,000	666,000,000	136	35,604,600
30502	ALAT RUMAH TANGGA	3,653	1,321,804,589	184	119,271,455	75	19,574,775	3,762	1,421,501,269
30601	ALAT STUDIO	11	4,781,000	25	24,612,500	0	0	36	29,393,500
30602	ALAT KOMUNIKASI	284	72,243,320	19	4,678,000	0	0	303	76,921,320
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	197	13,167,080	5	2,861,000	0	0	202	16,028,080
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	0	0	0	0	5	1,973,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	472,000	6	4,722,000	0	0	8	5,194,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	30	825,000	0	0	0	0	30	825,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	894	103,157,800	22	16,886,500	0	0	916	120,044,300
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	12,900,000	0	0	0	0	2	12,900,000
133111	Gedung dan Bangunan	4	5,850,000	0	0	0	0	4	5,850,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	0	0	0	0	4	5,850,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	75	19,574,775	0	0	75	19,574,775
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	75	19,574,775	0	0	75	19,574,775
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2,248,309,509		194,846,230		685,574,775		1,757,580,964

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tanggal : 20/04/21 2:29 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kl

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2020						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	5,419	1,732,156,189	1,557,511,828	218,717,795	(685,016,775)	1,091,212,848	640,943,341
30103	ALAT BANTU	5	4,032,000	813,500	576,000	0	1,389,500	2,642,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	3,024,920	2,048,980	487,970	0	2,536,950	487,970
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	3,173,800	1,404,820	634,760	0	2,039,580	1,134,220
30303	ALAT UKUR	5	1,540,000	0	154,000	0	154,000	1,386,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	136	35,604,600	695,305,950	1,802,300	(666,000,000)	31,108,250	4,496,350
30502	ALAT RUMAH TANGGA	3,762	1,421,501,269	710,448,464	184,235,499	(19,241,775)	875,442,188	546,059,081
30601	ALAT STUDIO	36	29,393,500	1,976,850	3,249,450	0	5,226,300	24,167,200
30602	ALAT KOMUNIKASI	303	76,921,320	57,472,132	7,381,256	0	64,853,388	12,067,932
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	202	16,028,080	10,125,782	1,170,520	0	11,296,302	4,731,778
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	679,800	369,600	0	1,049,400	924,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	5,194,000	416,500	522,626	0	939,126	4,254,874
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	30	825,000	825,000	0	0	825,000	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	916	120,044,300	63,094,050	18,133,814	225,000	81,452,864	38,591,436
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	12,900,000	12,900,000	0	0	12,900,000	0
133111	Gedung dan Bangunan	4	5,850,000	679,500	117,000	0	796,500	5,053,500
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	679,500	117,000	0	796,500	5,053,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	75	19,574,775	0	0	19,574,775	19,574,775	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	75	19,574,775	0	0	19,574,775	19,574,775	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		5,498	1,757,580,964	1,558,191,328	218,834,795	(665,442,000)	1,111,584,123	645,996,841

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 20/04/21 3:17 AM

Halaman : 1

Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	525,786	2,551,874,317,382	0	6,872,081,067	25,943	256,636,493,000	499,843	2,302,109,905,449
20101	TANAH PERSIL	525,786	2,551,874,317,382	0	6,872,081,067	25,943	256,636,493,000	499,843	2,302,109,905,449
20102	TANAH NON PERSIL	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	158,354	559,639,394,293	1,899	25,228,610,447	91,946	14,695,300,458	68,307	570,172,704,282
30103	ALAT BANTU	171	33,401,417,106	1	44,860,000	1	14,860,000	171	33,431,417,106
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	216	33,762,963,200	25	6,698,000,000	21	2,458,588,000	220	38,002,375,200
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	92	160,800,170	2	3,355,000	6	7,680,000	88	156,475,170
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	17	5,007,490,335	1	5,170,000	0	0	18	5,012,660,335
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	40	112,800,400	0	0	0	0	40	112,800,400
30303	ALAT UKUR	6	11,549,050	5	1,540,000	0	0	11	13,089,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	5	195,772,500	2	4,034,800	0	0	7	199,807,300
30501	ALAT KANTOR	100,663	84,272,931,730	99	1,207,453,824	90,285	1,999,483,881	10,477	83,480,901,673
30502	ALAT RUMAH TANGGA	41,349	132,969,212,423	748	2,986,663,110	1,009	1,832,941,681	41,088	134,122,933,852
30601	ALAT STUDIO	884	25,448,946,046	168	814,268,690	68	698,371,016	984	25,564,843,720
30602	ALAT KOMUNIKASI	994	5,190,836,563	26	69,997,000	8	21,072,700	1,012	5,239,760,863
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	0	0	0	0	12	1,440,181,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	473	671,098,520	72	156,575,650	2	2,050,000	543	825,624,170
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	13	22,881,150	0	0	0	0	13	22,881,150
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	98	5,687,756,494	7	6,578,000	0	0	105	5,694,334,494
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	1	18,616,500	0	0	1	18,616,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	3,245,000	4	14,960,000	0	0	5	18,205,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	30	825,000	0	0	0	0	30	825,000
30902	Persenjataan NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	7,049	86,114,441,900	423	4,160,462,525	313	3,787,180,736	7,159	86,487,723,689
31002	PERALATAN KOMPUTER	6,193	144,439,712,103	208	5,034,667,248	176	2,036,522,444	6,225	147,437,856,907
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	ALAT SAR	1	6,710,000	106	3,992,909,500	50	1,829,900,000	57	2,169,719,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	15	510,099,810	1	8,498,600	7	6,650,000	9	511,948,410
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	26	152,965,000	0	0	0	0	26	152,965,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	6	54,758,000	0	0	0	0	6	54,758,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 20/04/21 3:17 AM

Halaman : 2

Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133111	Gedung dan Bangunan	473	839,782,838,996	15	25,541,130,556	24	31,472,233,229	464	833,851,736,323
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	156	731,395,377,867	13	21,972,707,895	19	29,303,901,269	150	724,064,184,493
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	291	97,518,711,500	0	1,805,607,324	5	2,168,331,960	286	97,155,986,864
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	51,419,000	0	0	0	0	5	51,419,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	21	10,817,330,629	2	1,762,815,337	0	0	23	12,580,145,966
134111	Jalan dan Jembatan	45,544	14,575,772,950	7,883	2,168,491,000	1	619,942,950	53,426	16,124,321,000
50101	JALAN	45,543	14,495,868,000	7,874	2,167,411,000	1	541,118,000	53,416	16,122,161,000
50102	JEMBATAN	1	79,904,950	9	1,080,000	0	78,824,950	10	2,160,000
134112	Irigasi	26	2,514,699,783	1	280,405,000	0	30,163,000	27	2,764,941,783
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	10	1,288,500,683	1	270,299,000	0	17,005,000	11	1,541,794,683
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	443,766,000	0	10,106,000	0	13,158,000	4	440,714,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	31	4,097,349,037	0	0	0	0	31	4,097,349,037
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	613,242,000	0	0	0	0	3	613,242,000
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	0	0	7	951,173,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	32	12,095,425,298	14	7,181,972,132	18	7,440,087,132	28	11,837,310,298
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	0	0	0	0	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	28	11,832,522,398	11	6,923,067,732	15	7,181,182,732	24	11,574,407,398
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258,904,400	3	258,904,400	3	258,904,400	3	258,904,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	11,962	1,782,957,595	1	4,895,000	0	0	11,963	1,787,852,595
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,725	971,547,595	0	0	0	0	11,725	971,547,595
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	209	669,310,000	1	4,895,000	0	0	210	674,205,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	25	40,600,000	0	0	0	0	25	40,600,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	2	80,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	129	9,663,605,624	1,719	11,251,905,305	736	12,087,080,683	1,112	8,828,430,246
30103	ALAT BANTU	7	6,961,438,897	0	0	7	6,961,438,897	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 20/04/21 3:17 AM

Halaman : 3

Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5	463,000,000	21	2,458,588,000	18	1,960,388,000	8	961,200,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	6	7,680,000	0	0	6	7,680,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	19	172,381,700	273	1,137,394,481	202	969,490,200	90	340,285,981
30502	ALAT RUMAH TANGGA	40	128,137,580	952	1,625,377,181	416	566,615,945	576	1,186,898,816
30601	ALAT STUDIO	6	191,631,255	18	573,671,016	9	49,451,424	15	715,850,847
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	454,737,800	8	21,072,700	0	0	9	475,810,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	2	2,050,000	0	0	2	2,050,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	0	0	0	0	3	436,185,894
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	Persenjataan NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	28	432,387,390	255	3,407,423,736	67	1,100,609,878	216	2,739,201,248
31002	PERALATAN KOMPUTER	20	423,705,108	173	1,819,766,191	17	479,086,339	176	1,764,384,960
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	ALAT SAR	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	7	6,650,000	0	0	7	6,650,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	4	192,232,000	0	0	4	192,232,000
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3,996,026,360,958	78,529,490,507		322,981,300,452		3,751,574,551,013	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 22/04/21 12:37 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_kdp_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2020	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2020	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	168,744,037	7,453,837,377	7,398,196,527	224,384,887	
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	0	98,230,000	0	98,230,000	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	168,744,037	7,355,607,377	7,398,196,527	126,154,887	
7010101004	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101005	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	97,295,000	97,295,000	0	
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian	0	97,295,000	97,295,000	0	
TOTAL		168,744,037	7,551,132,377	7,495,491,527	224,384,887	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 22/04/21 12:42 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2020
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	4	5	6	7

LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
(BPYBDS)
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 22/04/21 12:42 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_bpybds_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN BARANG PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 22/04/21 12:41 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162121	Hak Cipta	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
162151	Software	378	181,307,401,009	12	5,699,079,500	85	37,093,322,164	305	149,913,158,345
80101	ASET TAK BERWUJUD	378	181,307,401,009	12	5,699,079,500	85	37,093,322,164	305	149,913,158,345
162161	Lisensi	2	386,854,850	0	0	1	347,196,000	1	39,658,850
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	386,854,850	0	0	1	347,196,000	1	39,658,850
162171	Hasil Kajian/Penelitian	2	385,200,000	0	0	1	190,200,000	1	195,000,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	385,200,000	0	0	1	190,200,000	1	195,000,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	102	27,814,150	34	37,089,917,164	102	27,814,150	34	37,089,917,164
80101	ASET TAK BERWUJUD	102	27,814,150	34	37,089,917,164	102	27,814,150	34	37,089,917,164
TOTAL			182,107,770,009		37,658,532,314		42,788,996,664		187,238,234,359

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tanggal : 22/04/21 11:54 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2020						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162121	Hak Cipta	1	500,000	35,711	7,142	0	42,853	457,147
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	35,711	7,142	0	42,853	457,147
162151	Software	305	149,913,158,345	172,675,634,691	5,247,046,787	(35,269,944,414)	142,652,737,064	7,260,421,281
80101	ASET TAK BERWUJUD	305	149,913,158,345	172,675,634,691	5,247,046,787	(35,269,944,414)	142,652,737,064	7,260,421,281
162161	Lisensi	1	39,658,850	47,103,938	21,325,685	(34,719,600)	33,710,023	5,948,827
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	39,658,850	47,103,938	21,325,685	(34,719,600)	33,710,023	5,948,827
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	33	36,899,717,164	27,814,150	208,982,051	35,785,700,864	36,022,497,065	877,220,099
80101	ASET TAK BERWUJUD	33	36,899,717,164	27,814,150	208,982,051	35,785,700,864	36,022,497,065	877,220,099
JUMLAH		340	186,853,034,359	172,750,588,490	5,477,361,665	481,036,850	178,708,987,005	8,144,047,354

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 22/04/21 12:43 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dhdktp_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 22/04/21 11:55 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dbrb_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	(55)	4,199,021,038	0	0	0	0	(55)	4,199,021,038
30103	ALAT BANTU	0	4,774,000	0	0	0	0	0	4,774,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	872,450,000	0	0	0	0	1	872,450,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	8,164,000	0	0	0	0	0	8,164,000
30501	ALAT KANTOR	(13)	400,615,100	0	0	0	0	(13)	400,615,100
30502	ALAT RUMAH TANGGA	(7)	526,136,800	0	0	0	0	(7)	526,136,800
30601	ALAT STUDIO	(7)	374,071,200	0	0	0	0	(7)	374,071,200
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	39,140,000	0	0	0	0	0	39,140,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	3,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	(1)	95,385,000	0	0	0	0	(1)	95,385,000
31001	KOMPUTER UNIT	(18)	1,298,951,760	0	0	0	0	(18)	1,298,951,760
31002	PERALATAN KOMPUTER	(10)	575,933,178	0	0	0	0	(10)	575,933,178
TOTAL			4,199,021,038		0		0		4,199,021,038

LAPORAN BARANG HILANG
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Tanggal : 22/04/21 11:55 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dbh_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	3	51,167,307	1	13,500,000	1	24,167,307	3	40,500,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	27,000,000	1	13,500,000	0	0	3	40,500,000
31001	KOMPUTER UNIT	1	24,167,307	0	0	1	24,167,307	0	0
TOTAL			51,167,307		13,500,000		24,167,307		40,500,000

LAMPIRAN IX

Laporan Persediaan

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 20/04/21 2:30 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_kl_kel

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	10,141,036,187
Jumlah Barang Konsumsi		10,141,036,187
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	606,908,833
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		606,908,833
117114	Suku Cadang	
10102	SUKU CADANG	10,534,227
Jumlah Suku Cadang		10,534,227
117131	Bahan Baku	
10101	BAHAN	53,156,848
Jumlah Bahan Baku		53,156,848
117199	Persediaan Lainnya	
10104	OBAT-OBATAN	918,919,080
10201	KOMPONEN	1,981,200
Jumlah Persediaan Lainnya		920,900,280
Jumlah		11,732,536,375

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 20/04/21 2:31 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	277,866,395
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	26,157,007
1010301003	Penjepit Kertas	267,694,043
1010301004	Penghapus/Korektor	24,601,695
1010301005	Buku Tulis	75,553,279
1010301006	Ordner Dan Map	411,288,983
1010301007	Penggaris	10,039,326
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	23,787,173
1010301009	Pita Mesin Ketik	24,767,280
1010301010	Alat Perekat	78,306,009
1010301011	Stadler HD	1,121,925
1010301012	Staples	224,400
1010301013	Isi Staples	997,700
1010301014	Barang Cetak	579,504,630
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,044,942,842
1010302001	Kertas HVS	535,591,483
1010302002	Berbagai Kertas	112,686,622
1010302003	Kertas Cover	35,176,280
1010302004	Amplop	531,881,850
1010302005	Kop Surat	9,056,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	461,320,080
1010303001	Transparant Sheet	535,000
1010303002	Tinta Cetak	50,707,000
1010303003	Plat Cetak	125,000
1010303004	Stensil Sheet	2,812,500
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	2,001,468,550
1010304001	Continuous Form	9,393,800
1010304002	Computer File/Tempat Disket	77,000
1010304003	Pita Printer	40,621,200
1010304004	Tinta/Toner Printer	2,850,477,683
1010304005	Disket	1,765,500
1010304006	USB/Flash Disk	45,026,427
1010304007	kartu Memori	2,520,540
1010304010	Mouse	1,980,700
1010304011	CD/DVD	22,587,300
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	95,856,036
1010306001	Kabel Listrik	23,201,860
1010306002	Lampu Listrik	87,946,190
1010306003	Stop Kontak	8,234,500
1010306004	Saklar	8,580,530
1010306005	Stacker	995,000
1010306006	Balast	4,625,000
1010306007	Starter	2,061,400
1010306008	Vitting	723,500
1010306010	Batu Baterai	59,136,457

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 20/04/21 2:31 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
1010306999	Alat Listrik Lainnya	34,297,030
1010307999	Perlengkapan Dinas Lainnya	66,000
1010309001	Meterai	9,687,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	55,253,400
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	451,700
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	160,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	4,688,378
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	75,168,364
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	21,300
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	75,748,150
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31,471,190
Jumlah Barang Konsumsi		10,141,036,187
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	13,111,480
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	26,670,550
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	9,085,590
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	12,674,290
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	92,089,520
1010305006	Alat Pengikat	14,026,675
1010305007	Peralatan Ledeng	3,312,500
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	108,659,900
1010305012	Pengharum Ruangan	20,170,829
1010305013	Kuas	88,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	307,019,499
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		606,908,833
117114	Suku Cadang	
1010201001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	2,316,000
1010203001	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum	1,486,202
1010203999	Suku Cadang Alat Kedokteran Lainnya	59,675
1010204058	Suku Cadang Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	3,686,000
1010204999	Suku Cadang Alat Laboratorium Lainnya	136,000
1010206001	Suku Cadang Alat Studio	2,639,250
1010206002	Suku Cadang Alat Komunikasi	211,100
Jumlah Suku Cadang		10,534,227
117131	Bahan Baku	
1010102001	Bahan Kimia Padat	200,200
1010102002	Bahan Kimia Cair	10,462,768
1010102999	Bahan Kimia Lainnya	1,689,380
1010104001	Bahan Bakar Minyak (Bahan Baku)	36,820,500
1010104002	Minyak Pelumas (Bahan Baku)	2,340,000
1010105001	Kawat	744,000
1010199999	Bahan Lainnya	900,000
Jumlah Bahan Baku		53,156,848
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)	217,869,704

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 20/04/21 2:31 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
1010401002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)	442,178,499
1010401003	Obat Gas(Persediaan Lainnya)	495,000
1010401004	Obat Serbuk/Tepung(Persediaan Lainnya)	293,168
1010401005	Obat Gel/Salep(Persediaan Lainnya)	23,616,180
1010401006	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)	251,619
1010401999	Obat Lainnya(Persediaan Lainnya)	234,214,910
1020103999	Komponen Peralatan Lainnya	1,981,200
Jumlah Persediaan Lainnya		920,900,280
TOTAL		11,732,536,375

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAMPIRAN X

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP.187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015 tentang perubahan kelima Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

14. Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
15. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 11 tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKN adalah tersusunnya sistem (norma, standar, dan prosedur) manajemen kepegawaian secara nasional. Sedangkan hasil (*outcome*) yang hendak dicapai oleh BKN adalah “Terwujudnya Sistem Manajemen Kepegawaian Secara Nasional”. *Outcome* tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan manajemen kepegawaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan dari seluruh unit/satuan kerja BKN.

C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Badan Kepegawaian Negara Periode Tahun Anggaran 2020.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kebijakan Penatausahaan atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak

kepemilikan berpindah.

➤ Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar:

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ✓ Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap:

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang:

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah TPA dan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya:

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2. Kebijakan Akuntansi atas Penyusunan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 1. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)	4 tahun

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh BKN.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun 2020 ini adalah sebesar Rp3.950.769.706.634,00 (*Tiga triliun sembilan ratus lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp4.187.534.478.904,00 (*Empat triliun seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah*), dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun 2020 Audited sebesar Rp236.764.772.270,00 (*Minus dua ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 16 Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas satu satker Kantor Pusat BKN Jakarta (088.01.0199.017220) dan 15 satker Kantor Daerah yang terdiri dari:

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta (088.01.0400.017241)
2. Kantor Regional II BKN Surabaya (088.01.0500.450454)
3. Kantor Regional III BKN Bandung (088.01.0200.017237)
4. Kantor Regional IV BKN Makassar (088.01.1900.560635)
5. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta (088.01.0100.606254)
6. Kantor Regional VI BKN Medan (088.01.0700.606261)
7. Kantor Regional VII BKN Palembang (088.01.1100.622372)

8. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin (088.01.1500.622386)
9. Kantor Regional IX BKN Jayapura (088.01.2500.622390)
10. Kantor Regional X BKN Denpasar (088.01.2200.667882)
11. Kantor Regional XI BKN Manado (088.01.1751.667896)
12. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (088.01.0900.667901)
13. Kantor Regional XIII BKN Aceh (088.01.0600.667752)
14. Kantor Regional XIV BKN Manokari (088.01.3300.667652)
15. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (088.01.0200.020505)

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca.
2. Laporan Barang Persediaan.
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan).
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
5. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB).
6. Laporan Barang Bersejarah.
7. Laporan Kondisi Barang. *(untuk Tahunan)*
8. Laporan Penyusutan.
9. Laporan Barang Rusak Berat.
10. Laporan Barang Hilang.
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAK-SIMAK pada Badan Kepegawaian Negara.
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN.
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER TAHUN ANGGARAN 2020 AUDITED

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2020

Nilai BMN per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp4.187.534.478.904,00 (*Empat triliun seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah*), yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp4.185.286.169.395,00 (*Empat triliun seratus delapan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga*

ratus sembilan puluh lima rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp2.248.309.509,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020

Mutasi BMN per Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

RINCIAN PERSEDIAAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp 4.725.580.949,00	Rp 2.603.680.582,00	Rp 2.121.900.367,00
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp 572.166.192,00	Rp 665.521.549,00	-Rp 93.355.357,00
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp 488.232.397,00	Rp 611.944.935,00	-Rp 123.712.538,00
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp 203.440.612,00	Rp 101.553.745,00	Rp 101.886.867,00
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp 164.460.075,00	Rp 97.891.250,00	Rp 66.568.825,00
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp 705.129.595,00	Rp 648.309.910,00	Rp 56.819.685,00
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp 190.834.653,00	Rp 263.902.429,00	-Rp 73.067.776,00
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp 728.938.330,00	Rp 347.005.616,00	Rp 381.932.714,00
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp 600.598.573,00	Rp 388.768.983,00	Rp 211.829.590,00
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp 313.644.670,00	Rp 451.794.880,00	-Rp 138.150.210,00
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp 964.763.624,00	Rp 924.578.755,00	Rp 40.184.869,00
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp 605.394.284,00	Rp 507.372.605,00	Rp 98.021.679,00
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp 724.001.861,00	Rp 855.116.394,00	-Rp 131.114.533,00
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp 300.986.100,00	Rp 288.421.065,00	Rp 12.565.035,00
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp 135.407.440,00	Rp 146.169.366,00	-Rp 10.761.926,00
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp 308.957.020,00	Rp 329.571.836,00	-Rp 20.614.816,00
JUMLAH		Rp11.732.536.375,00	Rp 9.231.603.900,00	Rp 2.500.932.475,00

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.732.536.375,00 (Sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp9.231.603.900.00,00 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp2.500.932.475,00 (Dua milyar lima ratus juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Mutasi barang persediaan

	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	8.191.135.592,00	1.949.900.595,00	10.141.036.187,00
117113	Bahan Pemeliharaan	498.691.609,00	108.217.224,00	606.908.833,00
117114	Suku Cadang	8.570.983,00	1.963.244,00	10.534.227,00
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	3.666.000,00	- 3.666.000,00	-
117128	Barang Persediaan Lainnya Untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
117131	Bahan Baku	32.696.870,00	20.459.978,00	53.156.848,00
117199	Persediaan Lainnya	496.842.846,00	424.057.434,00	920.900.280,00
	JUMLAH	9.231.603.900,00	2.500.932.475,00	11.732.536.375,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang dari aplikasi Persediaan masing-masing satuan kerja adalah sebesar Rp240.199.842,00 (*Dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp240.199.842,00 (*Dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).

b. Tanah

RINCIAN TANAH TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp 778.309.895.000,00	Rp 1.033.868.746.333,00	-Rp 255.558.851.333,00
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp 150.838.792.000,00	Rp 149.322.517.000,00	Rp 1.516.275.000,00
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp 351.559.532.000,00	Rp 351.559.532.000,00	Rp -
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp 51.116.757.449,00	Rp 49.288.593.049,00	Rp 1.828.164.400,00
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp 90.329.976.000,00	Rp 90.329.976.000,00	Rp -
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp 62.661.915.000,00	Rp 62.661.915.000,00	Rp -
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp 164.724.060.000,00	Rp 164.724.060.000,00	Rp -
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp 263.158.430.000,00	Rp 263.158.430.000,00	Rp -
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp 17.136.158.000,00	Rp 17.136.158.000,00	Rp -
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp 40.113.517.000,00	Rp 40.113.517.000,00	Rp -
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp 166.256.748.000,00	Rp 166.256.748.000,00	Rp -
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp 47.708.637.000,00	Rp 47.708.637.000,00	Rp -
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp 16.983.000.000,00	Rp 16.983.000.000,00	Rp -
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp 13.376.538.000,00	Rp 13.376.538.000,00	Rp -
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp 4.600.000.000,00	Rp 2.150.000.000,00	Rp 2.450.000.000,00
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp 83.235.950.000,00	Rp 83.235.950.000,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 2.302.109.905.449,00	Rp 2.551.874.317.382,00	-Rp 249.764.411.933,00

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 seluas 499.843 m² sebesar Rp2.302.109.905.449,00 (*Dua triliun tiga ratus dua milyar seratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 525.786 m² sebesar

Rp2.551.874.317.382,00 (*dua triliun lima ratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp6.872.081.067,00 (*Enam milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah*), mutasi kurang seluas 25.943 m² dengan nilai sebesar Rp256.636.493.000,00 (*Dua ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pengembangan Nilai Aset	1.828.164.400,00	-	1.828.164.400,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.450.000.000,00	-	2.450.000.000,00
Koreksi Kesalahan Input IP	2.593.916.667,00	-	2.593.916.667,00
Jumlah	6.872.081.067,00	-	6.872.081.067,00

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan	256.636.498.000,00		256.636.498.000,00
Jumlah	256.636.498.000,00	-	256.636.498.000,00

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	499.843	2.302.109.905.449,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m²/ Rp0,00.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m²)	Nilai (Rp)
Sengketa	-	0,00
Tidak terdapat bukti kepemilikan	-	0,00
Dikuasai pihak lain	6.548	Rp88.422.848.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut

b.1. Tanah yang digunakan pihak lain terdiri atas:

b.1.1. Tanah dihuni pensiunan pegawai Kanreg I BKN Yogyakarta di Kampung Sapien GK.I/445 seluas 619 m² dengan nilai sebelum revaluasi BMN senilai Rp427,110,000,00 nilai setelah di revaluasi sebesar Rp3.037.866.000,00 serta tanah di Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1,869 m² dengan nilai sebelum revaluasi BMN senilai Rp1.214.850.000,00 dan nilai setelah revaluasi BMN senilai Rp7.906.640.000,00

b.1.2 Terdapat Pemanfaatan tanah seluas 4.060 m² untuk 15 (lima belas) Unit Rumah Negara Golongan II Tidak Sesuai dengan Ketentuan pada Kantor Pusat BKN Jakarta senilai Rp77.478.342.000,00 yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat dihuni oleh pensiunan dan keluarga almarhum pensiunan.

Selain itu terdapat hibah tanah seluas 50.000 m² dari Pemerintah Kabupaten Sorong Pada hari Rabu, 28 September 2016 sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor: 800/416/ADPEM/2018 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 800/415/KEP ADPEM/2016 dengan nilai Rp2.150.000.000,00 (*Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah*,) tetapi Tanah hibah tersebut belum memiliki sertifikat tanah karena masih dalam pengurusan oleh Pemkab Sorong. Tahun 2017 Pemkab Sorong mencabut Hibah Tanah seluas 50.000 m² sesuai dengan SK Bupati Sorong Nomor: 012.5/KEP.173/IV/TAHUN 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 800/415/KEP ADPEM/2016 tentang hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Sorong untuk Kantor Regional XIV BKN dan atau Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN yang isinya tanahnya

akan dipindahkan ke lokasi berbeda. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan Tanah Pengganti untuk Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang berlokasi di Aimas-Kab Sorong dengan luas 30.000 m² dengan nilai Rp4.600.000.000,- (Empat milyar enam ratus juta rupiah) sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor: 34/A/KS/IX/2020 tanggal 24 September 2020 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara disertai dengan penyerahan Sertifikat Tanah sebanyak dua sertifikat rincian 1 (satu) sertifikat seluas 20.000 m² dengan No. 33.02.06.01.4.00033 dan 1 (satu) sertifikat seluas 10.000 m² dengan No. 33.02.06.01.4.00034 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Kepegawaian Negara

c. Peralatan dan Mesin

RINCIAN PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp 265.436.160.541,00	Rp 258.951.021.337,00	Rp 6.485.139.204,00
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp 19.060.289.362,00	Rp 19.199.485.151,00	-Rp 139.195.789,00
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp 16.432.843.653,00	Rp 16.030.102.386,00	Rp 402.741.267,00
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp 19.309.809.205,00	Rp 18.826.467.705,00	Rp 483.341.500,00
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp 27.114.920.719,00	Rp 26.314.781.219,00	Rp 800.139.500,00
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp 18.123.590.650,00	Rp 19.376.359.540,00	-Rp 1.252.768.890,00
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp 18.062.876.027,00	Rp 17.652.211.822,00	Rp 410.664.205,00
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp 28.804.307.685,00	Rp 28.765.214.471,00	Rp 39.093.214,00
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp 21.058.365.273,00	Rp 21.037.020.752,00	Rp 21.344.521,00
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp 15.911.203.688,00	Rp 16.413.150.779,00	-Rp 501.947.091,00
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp 16.769.275.506,00	Rp 16.290.163.506,00	Rp 479.112.000,00
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp 21.305.448.299,00	Rp 20.063.181.319,00	Rp 1.242.266.980,00
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp 21.484.021.334,00	Rp 21.170.857.532,00	Rp 313.163.802,00
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp 5.540.485.452,00	Rp 5.089.577.452,00	Rp 450.908.000,00
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp 8.169.566.328,00	Rp 7.594.302.092,00	Rp 575.264.236,00
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp 45.857.384.371,00	Rp 44.623.037.721,00	Rp 1.234.346.650,00
JUMLAH		Rp 568.440.548.093,00	Rp 557.396.934.784,00	Rp 11.043.613.309,00

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 68.307 unit/buah sebesar Rp570.172.704.282,00 (*Lima ratus tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 158.354 unit/buah sebesar Rp559.639.394.293,00 (*lima ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*), mutasi tambah sejumlah 1.899 unit/buah sebesar Rp25.228.610.447,00 (*Dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*) dan mutasi kurang

sejumlah 91.946 unit/buah sebesar Rp14.695.300.458,00 (*Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

c.1. Alat Besar (3.01);

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah 171 unit sebesar Rp33.431.417.106,00 (*Tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sejumlah 171 unit sebesar Rp33.401.417.106,00 (*tiga puluh tiga milyar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam rupiah*) mutasi tambah 1 unit dengan nilai sebesar Rp44.860.000,00 (*Empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang 1 unit dengan nilai sebesar Rp14.860.000,00 (*Empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*)

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	-	-
Penyelesaian Pembangunan Dg KDP	-	-	-
Reklasifikasi Masuk	14.860.000,00	-	14.860.000,00
Pengembangan Nilai Aset	30.000.000,00	-	30.000.000,00
Jumlah	44.860.000,00	-	44.860.000,00

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	14.860.000,00	-	14.860.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	-	-	-
Jumlah	14.860.000,00	-	14.860.000,00

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	170	33.397.936.777,00
Rusak Ringan	1	33.480.329,00
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.2. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 308 unit sebesar Rp38.158.850.370,00 (*Tiga puluh delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total sejumlah 308 unit sebesar Rp33.923.763.370,00 (*tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) mutasi tambah sejumlah 27 unit dengan nilai sebesar Rp6.701.355.000,00 (*Enam milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 27 unit dengan nilai sebesar Rp2.466.268.000,00 (*Dua milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	6.527.355.000,00	-	6.527.355.000,00
Pengembangan Nilai Aset	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Hibah Masuk	169.000.000,00	-	169.000.000,00
Jumlah	6.701.355.000,00	-	6.701.355.000,00

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	2.466.268.000,00	-	2.466.268.000,00
Jumlah	2.466.268.000,00	-	2.466.268.000,00

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai

sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	301	37.255.219.570,00
Rusak Ringan	8	917.130.800,00
Rusak Berat	14	968.880.000,00

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 14 unit dengan nilai sebesar Rp968.880.000,00 (*Sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah rupiah*).

c.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 69 unit sebesar Rp5.138.549.785,00 (*Lima milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 63 unit sebesar Rp5.131.839.785,00 (*lima milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*) mutasi tambah sejumlah 6 unit dengan nilai sebesar Rp6.710.000,00 (*Enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	6.710.000,00	-	6.710.000,00
Jumlah	6.710.000,00	-	6.710.000,00

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	69	5.138.549.785,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional adalah 0 unit/ Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.4. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 7 buah sebesar Rp199.807.300,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 5 buah sebesar Rp195.772.500,00 (*Seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 2 buah dengan nilai sebesar Rp4.034.800,00 (*Empat juta tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	4.034.800,00	-	4.034.800,00
Jumlah	4.034.800,00	-	4.034.800,00

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	199.807.300,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 51.565 unit/buah sebesar Rp217.603.835.525,00 (*Dua ratus tujuh belas milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 142.012 unit/buah sebesar Rp217.242.144.153,00 (*dua ratus tujuh belas milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 847 unit/buah dengan nilai sebesar Rp4.194.116.934,00 (*Empat milyar seratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 91.294 unit/buah dengan nilai sebesar Rp3.832.425.562,00 (*Tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Saldo Awal	-	3.330.000,00	3.330.000,00
Pembelian	3.838.815.079,00	115.941.455,00	3.954.756.534,00
Transfer Masuk	128.665.900,00		128.665.900,00
Reklasifikasi Masuk	105.637.500,00	-	105.637.500,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	1.727.000,00	-	1.727.000,00
Jumlah	4.074.845.479,00	119.271.455,00	4.194.116.934,00

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	273.261.000,00	-	273.261.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	2.743.196.887,00	19.574.775,00	2.762.771.662,00
Transfer Keluar	128.665.900,00		128.665.900,00
Koreksi Pencatatan		666.000.000,00	666.000.000,00
Transaksi Normalisasi BMN	1.727.000,00		1.727.000,00
Jumlah	3.146.850.787,00	685.574.775,00	3.832.425.562,00

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	50.981	217.320.909.323,00
Rusak Ringan	584	282.926.202,00
Rusak Berat	666	1.527.184.797,00

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 666 unit/buah sebesar Rp1.527.184.797,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

c.6. Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 2.008 unit/buah sebesar Rp32.244.786.376,00 (*Tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 1.890 unit/buah sebesar Rp32.079.964.402,00 (*tiga puluh dua milyar tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 194 buah dengan nilai sebesar Rp884.265.690,00 (*Delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 76 buah

dengan nilai sebesar Rp719.443.716,00 (*Tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	730.275.190,00	29.290.500,00	759.565.690,00
Transfer Masuk	124.700.000,00		124.700.000,00
Pengembangan Nilai Aset			-
Jumlah	854.975.190,00	29.290.500,00	884.265.690,00

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	124.700.000,00	-	124.700.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	570.834.600,00	-	570.834.600,00
Penghapusan	23.909.116,00	-	23.909.116,00
Jumlah	719.443.716,00	-	719.443.716,00

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.998	32.173.171.476,00
Rusak Ringan	10	71.614.900,00
Rusak Berat	24	1.191.661.347,00

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sejumlah 24 buah senilai Rp1.191.661.347,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).

c.7. Alat Kedokteran dan Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 556 buah sebesar Rp848.505.320,00 (*Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 486 buah

sebesar Rp693.979.670,00 (*enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 72 buah dengan nilai sebesar Rp156.575.650,00 (*Seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 2 buah dengan nilai sebesar Rp2.050.000,00 (*Dua juta lima puluh ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	153.714.650,00	2.861.000,00	156.575.650,00
Jumlah	153.714.650,00	2.861.000,00	156.575.650,00

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian aset dari penggunaan	2.050.000,00	-	2.050.000,00
Jumlah	2.050.000,00	-	2.050.000,00

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	556	848.505.320,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	3	2.050.000,00

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 3 buah sebesar Rp2.050.000,00 (*Dua juta lima puluh ribu rupiah*).

c.8. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 141 buah sebesar Rp5.731.980.994,00 (*Lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 129 buah sebesar Rp5.691.826.494,00 (*lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 12 buah dengan nilai sebesar Rp40.154.500,00 (*Empat puluh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	35.432.500,00	4.722.000,00	40.154.500,00
Jumlah	35.432.500,00	4.722.000,00	40.154.500,00

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	141	5.731.980.994,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	3	436.185.894,00

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 3 buah sebesar Rp436.185.894,00 (*Empat ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*).

c.9. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 13.384 buah sebesar Rp233.925.580.596,00 (*Dua ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 13.242 buah sebesar Rp230.554.154.003,00 (*dua ratus tiga puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 631 buah dengan nilai sebesar Rp9.195.129.773,00 (*Sembilan milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 489 buah dengan nilai sebesar Rp5.823.703.180,00 (*Lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus delapan puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	8.513.658.820,00	15.986.500,00	8.529.645.320,00
Koreksi Saldo awal	-	900.000,00	900.000,00
Reklasifikasi Masuk	297.171.375,00	-	297.171.375,00
Pengembangan Nilai Aset	36.708.100,00	-	36.708.100,00
Transfer Masuk	203.000.000,00	-	203.000.000,00
Perolahan hasil tindak lanjut Normalisasi	127.704.978,00	-	127.704.978,00
Jumlah	9.178.243.273,00	16.886.500,00	9.195.129.773,00

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	203.000.000,00		203.000.000,00
Reklasifikasi Keluar	283.371.375,00		283.371.375,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	5.227.189.927,00	-	5.227.189.927,00
Penghapusan	-		-
Transaksi Normalisasi BMN	110.141.878,00		110.141.878,00
Jumlah	5.823.703.180,00		5.823.703.180,00

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai

berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1324	233.305.303.848,00
Rusak Ringan	60	588.913.648,00
Rusak Berat	428	5.227.189.927,00

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 428 buah sebesar Rp5.227.189.927,00 (*Lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).

c.10. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 57 buah sebesar Rp2.169.719.500,00 (*Dua milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 1 buah sebesar Rp6.710.000,00 (*enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 106 buah dengan nilai sebesar Rp3.992.909.500,00 (*Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 50 buah dengan nilai sebesar Rp1.829.900.000,00 (*Satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	1.995.386.000,00	-	1.995.386.000,00
Reklasifikasi Masuk	167.623.500,00	-	167.623.500,00
Transfer Masuk	1.829.900.000,00	-	1.829.900.000,00
Jumlah	3.992.909.500,00	-	3.992.909.500,00

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	1.829.900.000,00	-	1.829.900.000,00
Jumlah	1.829.900.000,00	-	1.829.900.000,00

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	57	2.169.719.500,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.11. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 9 buah sebesar Rp511.948.410,00 (*Lima ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 15 buah sebesar Rp510.099.810,00 (*lima ratus sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 1 buah dengan nilai sebesar Rp8.498.600,00 (*Delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 7 buah dengan nilai sebesar Rp6.650.000,00 (*Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	8.498.600,00	-	8.498.600,00
Jumlah	8.498.600,00	-	8.498.600,00

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian aset dari penggunaan	6.650.000,00	-	6.650.000,00
Jumlah	6.650.000,00	-	6.650.000,00

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9	511.948.410,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	7	6.650.000,00

Kelompok barang Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 7 unit senilai Rp6.650.000,00 (*Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

c.12. Rambu – Rambu (3.18)

Saldo Rambu - Rambu pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 26 unit sebesar Rp152.965.000,00 (*seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 26 unit sebesar Rp152.965.000,00 (*seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Mutasi Kurang Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	26	152.965.000,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Rambu - Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.13. Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 6 buah sebesar Rp54.758.000,00 (*lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 6 buah dengan nilai sebesar Rp54.758.000,00 (*Lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	54.758.000,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.16. Akumulasi Penyusutan

Tabel 3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

KODE	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN		
		INTRAKOMPTABLE (Rp)	EKSTRA KOMPTABLE (Rp)	GABUNGAN (Rp)
30103	ALAT BANTU	23.857.749.064,00	1.389.500,00	23.859.138.564,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	26.975.158.620,00		26.975.158.620,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	149.580.864,00	2.536.950,00	152.117.814,00
30301	ALAT BENGGEL BERMESIN	4.600.387.150,00		4.600.387.150,00
30302	ALAT BENGGEL TAK BERMESIN	95.538.760,00	2.039.580,00	97.578.340,00
30303	ALAT UKUR	10.750.370,00	154.000,00	10.904.370,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	196.276.850,00		196.276.850,00
30501	ALAT KANTOR	77.419.620.512,00	31.108.250,00	77.450.728.762,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	121.245.267.825,00	875.442.188,00	122.120.710.013,00
30601	ALAT STUDIO	21.963.722.445,00	5.226.300,00	21.968.948.745,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	4.730.491.385,00	64.853.388,00	4.795.344.773,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	684.593.370,00		684.593.370,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	605.746.663,00	11.296.302,00	617.042.965,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	14.782.875,00	1.049.400,00	15.832.275,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	4.779.511.712,00	939.126,00	4.780.450.838,00
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-		-
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR /ELEKTRONIKA	620.550,00		620.550,00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.763.930,00		1.763.930,00
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-		-
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	825.000,00	825.000,00
30902	Persenjataan non senjata api	-		-
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-		-
31001	KOMPUTER UNIT	73.549.880.439,00	81.452.864,00	73.631.333.303,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	125.313.219.021,00		125.313.219.021,00
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	-		-
31502	ALAT PELINDUNG	-		-
31503	ALAT SAR	547.462.376,00		547.462.376,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-		-
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	448.401.610,00		448.401.610,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	136.235.711,00	12.900.000,00	149.135.711,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	54.758.000,00		54.758.000,00
JUMLAH		487.381.520.102,00	1.091.212.848,00	488.472.732.950,00

d. Gedung dan Bangunan

RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp 353.487.239.740,00	Rp363.474.372.473,00	-Rp 9.987.132.733,00
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp 39.134.021.945,00	Rp 24.947.636.350,00	Rp 14.186.385.595,00
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp 26.120.484.737,00	Rp 24.267.157.956,00	Rp 1.853.326.781,00
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp 33.253.150.000,00	Rp 33.343.627.000,00	-Rp 90.477.000,00
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp 42.382.844.889,00	Rp 60.272.516.894,00	-Rp 17.889.672.005,00
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp 29.215.692.201,00	Rp 29.040.623.301,00	Rp 175.068.900,00
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp 35.526.798.225,00	Rp 35.719.030.225,00	-Rp 192.232.000,00
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp 43.836.093.725,00	Rp 42.868.924.725,00	Rp 967.169.000,00
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp 22.340.241.100,00	Rp 22.340.241.100,00	Rp -
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp 21.190.581.549,00	Rp 21.163.007.000,00	Rp 27.574.549,00
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp 30.567.530.257,00	Rp 28.771.828.609,00	Rp 1.795.701.648,00
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp 25.305.160.497,00	Rp 23.354.997.805,00	Rp 1.950.162.692,00
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp 26.648.321.931,00	Rp 25.778.189.296,00	Rp 870.132.635,00
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp 5.655.405.004,00	Rp 5.655.405.004,00	Rp -
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp -	Rp -	Rp -
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp 99.182.320.523,00	Rp 98.779.431.258,00	Rp 402.889.265,00
JUMLAH		Rp 833.845.886.323,00	Rp839.776.988.996,00	-Rp 5.931.102.673,00

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 464 unit sebesar Rp833.851.736.323,00 (*Delapan ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 473 unit sebesar Rp839.782.838.996,00 (*Delapan ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) mutasi tambah 15 unit sebesar Rp25.541.130.556,00 (*Dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) dan mutasi kurang 24 unit sebesar Rp31.472.233.229,00 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

d.1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 436 unit sebesar Rp821.220.171.357,00 (*Delapan ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 447 unit sebesar Rp828.914.089.367,00 (*Delapan ratus dua*

puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), mutasi tambah sejumlah 13 unit sebesar Rp21.603.834.595,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan mutasi kurang 24 unit sebesar Rp29.297.752.605,00 (Dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	248.982.745,00	-	248.982.745,00
Transfer Masuk	485.517.000,00	-	485.517.000,00
Pengembangan Nilai Aset	2.157.076.660,00	-	2.157.076.660,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	398.976.000,00	-	398.976.000,00
Reklasifikasi Masuk	154.950.000,00	-	154.950.000,00
Koreksi Barang Berlebih hasil Inventarisasi	312.183.000,00	-	312.183.000,00
Pengembangan Melalui KDP	5.976.900.190,00	-	5.976.900.190,00
Koreksi Kesalahan input IP	11.788.093.000,00	-	11.788.093.000,00
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	43.770.000,00	-	43.770.000,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN	37.386.000,00	-	37.386.000,00
Jumlah	21.603.834.595,00	-	21.603.834.595,00

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	154.950.000,00	-	154.950.000,00
Koreksi Pencatatan	28.871.209.269,00	-	28.871.209.269,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	79.361.336,00	-	79.361.336,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	192.232.000,00	-	192.232.000,00
Jumlah	29.297.752.605,00	-	29.297.752.605,00

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	387	812.943.559.795,00
Rusak Ringan	49	8.276.611.562,00
Rusak Berat	15	1.520.085.812,00

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 15 unit/Rp1.520.085.8120,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah*).

d.2. Candi/Tugu Peringatan/Prasasti (4.02)

Saldo Candi/Tugu Peringatan/Prasasti pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 5 unit/buah sebesar Rp51.419.000,00 (*Lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 5 unit/buah sebesar Rp51.419.000,00 (*Lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Candi/Tugu Peringatan/Prasasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Mutasi Kurang Candi/Tugu Peringatan/Prasasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Candi/Tugu Peringatan/Prasasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Candi/Tugu Peringatan/Prasasti di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	51.419.000,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Candi/Tugu Peringatan/Prasasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.3. Tugu/Tanda Batas (4.04)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 23 unit/buah sebesar Rp12.580.145.966,00 (*Dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 21 unit/buah sebesar Rp10.817.330.629,00 (*Sepuluh milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sejumlah 2 unit/buah dengan nilai sebesar Rp1.762.815.337,00 (*Satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.022.320.337,00	-	1.022.320.337,00
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	718.866.000,00	-	718.866.000,00
Koreksi kesalahan input IP	21.629.000,00		21.629.000,00
Jumlah	1.762.815.337,00	-	1.762.815.337,00

Mutasi Kurang Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas diatas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	17	11.813.569.341,00
Rusak Ringan	6	766.576.625,00
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Tugu/Tanda Batas yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.894.381.064,00
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat	9.382.799.460,00
4.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.801.048,00
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	953.006.388,00
	Jumlah	86.233.987.960,00

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

RINCIAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp 56.071.000,00	Rp 56.071.000,00	Rp -
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp 925.565.400,00	Rp 917.902.400,00	Rp 7.663.000,00
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp 290.456.867,00	Rp 290.456.867,00	Rp -
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp 7.399.412.500,00	Rp 7.750.946.500,00	-Rp 351.534.000,00
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp -	Rp -	Rp -
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp 2.108.128.600,00	Rp 2.108.128.600,00	Rp -
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp 2.879.491.700,00	Rp 736.830.650,00	Rp 2.142.661.050,00
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp -	Rp -	Rp -
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp 2.942.634.000,00	Rp 2.942.634.000,00	Rp -
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp 2.062.182.000,00	Rp 2.062.182.000,00	Rp -
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp 894.283.183,00	Rp 894.283.183,00	Rp -
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp 308.174.570,00	Rp 308.174.570,00	Rp -
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp -	Rp -	Rp -
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp -	Rp -	Rp -
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp 3.100.212.000,00	Rp 3.100.212.000,00	Rp -
JUMLAH		Rp 22.986.611.820,00	Rp 21.187.821.770,00	Rp 1.798.790.050,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 53.484 m² sebesar Rp22.986.611.820,00 (*Dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 45.601 m² sebesar Rp21.187.821.770,00 (*Dua puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*), mutasi tambah 7.884 m² sebesar Rp2.448.896.000,00 (*Dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 1 m² sebesar Rp650.105.950,00 (*Enam ratus lima puluh*

juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

e.1. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 53.426 m² sebesar Rp16.124.321.000,00 (*Enam belas milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 45.544 m² sebesar Rp14.575.772.950,00 (*Empat belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*, mutasi tambah sejumlah 7.883 m² dengan nilai sebesar Rp2.168.491.000,00 (*Dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1 m² dengan nilai sebesar Rp619.942.950,00 (*Enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	2.168.491.000,00	-	2.168.491.000,00
Koreksi semu hasil Koreksi hasil Revaluasi		-	
Jumlah	2.168.491.000,00	-	2.168.491.000,00

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan	541.118.000,00	-	541.118.000,00
Koreksi semu hasil Koreksi hasil Revaluasi	17.579.087,00	-	17.579.087,00
Koreksi BMN ditemukan kembali	61.245.863,00	-	61.245.863,00
Jumlah	619.942.950,00	-	619.942.950,00

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	48.356	15.287.298.000,00
Rusak Ringan	5.070	837.023.000,00
Rusak Berat	0	-

Kelompok barang Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.2. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 27 unit sebesar Rp2.764.941.783,00 (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 26 unit sebesar Rp2.514.699.783,00 (*dua milyar lima ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*) mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp250.242.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah unit 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	52.995.000,00	-	52.995.000,00
Koreksi Kesalahan input IP	187.141.000,00	-	187.141.000,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN	10.106.000,00	-	10.106.000,00
Jumlah	250.242.000,00	-	250.242.000,00

Mutasi Kurang Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	25	2.444.192.783,00
Rusak Ringan	1	274.924.000,00
Rusak Berat	1	45.825.000,00

Kelompok barang Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.3. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 12 unit dengan nilai sebesar Rp1.899.988.320,00 (*atu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp1.899.988.320,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	12	Rp 1.899.988.320
Rusak Ringan	-	Rp -
Rusak Berat	-	Rp -

Kelompok Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.4. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 19 unit sebesar Rp2.197.360.717,00 (*dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 19 unit dengan nilai sebesar Rp2.197.360.717,00 (*dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	19	2.197.360.717,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Tabel 5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
	JALAN DAN JEMBATAN	13.720.743.348,00
5.01.01	Jalan	13.720.549.504,00
5.01.02	Jembatan	193.844,00
	IRIGASI	456.651.725,00
5.02.01	Bangunan Air Irigasi	15.860.947,00
5.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	13.526.394,00
5.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	4.928.550,00
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	328.106.165,00
5.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	53.664.366,00
5.02.07	Bangunan Air Kotor	40.565.303,00
	JARINGAN	1.998.359.149,00
5.03.01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	169.986.912,00
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	135.441.850,00
5.03.10	Instalasi Lain	951.173.820,00
5.04.01	Jaringan Air Minum	50.189.667,00
5.04.02	Jaringan Listrik	655.199.226,00
5.04.03	Jaringan Telepon	36.367.674,00
	JUMLAH	16.175.754.222,00

f. Aset Tetap Dalam Renovasi

f.1. Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (6.07)

Saldo Gedung dan Bangunan dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 28 unit/buah sebesar Rp11.837.310.298,00 (*Sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 32 unit/buah sebesar Rp12.095.425.298,00 (*Dua belas milyar sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sejumlah 14 unit/buah sebesar Rp7.181.972.132,00 (*Tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 18 unit/buah sebesar Rp7.440.087.132,00 (*Tujuh milyar empat ratus empat puluh juta delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	-	-	
Koreksi Saldo Awal	6.975.172.132,00	-	6.975.172.132,00
Pengembangan Nilai Aset	206.800.000,00	-	206.800.000,00
Jumlah	7.181.972.132,00	-	7.181.972.132,00

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Intrakomptabel (Rp)
Hibah Keluar	464.915.000,00	-	464.915.000,00
Koreksi Pencatatan	6.975.172.132,00		6.975.172.132,00
Jumlah	7.440.087.132,00	-	7.440.087.132,00

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit/buah kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	28	11.837.310.298,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok Gedung dan Bangunan dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

f.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Tabel 6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.07.02	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	2.998.875,00
6.07.03	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	4.941.045.714,00
6.07.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	140.441.720,00
	Jumlah	5.084.486.309,00

g. Aset Tetap Lainnya

RINCIAN ASET TETAP LAINNYA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp 443.431.863,00	Rp 438.536.863,00	Rp 4.895.000,00
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp 376.956.817,00	Rp 376.956.817,00	Rp -
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp 56.392.000,00	Rp 56.392.000,00	Rp -
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp 414.584.550,00	Rp 414.584.550,00	Rp -
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp 3.105.699.150,00	Rp 3.570.614.150,00	-Rp 464.915.000,00
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp 745.273.190,00	Rp 745.273.190,00	Rp -
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp 173.193.222,00	Rp 173.193.222,00	Rp -
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp 838.912.644,00	Rp 838.912.644,00	Rp -
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp 1.927.538.381,00	Rp 1.927.538.381,00	Rp -
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp 9.999.550,00	Rp 9.999.550,00	Rp -
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp 445.735.317,00	Rp 445.735.317,00	Rp -
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp 1.102.669.039,00	Rp 1.102.669.039,00	Rp -
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp 1.185.150.817,00	Rp 1.185.150.817,00	Rp -
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp -	Rp -	Rp -
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp 2.006.204.992,00	Rp 1.799.404.992,00	Rp 206.800.000,00
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp 793.421.361,00	Rp 793.421.361,00	Rp -
JUMLAH		Rp 13.625.162.893,00	Rp 3.878.382.893,00	-Rp 253.220.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 sejumlah 11.963 sebesar Rp 1.787.852.595,00 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 11.962 sebesar Rp 1.782.957.595,00 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 1 buah sebesar Rp 4.895.000,00 (*Empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 buah sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

g.1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 11.936 buah sebesar Rp 1.667.252.595,00 (*Satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 11.935 buah sebesar Rp 1.662.357.595,00 (*Satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*) mutasi tambah sejumlah 1 buah dengan nilai sebesar Rp 4.895.000,00 (*Empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	4.895.000,00	-	4.895.000,00
Jumlah	4.895.000,00	-	4.895.000,00

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	11.936	1.667.252.595,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Kelompok Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

g.2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 27 buah sebesar Rp120.600.000,00 (*Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 27 buah sebesar Rp120.600.000,00 (*Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
		-	

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga diatas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	27	120.600.000,00
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

g.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tabel 7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00
6.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	0,00
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	29.800.000,00
6.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	0,00
	JUMLAH	29.800.000,00

h. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp 62.993.287,00	Rp -	Rp 62.993.287,00
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp -	Rp -	Rp -
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp -	Rp -	Rp -
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp -	Rp -	Rp -
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp -	Rp -	Rp -
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp 63.161.600,00	Rp -	Rp 63.161.600,00
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp -	Rp -	Rp -
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp -	Rp -	Rp -
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp -	Rp -	Rp -
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp -	Rp -	Rp -
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp -	Rp -	Rp -
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp -	Rp 168.744.037,00	-Rp 168.744.037,00
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp -	Rp -	Rp -
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp 98.230.000,00	Rp -	Rp 98.230.000,00
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp -	Rp -	Rp -
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 224.384.887,00	Rp 168.744.037,00	Rp 55.640.850,00

Saldo KDP pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp224.384.887,00 (*Dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp168.744.037,00 (*Seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp7.551.132.377,00 (*Tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp7.495.491.527,00 (*Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Perolehan/Penambahan KDP	768.913.631,00
Pengembangan KDP	6.782.218.746,00
Jumlah	7.551.132.377,00

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	7.495.491.527,00
Jumlah	7.495.491.527,00

i. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 1.454 buah sebesar Rp196.066.664.605,00 (*Seratus sembilan puluh enam miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 614 buah sebesar Rp191.771.375.633,00 (*Seratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), mutasi tambah sejumlah 1.765 buah/unit dengan nilai sebesar Rp54.040.901.969 (*Lima puluh empat miliar empat puluh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 925 buah/unit dengan nilai sebesar Rp49.745.612.997 (*Empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*)

i.1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

i.2. Aset Tak Berwujud

RINCIAN ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp140.678.221.915,00	Rp172.600.785.579,00	-Rp 31.922.563.664,00
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp 964.568.500,00	Rp 964.568.500,00	Rp -
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp 806.761.700,00	Rp 806.761.700,00	Rp -
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp 849.703.850,00	Rp 849.703.850,00	Rp -
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp 713.533.250,00	Rp 713.533.250,00	Rp -
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp 288.057.250,00	Rp 297.132.250,00	-Rp 9.075.000,00
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp 767.754.180,00	Rp 767.754.180,00	Rp -
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp 886.661.700,00	Rp 886.661.700,00	Rp -
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp 651.566.250,00	Rp 651.566.250,00	Rp -
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp 729.484.450,00	Rp 729.484.450,00	Rp -
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp 707.946.750,00	Rp 707.946.750,00	Rp -
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp 651.566.250,00	Rp 651.566.250,00	Rp -
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp 740.391.250,00	Rp 740.391.250,00	Rp -
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp -	Rp -	Rp -
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp -	Rp -	Rp -
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp 712.099.900,00	Rp 712.099.900,00	Rp -
JUMLAH		Rp150.148.317.195,00	Rp182.079.955.859,00	-Rp 31.931.638.664,00

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 308 unit/buah sebesar Rp150.148.317.195,00 (*Seratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 383 unit/buah sebesar Rp182.079.955.859,00 (*Seratus delapan puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sejumlah 12 unit/buah dengan nilai sebesar Rp5.699.079.500,00 (*Lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 87 unit/buah dengan nilai sebesar Rp37.630.718.164,00 (*Tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus enam puluh empat rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang barang adalah sebagai berikut:

i.2.1 Hak Cipta

Saldo Hak Cipta pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit/buah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi

kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Dari jumlah Hak Cipta di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp,00 (*Nol rupiah*).

Hak Cipta yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

i.2.2 Software

Saldo Software pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 305 unit/buah sebesar Rp149.913.158.345,00 (*Seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 378 unit/buah sebesar Rp181.307.401.009,00 (*Seratus delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan rupiah*), mutasi tambah sejumlah 12 unit/buah dengan nilai sebesar Rp5.699.079.500,00 (*Lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 85 unit/buah dengan nilai sebesar Rp37.093.322.164,00 (*Tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah*).

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	1.874.466.500,00
Pengembangan Nilai Aset	3.209.392.000,00
Pengembangan melalui KDP	97.295.000,00
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	517.926.000,00
Jumlah	5.699.079.500,00

Mutasi Kurang Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Transaksi Normalisasi BMN	517.926.000,00
Reklasifikasi Keluar	13.800.000,00
Koreksi Pencatatan	9.075.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	36.552.521.164,00
Jumlah	37.093.322.164,00

Dari jumlah Software di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 32 unit/buah sebesar Rp36.552.521.164,00 (*Tiga puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah*).

i.2.3 Lisensi

Saldo Lisensi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp39.658.850,00 (*Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 2 unit/buah sebesar Rp386.854.850,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1 unit/buah dengan nilai sebesar Rp347.196.000,00 (*Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	347.196.000,00

Dari jumlah Lisensi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol*

rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp,00 (*Nol Rupiah*).

Lisensi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/buah sebesar Rp347.196.000,00 (*Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

i.2.4 Hasil Kajian Penelitian

Saldo Hasil Kajian Penelitian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp195.000.000,00 (*Seratus sembilan puluh lima juta rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 2 unit/buah sebesar Rp385.200.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 1 unit/buah dengan nilai sebesar Rp190.200.000,00 (*Seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	190.200.000,00

Dari jumlah Hasil Kajian Penelitian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Hasil Kajian Penelitian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/buah sebesar Rp190.200.000,00 (*Seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah*).

i.3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah

RINCIAN ASET LAIN-LAIN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/PENURUNAN
1	KANTOR PUSAT BKN JAKARTA	Rp 38.668.087.974,00	Rp6.823.666.897,00	Rp 31.844.421.077,00
2	KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	Rp 1.171.763.137,00	Rp -	Rp 1.171.763.137,00
3	KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	Rp 517.793.691,00	Rp 517.793.691,00	Rp -
4	KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	Rp 120.107.691,00	Rp 119.970.191,00	Rp 137.500,00
5	KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASAR	Rp 343.800.000,00	Rp -	Rp 343.800.000,00
6	KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	Rp 842.805.869,00	Rp -	Rp 842.805.869,00
7	KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	Rp 526.841.170,00	Rp -	Rp 526.841.170,00
8	KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	Rp 1.348.497.786,00	Rp 27.814.150,00	Rp 1.320.683.636,00
9	KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	Rp 707.119.479,00	Rp 229.042.000,00	Rp 478.077.479,00
10	KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	Rp 582.370.747,00	Rp1.182.702.406,00	-Rp 600.331.659,00
11	KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	Rp 127.632.947,00	Rp 127.632.947,00	Rp -
12	KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	Rp -	Rp -	Rp -
13	KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	Rp 876.758.230,00	Rp 658.851.242,00	Rp 217.906.988,00
14	KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	Rp 2.640.000,00	Rp 2.640.000,00	Rp -
15	KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	Rp 62.553.914,00	Rp 1.306.250,00	Rp 61.247.664,00
16	PUSAT PENGEMBANGAN ASN	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 45.898.772.635,00	Rp9.691.419.774,00	Rp 36.207.352.861,00

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah 1.146 unit/buah sebesar Rp45.918.347.410,00 (*Empat puluh lima milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 231 unit/buah sebesar Rp9.691.419.774,00 (*Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*), mutasi tambah sejumlah 1.753 buah/unit dengan nilai sebesar Rp48.341.822.469,00 (*Empat puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 838 buah/unit dengan nilai sebesar Rp12.114.894.833,00 (*Dua belas milyar seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	48.322.247.694,00	19.574.775,00	48.341.822.469,00

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	12.056.017.583,00		12.056.017.583,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	13.500.000,00		13.500.000,00
Koreksi Pencatatan (BMN Yang dihentikan)	27.814.150,00		27.814.150,00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	17.563.100,00		17.563.100,00
Jumlah	12.114.894.833,00		12.114.894.833,00

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Golongan Barang		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	8.616.623.471,00	19.574.775,00	8.636.198.246,00
2.	Gedung dan Bangunan	192.232.000,00	-	192.232.000,00
3.	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.	Aset Tak Berwujud	37.089.917.164,00	-	37.089.917.164,00
JUMLAH		45.898.772.635,00	19.574.775,00	45.918.347.410,00

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah adalah:

Tabel 9. Akumulasi Penyusutan BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan		
		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
30103	ALAT BANTU	-	-	-
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	961.200.000,00	-	961.200.000,00
30303	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR	7.680.000,00	-	7.680.000,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	-	-
30501	ALAT KANTOR	340.285.981,00	-	340.285.981,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1.162.534.141,00	19.574.775,00	1.182.108.916,00
30601	ALAT STUDIO	715.850.847,00	-	715.850.847,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	475.810.500,00	-	475.810.500,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	2.050.000,00	-	2.050.000,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	436.185.894,00	-	436.185.894,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	-	-
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	-	-
31001	KOMPUTER UNIT	2.731.746.373,00	-	2.731.746.373,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	1.764.384.960,00	-	1.764.384.960,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	6.650.000,00	-	6.650.000,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	21.720.034,00	-	21.720.034,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	36.022.497.065,00	-	36.022.497.065,00

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 Audited

a. Barang Milik Negara per Akun Neraca

Nilai BMN Intrakomptabel pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.949.012.125.670,00 (*Tiga triliun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Penyajian nilai BMN dalam Neraca

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET LANCAR						
1	Persediaan	11.732.536.375,00	0,30	-	0,00	11.732.536.375,00	0,30
	Sub Jumlah (I)	11.732.536.375,00	0,30	-	0,00	11.732.536.375,00	0,30
II	ASET TETAP						
1	Tanah	2.302.109.905.449,00	58,30	-	0,00	2.302.109.905.449,00	58,27
2	Peralatan Mesin	568.440.548.093,00	14,39	1.732.156.189,00	98,55	570.172.704.282,00	14,43
3	Gedung & Bangunan	833.845.886.323,00	21,12	5.850.000,00	0,33	833.851.736.323,00	21,11
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.986.611.820,00	0,58	-	0,00	22.986.611.820,00	0,58
5	Aset Tetap Lainnya	1.787.852.595,00	0,05	-	0,00	1.787.852.595,00	0,05
6	ATR	11.837.310.298,00	0,30	-	0,00	11.837.310.298,00	0,30
7	KDP	224.384.887,00	0,01	-	0,00	224.384.887,00	0,01
	Sub Jumlah (II)	3.741.232.499.465,00	94,74	1.738.006.189,00	98,89	3.742.970.505.654,00	94,74
III	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Aset Tak Berwujud	150.148.317.195,00	3,80	-	0,00	182.079.955.859,00	4,61
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	45.898.772.635,00	1,16	19.574.775,00	1,11	45.918.347.410,00	1,16
	Sub Jumlah (III)	196.047.089.830,00	4,96	19.574.775,00	1,11	196.066.664.605,00	4,96
	TO TAL	3.949.012.125.670,00	100	1.757.580.964,00	100	3.950.769.706.634,00	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Penyajian nilai Penyusutan BMN dalam Neraca

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET TETAP						
1	Peralatan Mesin	487.381.520.102,00	62,31	1.092.998.021,00	98,17	488.474.518.123,00	62,36
2	Gedung & Bangunan	86.233.191.460,00	11,02	796.500,00	0,07	86.233.987.960,00	11,01
3	Jalan, dan Jembatan	13.720.743.348,00	1,75	-	0,00	13.720.743.348,00	1,75
4	Irigasi	456.651.725,00	0,06	-	0,00	456.651.725,00	0,06
5	Jaringan	1.998.359.149,00	0,26	-	0,00	1.998.359.149,00	0,26
6	Aset Tetap dlm Renov.(ATR)	5.084.486.309,00	0,65	-	0,00	5.084.486.309,00	0,65
7	Aset Tetap Lainnya	29.800.000,00	0,00	-	0,00	29.800.000,00	0,00
	Sub Jumlah (I)	594.904.752.093,00	76,05	1.093.794.521,00	98,24	595.998.546.614,00	76,08
II	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	Aset Tak Berwujud (ATB)	142.686.489.940,00	18,24	-	0,00	142.686.489.940,00	18,21
3	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional	8.626.098.730,00	1,10	19.574.775,00	1,76	8.645.673.505,00	1,10
4	ATB yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	36.022.497.065,00	4,61	-	0,00	36.022.497.065,00	4,60
	Sub Jumlah (II)	187.335.085.735,00	23,95	19.574.775,00	1,76	187.354.660.510,00	23,92
	TOTAL	782.239.837.828,00	100	1.113.369.296,00	100	783.353.207.124,00	100

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan nilai BMN Laporan Barang dan Laporan Keuangan

No.	Golongan Barang	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	11.732.536.375,00	11.732.536.375,00	-
2	Tanah	2.302.109.905.449,00	2.302.109.905.449,00	-
3	Peralatan dan Mesin	568.440.548.093,00	568.440.548.093,00	-
4	Gedung dan Bangunan	833.845.886.323,00	833.845.886.323,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.986.611.820,00	22.986.611.820,00	-
6	Aset Tetap dlm Renov(ATR)	11.837.310.298,00	11.837.310.298,00	
7	Aset Tetap Lainnya	1.787.852.595,00	1.787.852.595,00	-
8	KDP	224.384.887,00	224.384.887,00	-
9	Aset Tak Berwujud	150.148.317.195,00	150.148.317.195,00	-
10	Aset Lain-Lain *)	45.898.772.635,00	45.898.772.635,00	-
TOTAL		3.949.012.125.670,00	3.949.012.125.670,00	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	31 Desember 2016	1.722.321.021.495,00		
2	31 Desember 2017	3.991.605.216.755,00	2.269.284.195.260,00	131,76
3	31 Desember 2018	4.132.204.607.112,00	140.599.390.357,00	3,52
4	31 Desember 2019	4.187.534.481.904,00	55.329.874.792,00	1,34
5	30 Desember 2020	3.950.769.706.634,00	(236.764.775.270,00)	(5,65)

2. Informasi Pengelola BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Golongan Barang	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah (m ²)	2.117.241.418.533,00	722.837.990.730,00
2	Peralatan dan Mesin	511.291.951.695,00	33.563.882.836,00
3	Gedung dan Bangunan	741.450.625.787,00	116.304.082.453,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.495.184.095,00	8.656.552.150,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.664.013.098,00	3.600.563.852,00
6	Aset Tak Berwujud	173.367.260.709,00	4.141.354.400,00
TOTAL		3.553.510.453.917,00	889.104.426.421,00

b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	4	2	3	-	9
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/ Kuasa Pengguna	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	6	2	9	-	17
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	10	2	12	-	24
8	Selesai serah terima	-	-	12	-	12
9	Gagal/Batal Proses	-	-	-	-	-

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

3. BMN dari dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (Neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (Neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1				
2				

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Intrakomptabel (Neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp228.000.000,00 (*Dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	228.000.000,00	0,00
2			
Total		228.000.000,00	0,00

b. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp13.500.000,00 (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut:

No	PerkiraanNeraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	0,00
2			
Total		13.500.000,00	0,00

7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	(107) Kantor Regional IX BKN Jayapura	13.500.000,00	0,00
Total		13.500.000,00	0,00

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kantor Regional IX BKN Jayapura	228.000.000,00	0,00
Total		228.000.000,00	0,00

9. BMN Berupa BPYBDS

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1		
2		
Total		

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan serta langkah-langkah startegis yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN antara lain:

1. Aset berupa gedung dan bangunan masih terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Nomor. S-4130/A/144/1992, tanggal 28 oktober 1992, Kantor Regional III BKN Bandung telah mengajukan permohonan peminjaman tanah tersebut. Departemen Keuangan telah menanggapi dengan surat Nomor: 432/I/1992 dan Surat Kepala PPDIA Bandung tanggal 22 September 1992 tentang Hak Guna Tanah. Akan tetapi permohonan pinjam pakai tersebut belum terealisasi.

11. Langkah-langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian adalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Badan Kepegawaian Negara, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DJKN dan KPKNL sebagai pembina Penatausahaan BMN.
- b. Melakukan sosialisasi peraturan penatausahaan BMN kepada satker-satker dan stakeholder terkait.
- c. Melakukan penatausahaan pengelolaan BMN lebih cermat dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

VI. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- I. *“Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah pusat/Daerah.”*
- II. *“Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”*

Dalam rangka mewujudkan Penyajian BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

- a. Tanah.
- b. Gedung dan Bangunan.
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:
 - 1) Jalan dan Jembatan.
 - 2) Bangunan Air.

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan Kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 sebagaimana telah disampaikan Pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan per 12 Oktober 2018, Badan Kepegawaian Negara telah melakukan Penilaian Kembali dengan jumlah objek sebanyak 506 NUP BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3.329.061.353.078,00 (*Tiga triliun tiga ratus dua puluh sembilan milyar enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah*) Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.378.717.956.954,00 (*Dua triliun tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) atau 245,56% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp968.495.408.902,00 (*Sembilan ratus enam puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus dua rupiah*). Selain itu terdapat BMN tidak ditemukan sebesar Rp18.152.012.778 (*Delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*). Dari 506 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 479 NUP dapat dipastikan keberadaannya (Ditemukan), sebanyak 19 NUP tidak dapat ditemukan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, dan sebanyak 8 NUP ditemukan belum tercatat dalam SIMAK BMN (Berlebih).

Inventarisasi (NUP)				Penilaian (Nilai)			
Ditemukan	Tdk Ditemukan	Berlebih	Total	Nilai Buku	Tidak Ditemukan	Perubahan	Nilai Wajar
479	19	8	506	968.495.408.902,00	18.152.012.778,00	2.378.717.956.954,00	3.329.061.353.078,00

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Badan Kepegawaian Negara
Per 31 Desember 2017

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN			
			Nilai Buku Administrasi	Tidak Ditemukan	Nilai Wajar	Perubahan
1	Tanah	48	416.028.199.119,00	1.250.132.550,00	2.513.537.956.333,00	2.098.759.889.764,00
2	Gedung dan Bangunan	417	544.571.303.355,00	16.314.284.085,00	809.811.316.000,00	281.554.296.730,00
3	Jalan Jembatan dan Bangunan Air	41	7.895.906.428,00	587.596.143,00	5.712.080.745,00	(1.596.229.540,00)
	Total	506	968.495.408.902,00	18.152.012.778,00	3.329.061.353.078,00	2.378.717.956.954,00

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Kuasa Pengguna Barang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan.
2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN.
3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, selama tahun 2019 telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Total perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Negara selama tahun 2019 adalah sebanyak 368 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp3.238.565.698.008,00 (*Tiga triliun dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh deapan ribu*

delapan rupiah) atau mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp11.987.275.008,00 (*Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan rupiah)* atau 0.37% apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp3.226.578.423.000,- (*Tiga triliun dua ratus dua puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	33	2.479.189.952.000,00	2.496.719.360.000,00	17.529.408.000,00	0,71%
2	Gedung dan Bangunan	307	740.490.717.000,00	728.355.951.008,00	(12.134.765.992,00)	(1,64%)
3	Jalan Jembatan dan Bangunan Air	28	6.897.754.000,00	13.490.387.000,00	6.592.633.000,00	95,58%
	TOTAL	368	3.226.578.423.000,00	3.238.565.698.008,00	11.987.275.008,00	0,37%

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas telah disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2019 Audited dengan nilai koreksi sebesar Rp3.238.565.698.008,00 (*Tiga triliun dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah*)

Atas sisa objek yang belum dilakukan perbaikan, Badan Kepegawaian Negara selaku Pengguna Barang bersama-sama dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi proses bisnis maupun dari sisi pelaksanaannya demi menghasilkan revaluasi yang tuntas dan berkualitas, sehingga dapat menciptakan neraca pemerintah yang update, reliable, dan kredibel.

Adapun sisa target perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang harus diselesaikan dan dituntaskan di tahun 2020 pada Kementerian. adalah sebanyak 137 NUP.

Hasil perbaikan atas Penilaian Kembali BMN yang dilakukan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara selama tahun 2020 per posisi 31 Desember 2020 adalah sebanyak 137 NUP dengan rincian sebagai berikut:

[illegible]

VII.TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2019

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Tahun 2019, terdapat temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset tetap dan Aset tak Berwujud. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2019 pada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlampir.

NO	URAIAN TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Terdapat belanja peralatan dan mesin direalisasikan menggunakan anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (MAK 523121) senilai Rp68.306.800,00 berupa 1 paket sound system, aset tersebut tidak tercatat pada neraca/laporan BMN (understated nilai peralatan dan mesin)	Sudah dilakukan pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2019
2	Terdapat kelebihan pembayaran kegiatan belanja modal Pekerjaan Renovasi Ruang Utility dan Staf Lantai 11 Gedung 2 Kantor Pusat BKN senilai Rp10.961.804,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga terjadi overstated untuk nilai Gedung dan Bangunan	Sudah dilakukan perbaikan pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2019
3	Terdapat belanja barang (MAK 521811) yang seharusnya direalisasikan untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin total senilai Rp24.618.000,00, sehingga terjadi understated untuk nilai peralatan dan mesin	Sudah dilakukan perbaikan pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2019
4	Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Hydrant sebesar Rp3.769.800,00	Telah dilakukan koreksi nilai BMN sebesar Rp3.769.800,00 pada tanggal buku 31/12/2019
5	Kantor Regional X BKN Denpasar belum memiliki mekanisme Pengendalian Perawatan Pekerjaan Air Conditioner (AC)	Pada tahun 2020 telah dikembangkan aplikasi pembantu berbasis web untuk mencatat Pengiriman ekspedisi (untuk surat keluar), permohonan pemakaian kendaraan dinas, dan permohonan untuk pemeliharaan BMN
6	Kasubbag Umum kurang cermat dan staf pengelola persediaan kurang cermat dalam melakukan pengelolaan aplikasi persediaan dan inventarisasi fisik persediaan	- Surat Kepala BKN Nomor 16.K/SP/KA/ VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Surat Perintah Kepala BKN Kepada Kepala Subbag Umum dan Staf Pengelola Persediaan agar lebih cermat dalam melakukan

NO	URAIAN TEMUAN	TINDAK LANJUT
		pengelolaan dan inventarisasi fisik persediaan - Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor: 061/KR.VII/BKN.K/ II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Surat Perintah Kepala Kanreg VII BKN Palembang kepada Kepala Subbag Umum dan Staf Pengelola Persediaan agar lebih optimal dan cermat dalam melakukan pengelolaan aplikasi dan inventarisasi fisik barang persediaan
7	Kanreg VII BKN Palembang belum memiliki standar dan prosedur baku penghitungan jumlah persediaan dalam bentuk bahan bakar minyak (solar)	- Lampiran Surat Sekretaris Utama BKN Nomor 32/KEP/SESMA/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan BBM (solar) - Membuat standar pengukuran volume pada tangki bahan bakar solar mesin genset Kanreg VII BKN Palembang
8	Belum ada SOP terkait pengelolaan dan penatausahaan PNB	Lampiran Surat Sekretaris Utama BKN Nomor 31/KEP/SESMA/2020 Tanggal 25 Juni 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan PNB Sewa Mess/Wisma dan Aula
9	Pengelola Wisma/Mess tidak tertib dalam menyampaikan laporan dan menyerahkan penerimaan uang sewa	Surat Kepala BKN Nomor 16.N/SP/KA/ VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Surat Perintah Kepala BKN kepada Pengelola Wisma/Mess agar lebih tertib dalam menyampaikan laporan dan menyerahkan penerimaan uang sewa kepada kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

NO	URAIAN TEMUAN	TINDAK LANJUT
10	Kepala Subbag Umum dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan dalam pengelolaan penyewaan mess/wisma belum berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	- Surat Kepala BKN Nomor 16.M/SP/KA/ VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Surat Perintah Kepala BKN kepada Kepala Subbag Umum dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan agar dalam pengelolaan penyewaan mess/wisma berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku - Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 062/KR.VII/BKN.K/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Surat Perintah Kepala Kanreg VII BKN Palembang kepada Kepala Subbag Umum dan Staf Pengelola Persediaan agar berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan penyewaan mess/wisma

Penanggungjawab
Laporan Pengguna Barang Tahunan
per 31 Desember 2020
Kepala Badan Kepegawaian Negara


BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN XI

Monitoring Tindak Lanjut Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindak Lanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
1	2011	Pengelolaan dan Peranggungjawaban Keuangan BA 999.08 TA 2010 pada BKN di Jakarta	Kelebihan pembayaran sebesar Rp12,15 juta untuk pengiriman SK asli dan tembusan SK penyesuaian pokok pensiun pensiunan PNS dan janda/dudanya (impasing)	merekomendasikan Kepala BKN agar segera menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp12.152.000,00 dan menyerahkan ke Kas Negara serta menyampaikan copy bukti setor kepada BPK. (Dit. Pensiun)	PTL Sem II Tahun 2020 : Terdapat surat Kepala Biro Umum Nmor 2589.A/ROIM/XI/2020 kepada Kepala Kantor Regional IV PT Pos Indonesia (persero) tentang tindak lanjut atas temuan BPK Tahun 2010 yang berisikan PT Pos Indonesia untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran pengiriman SK asli dan tembusan SK penyesuaian pokok pensiun pensiunan PNS dan janda/dudanya sebesar Rp12.152.000,00	Belum Sesuai	-----	1. Koordinasi dengan PT POS; 2. Mengecek ulang aplikasi impasing untuk jumlah kelebihan pengiriman dokumen.
2	2015	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2014	Aset Tetap Tanah atas Bangunan Rumah Negara Golongan III Tidak Tercatat dalam Neraca BKN Tahun 2014	BPK merekomendasikan Kepala BKN agar Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Aset Tetap Tanah yang dasarnya berdiri bangunan Rumah Negara Golongan III dengan bukti sertifikat atas nama BKN dan belum terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum, dan melakukan koreksi pencatatan berdasarkan hasil IP oleh DJKN. (Biro Umum)	2/1/2016 12:00:00 AM - Surat Kementerian Keuangan No.S-2708/AG/2015 tanggal 17 November 2015 [2016-0106 17:16:42]	Belum Sesuai	BKN belum melaporkan dokumen koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Aset Tetap Tanah yang dasarnya berdiri bangunan Rumah Negara Golongan III dengan bukti sertifikat atas nama BKN dan belum terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum. PTL Sem II Tahun 2020 : Terdapat satu dari 11 bukti pelunasan dan sertifikat telah atas nama pihak penyewa-beli atas rumah dinas yaitu atas nama Yuliana Tandi dengan nomor rumah negara 04-39B. Tetap Tanah yang dasarnya berdiri bangunan Rumah Negara Golongan III dengan bukti sertifikat atas nama BKN dan belum terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum.	1. Meminta sisa dokumen bukti sertifikat hak milik atas nama pembeli sebanyak 10 dokumen. 2. Melakukan penilaian kembali.
3	2015	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2014	Penatausahaan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin di BKN Belum Terlib	BPK merekomendasikan Kepala BKN agar: a. Menginstruksikan KPB pada BKN Kantor Pusat, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN Jakarta, dan Kanreg XII BKN Pekanbaru melakukan inventarisasi ulang BMN dan meng-update pencatatan BMN sesuai dengan hasil inventarisasi dan kondisi yang sebenarnya, kemudian melaporkan hasilnya ke BPK. (Biro Umum, Kanreg IV, Kanreg V, Kanreg XII)	6/29/2015 12:00:00 AM - Surat Perintah Kepala BKN Kepada KPB BKN Kantor Pusat, KPB Kanreg IV BKN Makassar, KPB Kanreg V BKN Jakarta, dan KPB Kanreg XII BKN Pekanbaru Nomor K 26-30/V 66-399 Tanggal 29 Juni 2015 agar melakukan inventarisasi ulang BMN dan meng-update pencatatan BMN sesuai dengan hasil inventarisasi dan kondisi yang sebenarnya, kemudian melaporkan hasilnya ke BPK. Semester I Tahun 2021 1. Hasil Inventarisasi Kanreg IV Makassar 2. Hasil Inventarisasi Kanreg XII Pekanbaru 3. Hasil Inventarisasi Kanreg V Jakarta	Belum Sesuai	Sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai. Belum disampaikan Laporan Hasil Inventarisasi Ulang BMN pada BKN Kantor Pusat, Kanreg IV, Kanreg V, dan Kanreg XII. [Semester I 2021] Telah terlampir untuk Kanreg IV Makassar, Kanreg V Jakarta, dan Kanreg XII Pekanbaru	1. Biro Umum akan melaporkan hasil inventarisasi BMN;
4	2015	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2014	Pengelolaan Rumah Negara pada Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg XII BKN Pekanbaru Belum Sesuai Ketentuan Pengelolaan Rumah Negara pada Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg XII BKN Pekanbaru Belum Sesuai Ketentuan.	a. Menginstruksikan Kepala Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg XII BKN Pekanbaru untuk mendaftarkan Rumah Negara dan mess sebagai objek PBB ke Dinas Pendapatan Provinsi dan meminalikan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan perhitungan PNPB atas pemanfaatan Rumah Negara setelah diterbitkan SPPT PBB. (Kanreg V, Kanreg XII) b. Menginstruksikan Kepala Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg XII BKN Pekanbaru untuk mendaftarkan Rumah Negara dan mess sebagai objek PBB ke Dinas Pendapatan Provinsi dan meminalikan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan perhitungan PNPB atas pemanfaatan Rumah Negara setelah diterbitkan SPPT PBB. 2) Bukti pendaftaran Rumah Negara di Kanreg XII Pekanbaru Semester I Tahun 2021: Kanreg V DKI menyampaikan Surat Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan Ketetapan PBB atas Rumah Negara menjadi satu kesatuan dengan Tanah dan Bangunan Kanreg V Jakarta.	2/1/2016 12:00:00 AM - 1) Surat Perintah Kepala BKN Kepada Kepala Kanreg V BKN Jakarta, dan Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru Nomor K 26-30/V 67-199 Tanggal 29 Juni 2015 untuk mendaftarkan Rumah Negara dan mess sebagai objek PBB ke Dinas Pendapatan Provinsi dan meminalikan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan perhitungan PNPB atas pemanfaatan Rumah Negara setelah diterbitkan SPPT PBB. 2) Bukti pendaftaran Rumah Negara di Kanreg XII Pekanbaru Semester I Tahun 2021: Kanreg V DKI menyampaikan Surat Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan Ketetapan PBB atas Rumah Negara menjadi satu kesatuan dengan Tanah dan Bangunan Kanreg V Jakarta.	Belum Sesuai	Belum ditindaklanjuti karena belum diterbitkan SPPT PBB. [Semester I 2021] Kanreg V DKI menyampaikan bahwa SPPT PBB Rumah Dinas merupakan satu kesatuan dengan SPPT PBB Tanah Bangunan perkantoran.	1. Kanreg V Jakarta akan melaporkan SPPT PBB; 2. Kanreg XII Pekanbaru belum melaporkan SPPT PBB.

No	Tahun LHPS	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakan/jut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
5	2016	Laporan Keuangan Badan Kepogawatan Negara Tahun 2015	Kelabihan Pembayaran 11 Paket Pekerjaan pada Kantor Pusat BKN dan Kantong IX BKN Jayapura sebesar Rp422,56 juta	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp151.987.219,47 dari pihak penyedia untuk disetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK. (Biro Umum, Pushang). Sisa Rp50.535.639 11.413.160 R.Humas 5.740.685 R.Partisi Lt.10 3.465.435 R.Kerja Kalasi 29.916.359,47 R.ruh Jabatan & Guest House Pushang	6/24/2016 12:00:00 AM - Surat perintah Kepala BKN No 27/UKS-VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Kepala BKN ke Kepala Biro Umum untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 151.987.219,47 [2016-06-24 12:29:03] Per Semester I 2019 : Telah di setor Rp49.335.080 NTPN 65A6C1 ILAGP15R08 tanggal 28 Januari 2019 terkait kurang volume pekerjaan sarana dan prasarana gedung pushang ASN tahun 2015 12/31/2019 12:00:00 AM - Telah disetor Rp 9.250.000 NTPN ESB015TCUJURQ652 tgl 22 Januari 2019 CV. Samudra Jaya Semester I 2020 Surat Peringatan dari PPK Biro Umum BKN untuk menyertorkan ke kas negara kepada penyedia, dengan rincian: 1. Surat Peringatan Nomor 226/ROUM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk CV. Dwi Cemerlang (UP Bapak Anto) sebesar 11.413.160 2. Surat Peringatan Nomor 229/ROUM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk CV. Dwi Cemerlang (UP Bapak Anto) sebesar 3.465.435 3. Surat Peringatan Nomor 227/ROUM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk PT Gumba Sondang Primaliana (UP Bapak Suyoto) sebesar 29.916.359,47 4. Surat Peringatan Nomor 228/ROUM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk CV GM (UP Bapak Anto) sebesar 5.740.685 12/9/2016 12:00:00 AM - Telah di setor Rp. 2.866.500,- NTPN 75E875DHLIR6H4IP tanggal 11 Okt 2016 Semester I 2021 Telah disetor Total Rp20.619.280 ke Kas Negara dgn rinci sbb : 1. NTPN B390E6UE2A0MIAR 11.413.160 CV Dwi Cemerlang tgl 18-02-2021 10:20:27 2. NTPN 241D21JNF2RMSINY 5.740.685 CV Galvin Mitra Tama tgl 18-02-2021 10:20:45 3. NTPN 4EDBE2G4UTE2LJQK 3.465.435 CV Dwi Cemerlang tgl 18-02-2021 10:20:12	Belum Sesuai	Semester I 2021 Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, masih kurang setor Rp29.916.359,47 (Pushang).	Pushang akan melakukan penyetoran kelebihan pembayaran.

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindak lanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
6	2016	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembinaan/Pengembangan Aplikasi dan Pekerjaan Pemeliharaan Komputer Sebesar Rp141,84 Juta	BPK merekomendasikan Kepala BKN agar mempertanggungjawabkan kewajiban pembayaran biaya personil Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik dan Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik sebesar Rp334.750.000,00 yang tidak diyakini dengan disertai bukti-bukti yang sah dan valid. Selanjutnya menerbitkan Inspektorat BKN untuk meneliti kebenaran bukti-bukti dimaksud dan apabila ditemukan adanya kerugian negara agar diproses penyetoran ke Kas Negara sesuai ketentuan. (Pusbang)	6/23/2016 12:00:00 AM - Surat perintah Kepala BKN No 33/II/Ka/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Kepala BKN ke Panitia Pengadaan Aplikasi Manajemen Diklat dan Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik mempertanggungjawabkan kewajiban pembayaran biaya personil yang tidak diyakini dengan disertai bukti-bukti yang sah dan valid dan menyerahkan bukti tersebut ke Inspektorat BKN dan Surat perintah Kepala BKN No 34/II/Ka/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Kepala BKN ke Inspektorat meneliti kebenaran bukti-bukti pembayaran biaya personil aplikasi manajemen diklat dan pekerjaan pengembangan aplikasi pelayanan publik sebesar Rp 334.750.000,00 12/9/2016 12:00:00 AM - Laporan hasil Evaluasi No. 34/S/INS/VI/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016 09 December 2016 11:51:43 Semester I Tahun 2021 Telah disetor Rp16.600.000,- dengan rincian: 1. NTPN B7DA0608E2741P5J tgl 21-01-2021 14:28:43 Rp14.400.000,- 2. NTPN EE9A555DED2B7TSV tgl 21-01-2021 14:30:19 Rp2.200.000,-	Sesuai	Dalam LHA terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp16.600.000,00. (Semester I 2021) Telah disetor Rp16.600.000,-	Telaah sesuai
7	2016	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) dan Tenaga Keamanan (Satpam) pada Kaneg IX BKN Jayapura, Kaneg XI BKN Manado, Kantor Pusat BKN, dan Pusbang ASN BKN Sebesar Rp246,44 Juta	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menarik kelebihan pembayaran untuk disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas Kelebihan pembayaran tiga paket pekerjaan jasa cleaning service dan tenaga satpam Kantor Pusat BKN dan Pusbang ASN sebesar Rp48.064.788,00 dari PT PAJ dan PT CJS. (Biro Umum, Pusbang) Sisa Rp239.064.788 PT PJA Rp21.400.000 (Pusbang) PT CJS Rp8.475.210 (Biro Umum) PT CJS Rp9.189.578 (Pusbang)	6/23/2016 12:00:00 AM - Surat perintah Kepala BKN No 33/II/Ka/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Kepala BKN ke Kepala Biro Umum untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 48.064.788,00 Semester I 2020 Telah di setor ke Kas Negara PT PJA Rp5.000.000,- NTPN 49BDFLINEHSN7LVV tanggal 26 Des 2019 Telah di setor ke Kas Negara PT CJS Rp4.000.000,- NTPN 4CA9048VUDSSERUM tanggal 26 Des 2019 Semester I 2021 Telah disetor ke Kas Negara : - PT PJA Rp2.500.000 dengan rincian NTPN AC7848N3DEMEOSI9 tgl 10 Agustus 2020 dan NTPN 1853E48VU9O20000 tgl 29 Juli 2020; -PT CJA Rp2.500.000 dengan rincian NTPN 73881LINEQ3BCGRJ tgl 10 Agustus 2020 dan NTPN 2869061QIUSRIPIFU tgl 29 Juli 2020;	Belum Sesuai	(Semester I 2021) Pada Semester II 2020 terdapat penyetoran sebesar total Rp55 juta yang tertinggal untuk dilaporkan. Sehingga pada Semester I 2021 terdapat Rp34.064.788 PT PJA Rp18.500.000 PT CJS Rp8.475.210 PT CJS Rp9.689.578	Biro Umum dan Pusbang akan mengembalikan kelebihan pembayaran.

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindaklanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
8	2016	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) dan Tenaga Keamanan (Satpam) pada Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg XI BKN Manado, Kantor Pusat BKN, dan Pusbang ASN BKN Sebesar Rp246,44 Juta	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menarik kelebihan pembayaran untuk disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas kelebihan pembayaran pengadaan satpam Kanreg XI BKN Jayapura sebesar Rp49.548.000,00 dari PT TU. (Kanreg IX Jayapura)	6/23/2016 12:00:00 AM - Surat perintah Kepala BKN No 39/I/Ka/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Kepala BKN ke Kanreg IX BKN Jayapura untuk menarik kelebihan pembayaran Rp 49.548.000,00 1/28/2019 12:00:00 AM - Per Semester I 2018 : Surat Kepala Kantor Regional IX Jayapura kepada Direktur Tosari dengan surat No. 196/KR IX/IX/2017 tanggal 1 September 2017 perihal Surat Tagihan Pembayaran atas kelebihan pembayaran pengadaan Satpam. Semester I 2020: 1. Surat Inspektur 47.A/S/INSP/VI/2020 tanggal 18 Mei 2020 untuk meniadakan pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan satpam Kanreg XI BKN Jayapura sebesar Rp49.548.000,- dari PT TU. 2. Surat Kanreg Jayapura Kepala PT Tosari Nomor 111/KR IX/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 untuk meniadakan segera kelebihan pembayaran pengadaan satpam Kanreg XI BKN Jayapura sebesar Rp49.548.000,-	Belum Sesuai	Belum terdapat penytoran	Sedang konfirmasi Rencana Aksi dari Kanreg Jayapura
9	2016	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) dan Tenaga Keamanan (Satpam) pada Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg XI BKN Manado, Kantor Pusat BKN, dan Pusbang ASN BKN Sebesar Rp246,44 Juta	BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan pihak penyedia untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran kepada Tenaga cleaning service dan tenaga satpam Kantor Pusat BKN dan Pusbang ASN sebesar Rp72.055.103,00, serta meminta bukti pembayaran tersebut kepada PT SAS, PT PAJ, dan PT CIS dan disampaikan ke BPK.	6/23/2016 12:00:00 AM - Surat perintah Kepala BKN No 40/I/Ka/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Kepala BKN ke Kepala Biro Umum untuk memerintahkan pihak penyedia untuk menyelesaikan pembayaran sebesar Rp 72.055.103,00	Belum Sesuai	Belum ada penytoran kelebihan pembayaran cleaning service, hanya Surat Perintah Kepala BKN kpd Ka Biro Umum	Biro Umum sedang meminatkan ke penyedia terkait bukti pembayaran.

Jakarta, 22 Februari 2021
Mengetahui
Plt. Inspektur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Andi Anto, S.Sos, MH., M.AP
NIP. 197309101994031001



LAMPIRAN XII

Telaah Laporan Keuangan

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KL
PERIODE TAHUNAN TA 2020 (*Audited*)

Kode BA dan Nama BA : (088) Badan Kepegawaian Negara

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP	√	
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√	Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	√	Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	√	Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrua	√	Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√	Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2018?	√	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		√
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	√	Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	√	Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (<i>Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref</i>)		√
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (<i>Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"</i>), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		√
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		√
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i>)		√

AKUN Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2019? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan)	N/A		Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A		Tidak
Sehubungan terbitnya Surat S-1815/PB/2019 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	N/A		Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		✓	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		✓	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap	✓		Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		✓	Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	N/A		Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	✓		Ya
saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon				
AKUN 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTm secara absolut tsb ?				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	(447.186.708)		
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan <i>kecuali</i> BA.015.04 ?		✓	Tidak

Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A		Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"	N/A		Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A		Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	1.443.177.778		
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	951.528.796		
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	491.648.982		
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)	√		Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				

6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang **dapat** bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"	√		Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
-------------------------	----	-------	------------

Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119

1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
---	---	--	----

Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?	√		Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adakah			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	√		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	√		Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?	√		Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			

Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)			
3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	√		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")	√		
MENU DAFTAR BMN	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak	√	
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Buku Minus? (diisi jumlah NUP)			NUP 3, NUP 4 dan NUP 5
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Buku Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2018 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	√		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	√		
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2019</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun Belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		√	Tidak

6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	N/A	Ya	
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	✓	Ya	
8.		Ya	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK (Neraca Percobaan)	✓		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	✓		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	N/A		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	✓		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	N/A		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	✓		Ya
9. Apakah belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	✓		Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	✓		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	✓		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	✓		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan beban persediaan terlampir)	✓		Ya
<i>Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.</i>			
5. Apakah terdapat			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN			
1 Terdapat penjurnalan akun "Aset Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban berupa pencatatan beban aset ekstrakomptabel pada Kantor Regional III BKN Bandung berupa pembelian Peralatan dan Mesin dengan pembelian dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp945.000,00; pencatatan beban aset ekstrakomptabel pada Pusbang ASN berupa pembelian Peralatan dan Mesin dengan pembelian dibawah nilai kapitalisasi sejumlah Rp56.925.000,00; pencatatan beban aset ekstrakomptabel pada Kantor Pusat BKN berupa pembelian Peralatan dan Mesin dengan pembelian dibawah nilai kapitalisasi sejumlah Rp625.800,00; dan pencatatan beban aset ekstrakomptabel pada Kantor Regional II BKN Surabaya berupa pembelian Peralatan dan Mesin dengan pembelian dibawah nilai kapitalisasi sejumlah Rp8.048.150,00 2 Terdapat selisih nilai antara Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Neraca Percobaan sebesar Rp447.186.708,00 yang merupakan transaksi atas adanya transfer masuk dari Kantor Kementerian Agama Kota Ternate kepada Kantor Regional XI BKN Manado berupa Gedung dan Bangunan 3 Terdapat selisih nilai pendapatan nilai penyesuaian nilai persediaan dengan beban penyesuaian nilai persediaan yang cukup besar yaitu Rp491.648.982,00 dikarenakan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan dari pembelian belanja persediaan di satker Kantor Pusat BKN			

- 4 Terdapat nilai selisih revaluasi aset pada Laporan Perubahan Ekuitas di 6 (enam) satker yaitu Kantor Pusat BKN Jakarta, Kantor Regional I BKN Jogjakarta, Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, dan Kantor Regional VII BKN Palembang
- 5 Terdapat jurnal tidak lazim yang terdiri dari Jurnal Pencatatan Hibah Langsung Tahun 2020 yang diterima oleh Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp169.000.000,00 dan Jurnal Pencatatan Utang Kepada Pihak Ketiga untuk Pencatatan Nilai Aset Tanah sebesar Rp98.230.000,00 yang pekerjaannya telah dilakukan di Tahun 2020 namun pembayarannya dilakukan di Tahun 2021
- 6 Atas analisis Laporan Keuangan Lainnya, berupa Realisasi Belanja Belanja 53 sebesar Rp38.698.295.359,00 pada LRA tidak sama dengan penjumlahan transaksi Pembelian Aset Tetap sebesar Rp23.939.984.884,00 ditambah transaksi Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp768,913,631,00 ditambah transaksi Pengembangan KDP sebesar Rp6.782.218.746,00 dan ditambah transaksi Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp7.473,141,160,00 dengan total Transaksi Penambahan Aset sebesar Rp38.964.258.421,00. Atas selisih tersebut sebesar Rp265.963.062,00 merupakan nilai yang berasal dari penambahan aset tetap yang diperoleh dari Belanja Barang pada Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp105.117.012,00 dan Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp129.160.000,00 serta penambahan aset tetap yang berasal dari utang kepada pihak ketiga pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh sebesar Rp98.230.000,00 dikurangi dengan pembelian aset tetap yang dibawah nilai kapitalisasi (pembelian aset ekstrakomptabel) sebesar Rp66.543.950,00 yang berasal dari Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp945.000,00; Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp625.800,00; Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp8.048.150,00 dan Pusat Pengembangan ASN sebesar Rp56.925.000,00.
- 7 Terdapat ketidaksesuaian dengan L-BMN berupa selisih saldo pada rekon internal bulan Desember di aplikasi e-rekon yang ada pada Kantor Regional X BKN Denpasar, dimana nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp388.893.886,00, namun tidak terdapat selisih nilai pada Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAK (dokumen terlampir).

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,



Nuruzakiyati, SE, M.Ak

NIP 19850317 200801 2 004

Jakarta, 27 April 2021

Penelaah,



Eka Desi Lestari

NIP 19881202 201012 2 001

LAMPIRAN XIII

Nota Kesepakatan Final

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPAGAWAIAN NEGARA (BA 088) TAHUN 2020
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (AUDITED)**

Nomor : NKF-088/08/PB.6/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 April 2021, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rekonsiliasi Tiga Pihak untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun 2020, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun 2020 dan untuk dikonsolidasikan dalam LKPP Tahun 2020 (*Audited*).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Badan Kepegawaian Negara menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara) **paling lambat tanggal 5 Mei 2021**.

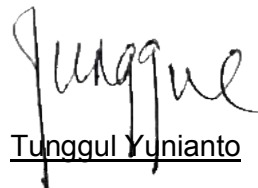
PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Badan Kepegawaian Negara
Selaku Tim Penyusun LKKL



Wahyu

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Tunggul Yunianto

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Febriano Singawiria

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK



Adila Amri Pratama

K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BA : 088

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED - REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.205.725					2.205.725
Kas di Bendahara Penerimaan	-					-
Kas Lainnya dan Setara kas	-	4.071.600				4.071.600
Kas pada BLU	-					-
Investasi Jangka Pendek BLU	-					-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	28.082.472		8.823.160			19.259.312
Uang Muka Belanja (prepayment)	-					-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-					-
Piutang Perpajakan	-					-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-					-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	0	0			-
Piutang Bukan Pajak	456.699.372	56.119.280	456.699.372			56.119.280
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	(362.382.832)	362.382.832	3.816.428			(3.816.428)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	94.316.540	418.502.112	460.515.800			52.302.852
Bagian Lancar TPA	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-					-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	0	0			-
Bagian Lancar TP/TGR	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-					-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	0	0			-
Piutang dari Kegiatan BLU	-					-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-					-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	0	0			-
Persediaan	12.572.708.925	8.328.067	848.500.617			11.732.536.375
Jumlah Aset Lancar	12.697.313.662	430.901.779	1.317.839.577	-	-	11.810.375.864
ASET TETAP						
Tanah	2.558.844.628.449		256.734.723.000			2.302.109.905.449
Peralatan dan Mesin	568.422.684.993	31.363.100	13.500.000			568.440.548.093
Gedung dan Bangunan	844.539.026.198	234.277.012	10.927.416.887			833.845.886.323
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	22.986.611.820					22.986.611.820
Aset Tetap Lainnya	13.625.162.893					13.625.162.893
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	224.384.887				224.384.887
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(487.606.603.974)	361.690.250	136.606.378			(487.381.520.102)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(88.472.298.758)	2.247.801.270	11.439.402			(86.235.936.890)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(16.175.754.222)					(16.175.754.222)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.300.175.866)		4.200.258.899			(5.500.434.765)
Jumlah Aset Tetap	3.414.863.281.533	3.099.516.519	272.023.944.566	0	0	3.145.938.853.486
PIUTANG JANGKA PANJANG						
Tagihan Penjualan Angsuran	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-					-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	0	0			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-					-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	0	0			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jang	-					-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	0	0			-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED - REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
ASET LAINNYA						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-					-
Aset Tak Berwujud	187.261.109.359		37.112.792.164			150.148.317.195
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	-					-
Dana Penjaminan	-					-
Dana Kelolaan BLU	-					-
Aset Lain-lain	8.662.000.721	37.282.149.164	45.377.250			45.898.772.635
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ke3	-					-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(8.613.929.823)	9.551.127	21.720.034			(8.626.098.730)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(178.201.861.005)	35.515.371.065				(142.686.489.940)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(27.814.150)	27.814.150	36.022.497.065			(36.022.497.065)
Jumlah Aset Lainnya	9.079.505.102	72.834.885.506	73.202.386.513	-	-	8.712.004.095
JUMLAH ASET	3.436.640.100.297	76.365.303.804	346.544.170.656	-	-	3.166.461.233.445
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang kepada Pihak Ketiga	1.554.332.951	30.000.000	13.071.600			1.537.404.551
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-					-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-					-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-					-
Hibah Yang Belum Disahkan	-					-
Uang Muka dari KPPN	2.205.725	0	0			2.205.725
Pendapatan Diterima Dimuka	533.658.360					533.658.360
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.090.197.036	30.000.000	13.071.600	-	-	2.073.268.636
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-					-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-					-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	2.090.197.036	30.000.000	13.071.600	-	-	2.073.268.636
EKUITAS	3.434.549.903.261	307.891.545.999	37.729.607.547			3.164.387.964.809
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.436.640.100.297					3.166.461.233.445

Jakarta, 14 April 2021

Badan Kepegawaian Negara

Wahyu

NIP 19700513 199103 1 001

Ditjen Kekayaan Negara

Tunggul Yuhianto

NIP 19710601 199301 1 001

Badan Pemeriksa Keuangan

Adila Amri Pratama

NIP 19870428 200801 1 001

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febriano Singawiria

NIP 19650216 198603 1 001

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 BA : 088

	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED		KOREKSI REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	-					-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-					-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-					-
Pendapatan Cukai	-					-
Pendapatan Pajak Lainnya	-					-
Pendapatan Bea Masuk	-					-
Pendapatan Bea Keluar	-					-
Pendapatan Pajak Lain-lain	-					-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Penerimaan Sumber Daya Alam	-					-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-					-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12.864.544.144					12.864.544.144
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12.864.544.144	-	-	-	-	12.864.544.144
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-					-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	12.864.544.144	-	-	-	-	12.864.544.144
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	298.300.216.854		30.000.000			298.270.216.854
Beban Persediaan	13.130.670.078	59.256.600	437.158.447			12.752.768.231
Beban Barang dan Jasa	144.760.520.255	17.823.160				144.778.343.415
Beban Pemeliharaan	29.203.992.952	40.040.000	234.285.462			29.009.747.490
Beban Perjalanan Dinas	69.392.561.983					69.392.561.983
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-					-
Beban Bunga	-					-
Beban Subsidi	-					-
Beban Hibah	-	-	-			-
Beban Bantuan Sosial	-					-
Beban Transfer	-					-
Beban Lain-lain	-					-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	85.907.317.618	1.433.605.113	1.211.868.122			86.129.054.609
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	22.906.533		24.774.000			(1.867.467)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	640.718.186.273	1.550.724.873	1.938.086.031	-	-	640.330.825.115
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(627.853.642.129)	(1.550.724.873)	(1.938.086.031)	-	-	(627.466.280.971)
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.054.945.850					1.054.945.850
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	483.247.600					483.247.600
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	571.698.250	-	-	-	-	571.698.250
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.956.412.650		1.141.781.202			1.814.631.448
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.083.605.326	36.261.645				1.119.866.971
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.872.807.324	(36.261.645)	1.141.781.202	-	-	694.764.477
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2.444.505.574	(36.261.645)	1.141.781.202	-	-	1.266.462.727

	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED		KOREKSI REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
POS LUAR BIASA						
Pendapatan Luar Biasa	-					-
Beban Luar Biasa	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(625.409.136.555)	(1.586.986.518)	(796.304.829)	-	-	(626.199.818.244)

Jakarta, 14 April 2021
Badan Kepegawaian Negara

Wahyu
NIP 197005131991031001

Ditjen Kekayaan Negara

Tunggul Yunianto
NIP 197106011993011001

Badan Pemeriksa Keuangan

Adila Amri Pratama
NIP 198704282008011001

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febriano Singawiria
NIP 196502161986031001

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2020
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : NKF-088/08/PB.6/2021
Tanggal : 14 April 2021

K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BA : 088

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED REVAL	ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT		
EKUITAS AWAL	3.472.135.583.010				3.472.135.583.010
SURPLUS/DEFISIT LO	(625.409.136.555)	1.586.986.518	796.304.829		(626.199.818.244)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS					
Penyesuaian Nilai Aset	-				-
Koreksi Nilai Persediaan	-				-
Selisih Revaluasi Aset	14.577.025.804			-	14.577.025.804
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(8.051.480.214)	306.197.891.834	36.916.435.259		(277.332.936.789)
Koreksi Atas Reklasifikasi	23.012.500	36.812.500	13.800.000		-
Koreksi Lain-lain	(109.357.120)	69.855.147	3.067.459		(176.144.808)
LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	6.439.200.970	306.304.559.481	36.933.302.718	-	(262.932.055.793)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	581.384.255.836	-	-	-	581.384.255.836
Ditagikan ke Entitas Lain	595.325.743.616	-			595.325.743.616
Diterima dari Entitas Lain	(14.667.031.603)				(14.667.031.603)
Transfer Keluar	(2.291.697.310)				(2.291.697.310)
Transfer Masuk	2.738.884.018				2.738.884.018
Pengesahan Hibah Langsung	169.000.000				169.000.000
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-				-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	109.357.115				109.357.115
Setoran Surplus BLU	-				-
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(37.585.679.749)	307.891.545.999	37.729.607.547	-	(307.747.618.201)
EKUITAS AKHIR	3.434.549.903.261	307.891.545.999	37.729.607.547	-	3.164.387.964.809

Jakarta, 14 April 2021

Badan Kepegawaian Negara

Wahyu

NIP 19700513 199103 1 001

Ditjen Kekayaan Negara

Tjunggul Yurianto

NIP 19710601 199301 1 001

Badan Pemeriksa Keuangan

Adila Amri Pratama

NIP 19870428 200801 1 001

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febriano Singawiria

NIP 19650216 198603 1 001

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN

Kode Bagian Anggaran : 088
Uraian Bagian Anggaran : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2-5+6	10 = 3-7+8	11 = 9-10
41. Pendapatan Perpajakan	-	-	-					-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	14.685.031.603	18.000.000	14.667.031.603	-	-	-	-	14.685.031.603	18.000.000	14.667.031.603
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-					-	-	-
422. Pendapatan dari KND	-	-	-					-	-	-
425. Pendapatan PNPB Lainnya	14.685.031.603	18.000.000	14.667.031.603					14.685.031.603	18.000.000	14.667.031.603
424. Pendapatan BLU	-	-	-					-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-					-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	14.685.031.603	18.000.000	14.667.031.603	-	-	-	-	14.685.031.603	18.000.000	14.667.031.603

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN				KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+6-7	11 = 4+8-9	12 = 10-9
51	Belanja Pegawai	298.324.742.821	78.585.047	298.246.157.774	-	-	-	-	298.324.742.821	78.585.047	298.246.157.774
52	Belanja Barang dan Jasa	259.380.720.006	999.429.523	258.381.290.483					259.380.720.006	999.429.523	258.381.290.483
53	Belanja Modal	38.698.295.359	-	38.698.295.359					38.698.295.359	-	38.698.295.359
54	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	-	-	-					-	-	-
55	Belanja Subsidi	-	-	-					-	-	-
56	Belanja Hibah	-	-	-					-	-	-
57	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-					-	-	-
58	Belanja Belanja Lain-lain	-	-	-					-	-	-
TOTAL BELANJA		596.403.758.186	1.078.014.570	595.325.743.616	-	-	-	-	596.403.758.186	1.078.014.570	595.325.743.616

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Wahyu
NIP 19700513 199103 1 001

Denny Febriano Singawiria
NIP 19650216 198603 1 001

Adila Amri Pratama
NIP 19870428 200801 1 001

BAGIAN ANGGARAN : 088

Tanggal : 14 April 2021

PAGU KEMENTERIAN/LEMBAGA	BELANJA BARANG				BELANJA MODAL				BELANJA BANTUAN SOSIAL				KETERANGAN
	AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		
	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	
Total Pagu adalah	521131	2.862.493.708			532119	3.137.039.305			571114				Realisi Belanja Barang untuk
Rp19.011.258.000, terdiri dari	521241	864.186.328			533119				571115				Penanganan Pandemi COVID-19
Pagu Belanja Barang-	521731				536118				572114				berupa pembelian hand sanitizer,
Penanganan Pandemi COVID-19	521841	2.606.190.586			537122				572115				pembelian Alat Perlengkapan Diri
sebesar Rp15.626.513.000	522192	5.514.311.819			537123				573114				(APD), pengadaan rapid test dan
Pagu Belanja Modal-	523114	159.636.310			537125				573115				swab test, pembelian thermogun,
Penanganan Pandemi COVID-19	524115	1.622.332.613							574114				penyemprotan disinfektan,
sebesar Rp3.384.745.000	525152								574115				pembelian lisensi aplikasi <i>video</i>
	525153								575114				<i>conference</i> , dan pengadaan
	525154								575115				persediaan pencegahan wabah
	525155								576114				COVID-19
	525156								576115				Realisasi Belanja Modal untuk
	526131								576116				Penanganan Pandemi COVID-19
	526132												berupa pengadaan <i>infrared</i>
	526321												<i>thermometer</i> , <i>thermal imaging</i>
	526322												<i>camera</i> , wastafel portabel, dan bilik
	526323												sanitasi
SUB TOTAL		13.629.151.364		0		3.137.039.305		0		0		0	
TOTAL PER JENIS BELANJA			13.629.151.364				3.137.039.305					0	
TOTAL BELANJA							16.766.190.669						

LAMPIRAN BEBAN PENANGANAN COVID KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN YANG MEMADAI PADA LKKL

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 BAGIAN ANGGARAN : 088

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : NKF-088/08/PB.6/2021

Tanggal : 14 April 2021

BEBAN BARANG				BEBAN BANTUAN SOSIAL				KETERANGAN
AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		AKUN KHUSUS		AKUN REGULER		
AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	AKUN	RUPIAH	
521131	2.844.981.237	521111		571114				Realisi Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 berupa pembelian hand sanitizer, pembelian Alat Perlengkapan Diri (APD), pengadaan rapid test dan swab test, pembelian thermogun, penyemprotan disinfektan, pembelian lisensi aplikasi video conference, dan pengadaan persediaan pencegahan wabah COVID-19 Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan Pandemi COVID-19 berupa pengadaan infrared thermometer, thermal imaging camera, wastafel portabel, dan bilik sanitasi
521241	864.186.328	521113		572114				
521731		521114		573114				
521841		521115		574114				
522192	5.514.311.819	521119		575114				
523114	159.636.310	521211		576114				
524115	1.622.332.613	521213		576116				
525152		521219						
525153		522111						
525154		522112						
525155		522113						
525156		522119						
526131		522131						
526132		522141						
526321		522151						
526322		522191						
526323		523111						
		523119						
		523121						
		523129						
		523132						
		523133						
		523199						
		524111						
		524113						
		524114						
		524119						
		524211						
		593111						
		595112						
		593113						
		593114						
		593131						
		593149						
SUB TOTAL	11.005.448.307		0		0		0	
TOTAL PER JENIS BELANJA	11.005.448.307			0				
TOTAL BELANJA	11.005.448.307							

LAMPIRAN XIV

LAPORAN HASIL REVIU (LHR) PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**LAPORAN HASIL REVIU
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : 003.0/LHR/INSP/II/2021

Tanggal : 17 Februari 2021

INSPEKTORAT

2021

PENDAHULUAN

A. Penugasan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan dilaksanakan penilaian PIPK secara mandiri (*control self assessment*) oleh manajemen.

Reviu PIPK oleh APIP sebagai pihak eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian PIPK yang dilakukan oleh manajemen sebagai pihak internal bebas dari subjektivitas sehingga hasil penilaian PIPK memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta dapat meningkatkan objektivitas penilaiannya.

Penugasan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan oleh APIP didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Reviu terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah (PIPK) pada Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas nomor : 001.0/ST/INSP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.

B. Proses Reviu

Dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta ketersediaan auditor APIP yang ditugaskan untuk melakukan reviu PIPK maka entitas akuntansi yang direviu dilakukan secara uji petik, karena penentuan persediaan sebagai akun signifikan oleh tim penilai dan disetujui oleh manajemen, berdasarkan hal tersebut uji petik dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Entitas akuntansi yang memiliki nilai Asset terbesar di neraca dan/atau;
2. Entitas akuntansi yang memiliki belanja modal yang paling besar.

Dari pertimbangan sebagaimana di atas maka untuk tingkat entitas akuntansi yang dilakukan reviu terdiri dari Kantor Pusat BKN, Kantor Regional II BKN Surabaya dan Kantor Regional XI BKN Manado.

Prosedur reviu dilakukan dengan :

1. Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap kertas kerja penilaian dari tim penilai untuk menilai kecukupan identifikasi proses/transaksi utama pelaporan keuangan, kecukupan identifikasi risiko utama, dan melihat apakah seluruh risiko telah dimitigasi dengan pengendalian utama, reviu dokumen juga dilakukan untuk menilai pengujian pengendalian intern tingkat entitas (PITE) yang dilakukan, dan ketepatan pengambilan sampel pengujian atribut pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai

2. Verifikasi dan Konfirmasi

Verifikasi dilakukan terhadap bukti dukung penilaian PITE, sampel pengujian atribut pengendalian serta dilakukan konfirmasi kepada tim penilai atas bukti – bukti dukung penilaian tersebut.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Tim Penilai, operator aplikasi SAIBA, SIMAK dan aplikasi persediaan untuk menilai pengujian PUTIK dan pengujian pengendalian aplikasi yang dilakukan oleh tim penilai.

4. *Reperformance*

Reperformance (reviu ulang suatu pekerjaan) dilakukan untuk pengujian atribut pengendalian untuk melihat konsistensi pelaksanaan pengendalian terutama dalam rangka melihat dampak terhadap salah saji yang diakibatkan pengendalian yang tidak andal.

5. Analisis

Analisis dilakukan terhadap hasil pengujian atau simpulan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai.

C. Hasil Reviu

1. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

- 1) Risiko Utama kesalahan klasifikasi akun dari proses/transaksi utama Belanja Modal belum semua diidentifikasi dan dimitigasi;
- 2) Proses/transaksi utama belum mencakup semua proses transaksi utama yang seharusnya. Proses transaksi utama pada belanja modal khususnya aset tetap sebaiknya dimulai dari proses awal sampai dengan akhir;
- 3) Pengendalian utama Verifikasi MAK pada POK, SPK belum cukup untuk memitigasi risiko kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, karena belum didukung oleh aplikasi dan masih diperlukan konfirmasi secara manual antara verifikator, Bendahara pengeluaran dan Operator SIMAK BMN.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

- 1) Risiko Utama kesalahan klasifikasi akun dari proses/transaksi utama Belanja Modal khususnya aset tetap belum semua diidentifikasi dan dimitigasi hanya proses/ transaksi utama pada pembelian aset tetap, pemakaian dan pencatatan aset tetap , dan Pelaporan Aset Tetap;
- 2) Proses pengendalian utama “verifikasi keakuratan akun” pada proses/transaksi utama Pembelian Aset Tetap sudah dinilai memadai, namun masih diberikan usulan koreksi perbaikan oleh Tim Penilai, seharusnya jika sudah dinilai memadai tidak perlu diberikan usulan koreksi/perbaikan;
- 3) Identifikasi risiko belum sesuai dan belum tepat dengan kegiatan Proses/transaksi utama yang ada, seperti risiko utama yang berkenaan dengan Kesalahan Pencatatan Akun Belanja” dan “Rincian pembelian 1 (satu) set atau paket, ada yang nominalnya dibawah 1 juta”.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

- 1) Risiko Utama kesalahan klasifikasi akun dari proses/transaksi utama Belanja Modal khususnya aset tetap (Ekstrakomptabel) belum semua diidentifikasi dan dimitigasi;
- 2) Proses/transaksi utama "Transaksi Pembelian Barang yang nilainya di bawah nilai kapitalisasi (<Rp.1.000.000,-)" dan dimana risiko utama berkenaan kesalahan penyajian dalam proses laporan keuangan belum mencakup semua proses transaksi utama yang seharusnya. Proses transaksi utama pada belanja modal khususnya aset tetap sebaiknya dimulai dari proses awal sampai dengan akhir;
- 3) Pengendalian utama Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dengan SAIBA) belum cukup untuk memitigasi risiko kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, karena masih diperlukan konfirmasi secara manual antara verifikator, Bendahara pengeluaran dan Operator SIMAK BMN.

2. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya

Identifikasi Risiko dan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan hasil reviu terhadap tabel A1-Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendalian yaitu tim penilai telah memberikan hasil perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian yang mereka nilai belum memadai di Tabel A.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Berdasarkan hasil reviu terhadap tabel A1-Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendalian yaitu terdapat penyimpangan tidak signifikan, tim penilai tidak memberikan hasil perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian yang mereka nilai tidak memadai di Tabel A. Tim Penilai hanya melakukan pengisian ulang mengenai identifikasi risiko dan pengendalian utama yang Pemilik Pengendalian susun.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Berdasarkan hasil reviu terhadap tabel A1-Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendalian yaitu terdapat penyimpangan tidak signifikan, tim penilai tidak memberikan hasil perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian yang mereka nilai

tidak memadai di Tabel A. Tim Penilai hanya melakukan pengisian ulang mengenai identifikasi risiko dan pengendalian utama yang Pemilik Pengendalian susun.

3. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE)

Pengujian pengendalian intern tingkat entitas untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Pengujian pengendalian intern tingkat entitas tidak terdapat penyimpangan signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PITE dan **telah membuat penilaian secara wajar** dalam kondisi sebagai berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

2) Penilaian Risiko

Terdapat dokumen manajemen risiko sampai dengan mitigasi risiko, bukti hasil wawancara, survei maupun observasi.

3) Kegiatan Pengendalian

Terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Terdapat dokumen, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

5) Pemantauan

Terdapat dokumen pelaksanaan pengendalian, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Pusat BKN Jakarta memperoleh nilai 94% yang artinya 94% simpulannya faktor yang dinilai ada dan sebanyak 6% simpulannya faktor yang dinilai tidak ada atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. Namun persentase skor faktor-faktor PITE hasil reviu memperoleh nilai 88% yang artinya 88% simpulannya faktor yang dinilai ada dan 12% simpulannya faktor yang dinilai belum ada/ belum terdapat bukti yang memadai atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Pengujian pengendalian intern tingkat entitas terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil revidu, tim penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

2) Penilaian Risiko

Tidak terdapat dokumen manajemen risiko sampai dengan mitigasi risiko, bukti hasil wawancara, survei maupun observasi.

3) Kegiatan Pengendalian

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

5) Pemantauan

Tidak terdapat dokumen pelaksanaan pengendalian, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Regional II BKN Surabaya memperoleh nilai 64% yang artinya 64% simpulannya faktor yang dinilai ada dan sebanyak 36% simpulannya faktor yang dinilai tidak ada atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. Namun persentase skor faktor-faktor PITE hasil revidu memperoleh nilai 66% yang artinya 66% simpulannya faktor yang dinilai ada dan 34% simpulannya faktor yang dinilai belum ada/ belum terdapat bukti yang memadai atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Pengujian pengendalian intern tingkat entitas terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil revidu, tim penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

2) Penilaian Risiko

Tidak terdapat dokumen manajemen risiko sampai dengan mitigasi risiko, bukti hasil wawancara, survei maupun observasi.

3) Kegiatan Pengendalian

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Tidak terdapat dokumen, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

5) Pemantauan

Tidak terdapat dokumen pelaksanaan pengendalian, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Regional XI BKN Manado memperoleh nilai 98% yang artinya 98% simpulannya faktor yang dinilai ada dan sebanyak 2% simpulannya faktor yang dinilai tidak ada atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. Namun persentase skor faktor-faktor PITE hasil reviu memperoleh nilai 46% yang artinya 46% simpulannya faktor yang dinilai ada dan 54% simpulannya faktor yang dinilai belum ada/ belum terdapat bukti yang memadai atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

4. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)

Pengujian PUTIK untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Pengujian PUTIK terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian secara wajar namun belum sesuai dengan PMK No, 17/PMK.09/2019.

1) Area Akses Logical :

- a) Program *security awareness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara;
- b) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses;
- c) Matrik akses pengguna (*user acces matrix /UAM*) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala;
- d) Hak akses dari pegawai yang dimutasi atau mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum, dicabut sesegera mungkin;

- e) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya;
- f) Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif;
- g) Kata sandi *default* untuk akun - akun *default* di database, server dan aplikasi telah diubah;
- h) *Penetration testing/ vulnerability assessment* dilakukan pada segmen sistem/ jaringan yang sesuai berdasarkan profil risikonya dan segala kelemahan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang disetujui;
- i) Jejak audit (*Audit trail*) di aplikasi diaktifkan dan direviu secara berkala.

2) Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

- a) Implementasi prosedur backup dan restore secara konsisten;
- b) *Service level Agreement* (SLA) atau *Operational level Agreement* (OLA) secara formal didefinisikan antara pihak - pihak terkait;
- c) Implementasi dan uji berkala atas DRP;
- d) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa *helpdesk*, dll);
- e) Gangguan atau insiden operasional TI diidentifikasi, ditangani, direviu dan dianalisa dengan tepat waktu;
- f) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Pengujian PUTIK terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian secara wajar namun belum sesuai dengan PMK No, 17/PMK.09/2019.

1) Area Akses Logical :

- a) Program *security awareness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara;
- b) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses;

- c) Matrik akses pengguna (*user acces matrix /UAM*) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala;
- d) Hak akses dari pegawai yang dimutasi atau mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum, dicabut sesegera mungkin;
- e) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya;
- f) Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif;
- g) Kata sandi *default* untuk akun - akun *default* di database, server dan aplikasi telah diubah;
- h) *Penetration testing/ vulnerability assessment* dilakukan pada segmen sistem/ jaringan yang sesuai berdasarkan profil risikonya dan segala kelemahan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang disetujui;
- i) Jejak audit (*Audit trail*) di aplikasi diaktifkan dan direviu secara berkala.

2) Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

- a) Implementasi prosedur backup dan restore secara konsisten;
- b) *Service level Agreement (SLA)* atau *Operational level Agreement (OLA)* secara formal didefinisikan antara pihak - pihak terkait;
- c) Implementasi dan uji berkala atas *DRP*;
- d) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa *helpdesk*, dll);
- e) Gangguan atau insiden operasional TI diidentifikasi, ditangani, direviu dan dianalisa dengan tepat waktu;
- f) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Pengujian PUTIK terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil revidi, tim penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian belum secara wajar. Pengujian yang dilakukan hanya melakukan penelitian dokumen apakah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak. Dalam kondisi tersebut belum cukup untuk memenuhi pengujian yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penilai dikarenakan belum sesuai dengan PMK No, 17/PMK.09/2019.

1) Area Akses Logical :

- a) Program *security awareness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara;
- b) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses;
- c) Matrik akses pengguna (*user access matrix /UAM*) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala;
- d) Hak akses dari pegawai yang dimutasi atau mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum, dicabut sesegera mungkin;
- e) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya;
- f) Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif;
- g) Kata sandi *default* untuk akun - akun *default* di database, server dan aplikasi telah diubah;
- h) *Penetration testing/ vulnerability assessment* dilakukan pada segmen sistem/ jaringan yang sesuai berdasarkan profil risikonya dan segala kelemahan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang disetujui;
- i) Jejak audit (*Audit trail*) di aplikasi diaktifkan dan direvidi secara berkala.

2) Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

- a) Implementasi prosedur backup dan restore secara konsisten;
- b) *Service level Agreement (SLA)* atau *Operational level Agreement (OLA)* secara formal didefinisikan antara pihak - pihak terkait;

- c) Implementasi dan uji berkala atas DRP;
- d) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa *helpdesk*, dll);
- e) Gangguan atau insiden operasional TI diidentifikasi, ditangani, direviu dan dianalisa dengan tepat waktu;
- f) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

5. Pengujian Atribut Pengendalian

Pengujian atribut pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi terdapat penyimpangan tidak signifikan karena berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji Atribut Pengendalian dan membuat penilaian belum secara wajar dengan kondisi sebagai berikut:

a. Kantor Pusat BKN

Pengujian atribut pengendalian pada Kantor Pusat BKN Jakarta untuk pengambilan sampelnya kurang tepat karena, Berdasarkan tabel A untuk pengendalian utama Reviu Penyusunan RKA KL dan Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA) dalam proses utama perencanaan dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan pengujian atribut pengendalian pada tabel C.1.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Pengujian atribut pengendalian pada Kantor Regional II BKN Surabaya, untuk pengambilan sampelnya kurang tepat karena, berdasarkan tabel A untuk pengendalian utama verifikasi keakuratan akun dalam proses utama pembelian aset tetap dan pengendalian utama rekonsiliasi dalam proses/transaksi utama pelaporan aset tetap dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan pengujian atribut pengendalian pada tabel C.1.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Pengujian atribut pengendalian pada Kantor Regional XI BKN Manado untuk pengambilan sampelnya kurang tepat karena, berdasarkan tabel A untuk

pengendalian utama Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA) dalam proses utama perencanaan dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan pengujian atribut pengendalian pada tabel C.1.

6. Pengujian Pengendalian Aplikasi

Pengujian Pengendalian Aplikasi untuk tingkat entitas akuntansi terdapat penyimpangan tidak signifikan karena berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji Pengendalian Aplikasi dan membuat penilaian belum secara wajar dengan kondisi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Kantor Pusat BKN Jakarta dilakukan terhadap pengendalian utama pengendalian input (*field* nilai pada aplikasi persediaan) dan Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA) dengan hasil pengujian “andal”. Berdasarkan tabel A untuk pengendalian utama Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA) dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan pengujian atribut pengendalian pada tabel C.2.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Berdasarkan hasil reviu Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Kantor Regional II BKN Surabaya yaitu terdapat penyimpangan tidak signifikan. Adapun hasil reviu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan tabel A untuk pengendalian utama verifikasi keakuratan akun pada proses/transaksi utama pembelian aset tetap dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan pengujian atribut pengendalian pada tabel C.2;
- 2) Berdasarkan tabel C1 terdapat kelemahan tidak signifikan pada pengendalian utama 2-validasi (Terdapat kesalahan pembelian Aset Tetap 1 (satu) set/paket meubelair dibawah Rp 1.000.000) yang seharusnya juga dilakukan pengendalian aplikasi pada tabel C2.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Kantor Regional XI BKN Manado dilakukan terhadap pengendalian utama melakukan verifikasi dan validasi oleh verifikator dan pencatatan secara manual oleh bendahara dengan hasil pengujian

“tidak andal” serta hasil penelitian lanjutan kelemahan tersebut tidak signifikan. Berdasarkan wawancara dengan tim penilai, aplikasi tidak dapat mengklasifikasi langsung antara belanja barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel sehingga harus dilakukan secara manual.

7. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian

Pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi terdapat penyimpangan tidak signifikan karena berdasarkan hasil revidu, tim penilai telah menguji dan membuat penilaian belum secara wajar dengan kondisi sebagai berikut:

a. Kantor Pusat BKN

Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai telah wajar dalam kondisi sebagai berikut :

Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai pada tabel B1 terkait pertanyaan “Apakah jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?” “Kelemahan tidak signifikan”, dan dituangkan pada tabel D “efektif” akan tetapi masih terdapat unsur – unsur lain pada tabel B1 yang seharusnya dimasukkan ke dalam table D dan diberikan usulan koreksi atas hasil pengujian serta tindak lanjut oleh manajemen.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

- 1) Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai pada tabel B1 yang memiliki nilai 0 (tidak efektif) seharusnya dimasukkan pada tabel D dan diberikan usulan koreksi atas hasil pengujian serta diisi tindak lanjut oleh pihak manajemen;
- 2) Pengujian yang dilakukan pada tabel C-1 belum sesuai dikarenakan terdapat 1-validasi tentang (Terdapat kesalahan penulisan nominal, seharusnya Rp 88.762.437 tetapi tercatat Rp 88.763.437) yang belum dimasukkan pada tabel D dan diberikan usulan koreksi atas hasil pengujian serta diisi tindak lanjut oleh pihak Manajemen;

- 3) Pengujian yang dilakukan untuk pengendalian utama rekonsiliasi (dari tabel C1) seharusnya tidak dimasukkan pada tabel D karena Tim Penilai sudah menyatakan rekonsiliasi pada tabel A sudah memadai;
- 4) Pengujian aplikasi untuk pengendalian utama verifikasi keakuratan akun (tabel C2), sesuai kesimpulan berdasarkan tabel A dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian pada tabel D.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

- 1) Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai pada tabel B1 terkait pertanyaan “Apakah jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?” “Kelemahan tidak signifikan”, dan dituangkan pada tabel D “efektif” akan tetapi masih terdapat unsur – unsir lain pada table B.1 yang seharusnya dimasukkan ke dalam table D dan diberikan usulan koreksi atas hasil pengujian serta tindak lanjut oleh manajemen;
- 2) Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai terkait Reviu data olahan aplikasi di dalam tabel B2, simpulan “tidak efektif”, namun dituangkan pada tabel D “efektif” dan sebaiknya walaupun hasil penelitian lanjutan menyebutkan bahwa kelemahan tidak signifikan tetapi tetap diberikan usulan koreksi atas hasil pengujian serta tindak lanjut oleh manajemen;
- 3) Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai terkait Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dengan SAIBA) pada tabel C1, simpulan efektif namun setelah dituangkan pada tabel D menjadi tidak efektif;
- 4) Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai terkait melakukan verifikasi dan validasi oleh verifikator dan pencatatan secara manual oleh bendahara pengeluaran dinilai tidak andal pada table C2. Akan tetapi pada hasil penelitian lanjutan kelemahan tidak signifikan. Simpulan efektifitas implementasi pada table D seharusnya tidak efektif dan seharusnya diberikan usulan koreksi atas hasil pengujian dan diisi tindak lanjut oleh manajemen.

D. REKOMENDASI

1. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

Untuk hal tersebut kami merekomendasikan tim penilai untuk :

a. Kantor Pusat

- 1) Melakukan konfirmasi kepada pemilik pengendalian terkait Identifikasi risiko, pada semua proses transaksi utama mulai dari awal sampai dengan akhir yang terdiri atas :
 - Perencanaan
 - Transaksi
 - Penggunaan dan pemanfaatan
 - Pemindahtanganan
 - Penghapusan
 - Pelaporan.
- 2) Melakukan usulan koreksi/*feedback* terhadap proses/transaksi utama yang pengendaliannya dinilai belum memadai.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

- 1) Melakukan konfirmasi kepada pemilik pengendalian terkait Identifikasi risiko, pada semua proses transaksi utama mulai dari awal sampai dengan akhir yang terdiri atas :
 - Perencanaan
 - Transaksi
 - Penggunaan dan pemanfaatan
 - Pemindahtanganan
 - Penghapusan
 - Pelaporan.
- 2) Melakukan usulan koreksi/*feedback* terhadap proses/transaksi utama yang pengendaliannya dinilai belum memadai;
- 3) Memberikan usulan koreksi/*feedback* terhadap identifikasi risiko utama jika memang Pemilik Pengendalian kurang tepat dalam melakukan identifikasi risiko.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

- 1) Melakukan konfirmasi kepada pemilik pengendalian terkait Identifikasi risiko, pada semua proses transaksi utama mulai dari awal sampai dengan akhir yang terdiri atas :
 - Perencanaan
 - Transaksi
 - Penggunaan dan pemanfaatan
 - Pemindahtanganan
 - Penghapusan
 - Pelaporan.
- 2) Melakukan usulan koreksi/*feedback* terhadap proses/transaksi utama yang pengendaliannya dinilai belum memadai.

2. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Untuk hal tersebut kami **merekomendasikan** tim penilai

a. Kantor Pusat

Tim penilai agar melakukan pengujian dan Penilaian PITE dengan didukung bukti yang relevan dan berkualitas.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Tim penilai agar melakukan pengujian dan Penilaian PITE dengan didukung bukti yang relevan seperti bukti wawancara, survei maupun observasi.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Tim penilai agar melakukan pengujian dan Penilaian PITE dengan didukung bukti yang relevan dan berkualitas.

3. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)

Untuk hal tersebut kami **merekomendasikan** tim penilai untuk :

a. Kantor Pusat :

Untuk hal tersebut Tim reviu merekomendasikan kepada Tim penilai agar pengujian PUTIK dilaksanakan **hanya** pada dua area berdasarkan PMK No

17/PMK.09/2019 yaitu pada area akses logical dan area operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Untuk hal tersebut Tim reviu merekomendasikan kepada Tim penilai agar pengujian PUTIK dilaksanakan **hanya** pada dua area berdasarkan PMK No 17/PMK.09/2019 yaitu pada area akses logical dan area operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Tim penilai agar pengujian PUTIK dilaksanakan pada dua area berdasarkan PMK No 17/PMK.09/2019 yaitu pada area akses logical dan area operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

4. Pengujian Atribut Pengendalian

Untuk hal tersebut kami **merekomendasikan** tim penilai :

a. Kantor Pusat

Tim penilai agar melakukan pengujian atribut pengendalian dengan menggunakan sampel atau dokumen atas pengendalian utama yang dinilai tidak memadai pada tabel A- identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Tim penilai agar melakukan pengujian atribut pengendalian dengan menggunakan sampel atau dokumen atas pengendalian utama yang dinilai tidak memadai pada tabel A- identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Tim penilai agar melakukan pengujian atribut pengendalian dengan menggunakan sampel atau dokumen atas pengendalian utama yang dinilai tidak memadai pada tabel A- identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya

5. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian

Untuk hal tersebut kami merekomendasikan tim penilai untuk :

a. Kantor Pusat

Melakukan pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian secara wajar dan didukung oleh bukti yang memadai.

b. Kantor Regional II BKN Surabaya

Tim penilai agar melakukan pengujian pengendalian aplikasi dengan menggunakan sampel atau dokumen atas pengendalian utama yang dinilai tidak memadai pada tabel A-identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya.

c. Kantor Regional XI BKN Manado

Melakukan pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian secara wajar dan didukung oleh bukti yang memadai

E. TINDAK LANJUT

Terhadap Rekomendasi Reviu yang diberikan Tim Penilai akan menindaklanjuti pada Penilaian PIPK berikutnya

F. Simpulan

Setelah mempertimbangkan tindaklanjut yang dilakukan oleh Tim Penilai PIPK maka simpulan PIPK berdampak dengan penyimpangan signifikan

Jakarta, 17 Februari 2021

Plt. Inspektur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Andi Anto, S.Sos, MH., M.AP
NIP. 197309101994031001





BKN

Badan Kepegawaian Negara
National Civil Service Agency

LAPORAN PIPK UAPA 2020



LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN ANGGARAN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
FEBRUARI 2021

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Kantor Badan Kepegawaian Negara. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggungjawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahannya terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 09 Februari 2020, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **efektif**.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **memadai**.

Jakarta, 09 Februari 2021

Pimpinan Tim Penilai UAPA
PIPK BKN,



Ditandatangani Secara Elektronik
Supranawa Yusuf, SH, M.P.A.
NIP. 196305041989011001

Lampiran
Laporan Hasil Penilaian

- A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai
1. Belanja Modal
 2. Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19
 3. Persediaan
 4. Barang Operasional Pengadaan COVID-19
 5. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 6. Aset Tetap
 7. Perjalanan Dinas

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

No	Temuan			Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
A.	Kelemahan Material			
	-			
B.	Kelemahan Signifikan			
	-			
C.	Kelemahan yang Berdampak Rendah			
Kantor Pusat BKN				
1.	Tidak terdapat perlindungan bagi pegawai yang menyampaikan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.	Penyebabnya tidak terdapat peraturan tertulis yang dapat melindungi pegawai yang menyampaikan informasi negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan	Akibatnya: 1. Pegawai menjadi enggan untuk melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan karena tidak ada perlindungan hukum tertulis yang dapat melindungi privasi pelapor. 2. Pegawai yang melaporkan informasi yang negatif, perilaku	Direkomendasikan untuk membuat peraturan/regulasi terkait perlindungan bagi pegawai yang menyampaikan informasi negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan



			yang tidak benar, atau penyimpangan yang identitasnya tersebar dapat mengalami kerugian material dan non-material.	
2.	Pengendalian utama berupa Verifikasi MAK pada POK, SPK belum dapat memitigasi risiko kesalahan penggunaan akun (MAK) belanja modal.	Penyebabnya: Tidak semua Unit Kerja memeriksa kembali kebenaran penggunaan MAK dan kecocokannya dengan barang yang akan dibeli pada saat melakukan pembelian belanja modal.	Akibatnya: Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja pada saat pembelian belanja modal.	Direkomendasikan pada saat proses pembelian, akun yang akan digunakan untuk pencairan tagihan agar diverifikasi kembali oleh unit kerja Direkomendasikan pada saat proses pencatatan barang di aplikasi persediaan maupun aplikasi SIMAK, agar operator mengecek kembali kecocokan antara barang yang dibeli dengan jenis akun yang digunakan, termasuk dalam persediaan atau berupa modal Direkomendasikan agar membuat sistem atau alat yang dapat mendeteksi kebenaran antara penggunaan akun yang akan dibelanjakan dengan POK

Kantor Regional I BKN Yogyakarta

- Tidak ada kelemahan

Kantor Regional II BKN Surabaya

1.	Kesalahan pencatatan akun belanja modal	Penyebabnya adalah adanya kesalahan dalam melakukan penginputan	Akibatnya adalah terjadi salah saji akun pada Laporan Keuangan Bulanan Kanreg II BKN	Direkomendasikan untuk dilakukan lebih dari sekali dalam hal verifikasi akun dan dokumen yang terkait
----	---	---	--	---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan



		akun pada aplikasi SAS	Surabaya	
2.	Kelebihan pembayaran paket pekerjaan	Penyebabnya adalah kesalahan dalam melakukan penginputan nominal pada aplikasi SAS	Akibatnya adalah terjadi salah saji akun pada Laporan Keuangan Bulanan Kanreg II BKN Surabaya	Direkomendasikan untuk dilakukan lebih dari sekali dalam hal verifikasi akun dan dokumen yang terkait Direkomendasikan untuk melakukan validasi secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pengumpulan dokumen Direkomendasikan agar segala dokumen yang dibutuhkan hendaknya juga menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staff PPK
3.	Rincian pembelian 1 (satu) set atau paket, ada yang nominalnya dibawah 1 juta	Penyebabnya adalah adanya kesalahan dalam pembelian Aset Tetap dengan nominal dibawah Rp 1 juta oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Akibatnya adalah salah saji pada akun Aset Tetap diana terdpaat Aset Tetap dnegan nominal di bawah Rp 1 juta	Direkomendasikan untuk melakukan validasi secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pengumpulan dokumen Direkomendasikan agar segala segala dokumen yang dibutuhkan hendaknya juga menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staff PPK
4.	Perbedaan antara jumlah asset tetap di ruangan ruangan dengan di aplikasi SIMAK	Penyebabnya adalah kesalahan input daftar barang di aplikasi SIMAK dan adanya barang yang dipindah-pindah tanpa seijin Pengelola BMN	Akibatnya adalah daftar barang di aplikasi SIMAK dengan fisik di ruangan-ruangan berbeda	Pengelola BMN melakukan sampling sensus BMN ke ruangan-ruangan minimal 1 bulan sekali.
Kantor Regional III BKN Bandung				

- Tidak ada kelemahan

Kantor Regional IV BKN Makassar

1.	Kesalahan pencatatan barang persediaan pada aplikasi persediaan	Penyebabnya adalah penginputan pembelian barang persediaan dilakukan oleh operator aplikasi persediaan sebagian besar hanya berdasarkan SP2D atau fisik saja	Akibatnya adalah perbedaan berupa selisih akibat salah saji akun maupun nilai persediaan pada laporan keuangan Kanreg	Direkomendasikan untuk menambah pengendalian berupa SOP untuk pembelian barang persediaan.
2.	Perbedaan antara jumlah fisik persediaan di gudang dengan aplikasi persediaan	Penyebabnya adalah pemeriksaan fisik tidak dilakukan secara berkala	Akibatnya pada saat pendataan ulang inventaris tidak sesuai dengan data yang ada	Direkomendasikan saat perhitungan matematis dalam daftar persediaan, agar dibuat dengan cermat Dan Persediaan yang dijaminakan telah diidentifikasi dan diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan
3.	Kesalahan nilai persediaan yang tercantum pada Aplikasi persediaan	Penyebabnya adalah penginputan pembelian barang persediaan dilakukan oleh operator aplikasi persediaan sebagian besar hanya berdasarkan SPTB saja.	Akibatnya terdapat kesalahan nilai persediaan yang tercantum pada Aplikasi persediaan. Nilai persediaan sangat terkait dengan validitas laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan operasional.	Direkomendasikan untuk dilakukan verifikasi berkas oleh bagian keuangan sebelum menyerahkan berkas kepada operator persediaan

Kantor Regional V BKN DKI Jakarta

1.	Jumlah pejabat/pegawai dalam satu unit kerja belum sesuai dengan analisis beban kerja	Penyebabnya adalah hasil ANJAB dan ABK belum digunakan dalam penempatan pegawai	Akibatnya adalah terdapat pegawai yang melaksanakan beberapa pekerjaan sekaligus	Direkomendasikan untuk melakukan penilaian ANJAB dan ABK Kembali agar hasil penilaian tersebut dilaksanakan secara maksimal
----	---	---	--	---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan



			Tidak adanya pemerataan jumlah pegawai Beban kerja berlebih mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan	
--	--	--	---	--

Kantor Regional VI BKN Medan

1.	Belum ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja	Penyebabnya adalah tidak terdapat mekanisme baku untuk bereaksi terhadap perubahan	Akibatnya perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan perubahan dan menanggulangi dampak perubahan tersebut	Direkomendasikan untuk membuat tim reaksi cepat perubahan
2.	Belum ada strategi pelaksanaan dan jadwal kegiatan komunikasi dan informasi (workplan, jadwal detail setiap tahun)	Penyebabnya belum ada jadwal detail setiap tahun	Akibatnya kurangnya persiapan dalam pelaksanaan kegiatan	Direkomendasikan untuk membuat jadwal kegiatan dan komunikasi dan informasi secara detail setiap tahun

Kantor Regional VII BKN Palembang

1.	Pemeriksaan Dokumen Pengadaan	Penyebabnya adalah terbatasnya fitur aplikasi SIAVA masih terbatas pengadaan LS	Akibat nya, pengadaan yg menggunakan UP tidak terdapat checklist via aplikasi, namun bila menggunakan pemeriksaan manual rentan human error	Direkomendasikan untuk menambah fitur aplikasi siava pengadaan via UP
----	-------------------------------	---	---	---

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

1.	Pengendalian utama pemeriksaan fisik belum cukup untuk memitigasi risiko perbedaan antara fisik persediaan di gudang dengan aplikasi persediaan	Penyebabnya adalah rekonsiliasi yang dilakukan baru sebatas penginputan pembelian barang persediaan berdasarkan SP2D ke aplikasi	Perbedaan antara jumlah fisik persediaan di gudang dengan aplikasi persediaan	Direkomendasikan untuk melakukan kembali uji fisik secara sampling oleh Pengadministrasi barang (jumlah sampling disesuaikan dengan PMK Nomor 17 Tahun 2019) dengan diketahui oleh atasan sebelum
----	---	--	---	---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan



		persediaan		melakukan penandatanganan Berita Acara Stok Opname untuk memastikan bahwa pemeriksaan fisik yang dilakukan sebelumnya telah secara populasi.
2.	Pengendalian utama terhadap pembatasan penggunaan hak akses dan implementasi <i>backup restore</i> dinilai belum cukup untuk memitigasi risiko terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Penyebabnya adalah jika ada perubahan personil yang mempunyai hak akses tidak langsung dicabut melainkan diberikan user id dan password lama ke personil baru.	Belum terdapat kebijakan tertulis terkait pembatasan penggunaan hak akses, serta implementasi <i>backup</i> dan <i>restore</i> .	Direkomendasikan untuk melakukan pembuatan surat keputusan tertulis mengenai admin atau petugas yang bertanggungjawab pada penggunaan setiap aplikasi yang digunakan dalam bisnis proses.

Kantor Regional IX BKN Jayapura

- Tidak Terlampir

Kantor Regional X BKN Denpasar

1.	Tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau sebagai tanggapan atas rekomendasi dan saran perbaikan bagi unit kerja.	Penyebabnya adalah belum adanya prosedur untuk mendeteksi adanya pengendalian yang diabaikan dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan ketika ditemukan penyimpangan.	Ketidak tepatan tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau sebagai tanggapan atas rekomendasi dan saran perbaikan bagi unit kerja.	Menyampaikan kepada pihak terkait untuk menyusun prosedur dalam mendeteksi adanya pengendalian yang diabaikan dan tindakan perbaikan yang dilakukan ketika ditemukan penyimpangan.
----	--	---	--	--

Kantor Regional XI BKN Manado

1	Rincian pembelian 1 set/paket, terdapat nilai dibawah Rp 1 juta	Penyebabnya adalah terdapat pembelian aset tetap yang nilai satuannya kurang dari Rp 1 juta namun masa manfaat barang tersebut lebih dari 1	Akibatnya adalah terjadi salah saji pada akun aset tetap dengan nilai dibawah Rp 1 juta	Direkomendasikan untuk dilakukan validasi secara menyeluruh. Adanya sistem/prosedur yang dapat menjadi sarana pencatatan untuk aset tetap ekstrakomptabel
---	---	---	---	---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan



		tahun dan sesuai klasifikasi yang dibutuhkan		
2	Adanya pencatatan aset tetap menggunakan akun belanja barang	Penyebabnya adalah pembelian barang dengan klasifikasi aset tetap namun bernilai dibawah Rp 1 juta	Akibatnya adalah munculnya jurnal tidak lazim pada laporan keuangan Kanreg XI BKN	Direkomendasikan adanya sistem/prosedur yang dapat menjadi sarana pencatatan untuk aset tetap ekstrakomptabel

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

- Tidak ada kelemahan

Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh

1	Perbedaan jumlah fisik aset tetap dengan aplikasi SIMAK	Penyebabnya adalah adanya barang yang dipindahkan tanpa sepengetahuan pengelola BMN	Akibatnya adalah daftar Barang di aplikasi SIMAK berbeda dengan kondisi fisik barang di masing-masing ruangan	Direkomendasikan agar Pengelola BMN melakukan sensus BMN/barang inventaris setiap triwulan
---	---	---	---	--

Kantor Regional XIV BKN Manokwari

1.	Pemeriksaan Fisik melalui pencatatan dengan gudang masih secara manual dan riskan "human error"	Penyebabnya adalah belum adanya aplikasi dan sarana untuk melakukan update persediaan fisik di Gudang secara digital/paperless, dan terintegrasi	Akibatnya riskan terjadi kesalahan catatan, maupun jumlah barang persediaan, serta keterlambatan update atas perubahan jumlah persediaan	Direkomendasikan agar selalu mencocokkan nilai dari bon permintaan dan update buku Gudang dan aplikasi persediaan Direkomendasikan agar merancang aplikasi yang dapat membantu efisiensi proses pemeriksaan fisik
----	---	--	--	--

Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN

1.	Pemeriksaan fisik	Penyebabnya adalah volume pekerjaan yang tinggi, kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi di BMN dan persediaan, pencatatan masih manual	-	Direkomendasikan agar meng-update buku barang persediaan dan BMN
----	-------------------	--	---	--

Tabel E. Penilaian Kelemahan Gabungan

: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Uraian Kelemahan (1)	Pusat	Kanreg I Yogyakarta	Kanreg II Surabaya	Kanreg III Bandung	Kanreg IV Makassar	Kanreg V DKI Jakarta	Kanreg VI Medan	Kanreg VII Palembang	Kanreg VIII Banjarmasin	Kanreg IX Jayapura	Kanreg X Denpasar	Kanreg XI Manado	Kanreg XII Pekanbaru	Kanreg XIII Aceh	Kanreg XIV Manokwari	Pusbang ASN	Rata-Rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan Menurut Tim Penilai UAPA
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
alisis dan Evaluasi risiko unit kerja lam pencapaian tujuan Tidak Efektif lemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
ntifikasi risiko unit kerja dalam capaian tujuan Tidak Efektif lemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
ajikan dan praktik pembinaan nber daya manusia pada unit kerja h disosialisasikan dan diperbaharui ara terus menerus tidak efektif lemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
esuaian Jumlah pejabat/pegawai im suatu unit kerja dengan analisis an kerja tidak efektif (Kelemahan ik signifikan)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
rkaitan diklat yang dilaksanakan gan pembinaan karir dan kinerja awal Tidak Efektif (Kelemahan ik signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
anisme otorisasi dan persetujuan rovai) unit kerja atas transaksi dan dan penting Tidak Efektif amahan tidak signifikan)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
anisme untuk mengantisipasi, identifikasi, dan bereaksi adap perubahan yang dapat ghasilkan dampak besar dan yebat pada unit kerja Tidak Efektif mahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
itoring dan evaluasi tindak lanjut masalah atau kendala dalam sanaan koordinasi internal un eksternal Tidak Efektif mahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1

Uraian Kelemahan	Pusat	Kanreg I Yogyakarta	Kanreg II Surabaya	Kanreg III Bandung	Kanreg IV Makassar	Kanreg V DKI Jakarta	Kanreg VI Medan	Kanreg VII Palembang	Kanreg VIII Banjarmasin	Kanreg IX Jayapura	Kanreg X Depas	Kanreg XI Manado	Kanreg XII Pekanbaru	Kanreg XIII Aceh	Kanreg XIV Manokwari	Pusbang ASN	Rata-Rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan Menurut Tim Penilai UAPA
milhan dilkat yang mengacu pada doman pelaksanaan dilkat berbasis mpentensi Tidak Efektif (Kelemahan ak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
nangan risiko unit kerja dalam ncapaian tujuan Tidak Efektif ilemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
nggunakan program/sistem ormasi terkait dengan tugasnya oleh uruh pegawai Tidak Efektif ilemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
indakan/lanjutan saran dan masukan i pegawai terkait pengembangan, baikan, dan pengujian gram/sistem informasi Tidak Efektif ilemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
lindungan bagi pegawai yang yampaikan informasi yang negatif, laku yang tidak benar, atau yimpangan Tidak Efektif emahan tidak signifikan)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
nintaan masukan pegawai sebagai user dalam pengembangan, baikan, dan pengujian gram/sistem informasi Tidak Efektif emahan tidak signifikan)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
ahan dan pegawai mengetahui dan anggung jawab atas pengendalian n yang menjadi tanggung jawabnya k Efektif (Kelemahan tidak fikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
inan unit kerja memberikan luan, penilaian; dan pelatihan da pegawai untuk memastikan atan pelaksanaan pekerjaan, gurangi kesalahan/pemahaman, serta dorong berkurangnya tindakan nggaran Tidak Efektif (Kelemahan : signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
idur yang dapat mendeteksi ya pengendalian yang diabaikan : Efektif (Kelemahan tidak fikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1

Uraian Kelemahan	Pusat	Kanreg I Yogyakarta	Kanreg II Surabaya	Kanreg III Bandung	Kanreg IV Makassar	Kanreg V DKI Jakarta	Kanreg VI Medan	Kanreg VII Palembang	Kanreg VIII Banjarmasin	Kanreg IX Jayapura	Kanreg X Denpasar	Kanreg XI Manado	Kanreg XII Pekanbaru	Kanreg XIII Aceh	Kanreg XIV Manokwari	Pusling ASN	Rata-Rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan Menurut Tim Penilai UAPA
Prosedur yang mewajibkan pimpinan untuk kerja untuk merevisi pelaksanaan pengendalian Tidak Efektif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Prosedur yang meyakinkan bahwa adanya perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan Tidak Efektif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki tugas jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan Tidak Efektif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Penyusunan data olahan aplikasi Aplikasi SIP, Aplikasi SIMAK, Aplikasi SAIBA Tidak Efektif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Penyusunan pelaksanaan pengendalian jurnal pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya salah yang timbul Tidak Efektif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Peran komunikasi baik ke atas atau ke bawah seluruh bagian tidak terencana: hal yang tidak terencana terjadi dalam pelaksanaan ini beserta penyebab dan usulan perbaikannya, informasi yang negatif, atau yang tidak benar, atau /impangan Tidak Efektif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Prosedur pengendalian tersebut telah dapat persetujuan dari pimpinan Kerja Tidak Efektif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
Prosedur yang memadai tentang tindakan, larangan, dan sanksi dalam etik dan/atau aturan perilaku ya, termasuk kepada pegawai baru Tidak Efektif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1

Uraian Kelemahan	Platz	Kanreg I Yogyakarta	Kanreg II Surabaya	Kanreg III Bandung	Kanreg IV Malassar	Kanreg V DKI Jakarta	Kanreg VI Medan	Kanreg VII Palembang	Kanreg VIII Bajarmasin	Kanreg IX Jepura	Kanreg X Denpasar	Kanreg XI Mantado	Kanreg XII Pekanbaru	Kanreg XIII Aceh	Kanreg XIV Manokwari	Pisbang ASN	Rata-Rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan Menurut Tim Penilai UAPA
tegi pelaksanaan dan jadwal latan komunikasi dan informasi ak Efektif (Kelemahan tidak ifikan)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
dasi pada aplikasi Aplikasi SAS Tidak ctif (Kelemahan tidak signifikan)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
ifikasi keakuratan akun pada aplikasi Tidak Efektif (Kelemahan tidak ifikan)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
eterangan																				

otial Salah Saji Teridentifikasi

Simpulan PIPK Gabungan
gendalian Internal Efektif (PIE)

LAMPIRAN XV

BUKTI SETORAN

PENERIMAAN NEGARA



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL II**

Nomor : 03/ KPA / KR.II.BKN / I / 2021

Sidoarjo, 8 Januari 2021

Lampiran : 1 berkas

Hal : Permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo
Jl. W. Mongonsidi No. 89A
Sidoarjo - 61218

Bersama ini kami mengajukan Permohonan perbaikan transaksi penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Fotokopi SSBP
2. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA


Drs. HERU PURWAKA., M.M
NIP. 196302081991031001

DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Perbaikan atas dokumen :		SSP		SSBP		STBS		SSPBB	
		SSB		SSPB		SSCP		SSPCP	
Dokumen No. Billing : 820210106754258		Tanggal Dokumen, 6 Januari 2021				Tanggal Setor : 6 Januari 2021			
Pengembalian Sisa Dana GUP Nihil Bulan Desember Tahun Anggaran 2020									

Semula :

Semula : Rp.												
No	Segmen											
	Satker	KPPN	Program	Output	Dana	Bank	Kewenangan	Lokasi	Anggaran	Antar Entitas		
	450454	165	01	001	RM		KP	05.03	425911			2.205.725,-

Menjadi :

Menjadi : Segmen													Rp.
No	Satker	KPPN	Program	Output	Dana	Bank	Kewenangan	Lokasi	Anggaran	Antar Entitas			
	450454	165	01	001	RM		KP	05.03	815114				2.205.725,-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
Drs. HERU PURWAKA, M.M
NIP. 196302081991031001



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210106754258
Tanggal Billing : 06-01-2021 10:51:00
Tanggal Kedaluwarsa : 13-01-2021 10:51:00
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
Kementerian/Lembaga : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
Total Disetor : 2.205.725 (IDR)
Terbilang : Dua juta dua ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh lima (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

815114

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 2.205.725 (IDR)
Keterangan : Pengembalian Kekurangan GU NIHIL TA 2020

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking* dan EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi).
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi

4. Pastika oki

5. Pastika akan m

6. Apabila sudah s

7. Apabila Anda ju

8. Simpan Ta

9. Untuk p

10. Apabila KPPN K

Anggar

Tenda Bukti

Tanggal Ceta

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Waru 61256

TANDA TERIMA

Setoran Pajak (PPN Billing)

Tanggal : 06-01-2021 11:21:19

No. Resi : 61256-03/2021/800594

Petugas : 969287021

Tanggal Ruku : 06-01-2021

Kode Cabang Pos : 061200

KTP : 96913308491

NTPN : E7A2270LTSP43P61

STAN : 306491

Kode Billing : 820210106754258

Nama : BENDAHARA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

K / L : 088

Unit Eselon : 01

Kode-Satker : 450454

Jumlah Setoran : Rp. 2.205.725

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua juta dua ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

267124876



KANTORPOS



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 31/03/2021 19:35:40	NTB	: 000000202202
Tanggal Buku	: 01/04/2021	NTPN	: 5D91E48VUIM3E2GA
Kode / Nama Cabang	: 0989 / BNI 46	STAN	: 903039

Data Setoran :

Kode Billing	: 820210325850634		
Nama Wajib Bayar	: KANTOR REGIONAL III BKN		
Kementerian / Lembaga	: 088		
Unit Eselon I	: 01		
Satuan Kerja	: 017237		
Jumlah Setoran	: 5.911.195,00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: lima juta sembilan ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

17/03/2021

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 17/03/2021 14:38:13 NTB : 210317241961
Tanggal Buku : 17/03/2021 NTPN : F9A3E1JNF2UKSH27
Kode Cab. Bank : 1224 STAN : 410862

Data Setoran:

Kode Billing : 820210316067911
Nama Wajib Bayar : Pusat Pengembangan ASN
Kementerian/Lembaga : 088
Unit Eselon I : 01
Satuan Kerja : 020505
Jumlah Setoran : Rp. 16,960,430.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU EMPAT
RATUS TIGA PULUH RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

Pusat Pengembangan ASN 0000 0000 16960430.00 17032021 17032021 F9A3E1JNF2UKSH27
210317241961 410862 139



1224 1224052 8736 4000027 17032021 143813
CASH
032901003434307 REK PERSEPSI
IDR 16,960,430.00 Dr
IDR 16,960,430.00 Cr
NTPN : F9A3E1JNF2UKSH27



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210216847707
Tanggal Billing	: 16-02-2021 13:29:14
Tanggal Kedaluwarsa	: 23-02-2021 13:29:14
Tanggal Bayar	: 18-02-2021 10:20:27
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I	: Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor	: 11.413.160 (IDR)
Terbilang	: <i>Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Enam Puluh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000089624
NTPN	: B390E6U8E2A0MIAR

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 11.413.160 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) An. CV. Dwi Cemerlang



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210216848212
Tanggal Billing	: 16-02-2021 13:31:21
Tanggal Kedaluwarsa	: 23-02-2021 13:31:21
Tanggal Bayar	: 18-02-2021 10:20:12
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I	: Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor	: 3.465.435 (IDR)
Terbilang	: Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000083950
NTPN	: 4EDBE2G4UTE2LIQK

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 3.465.435 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) An. CV. Dwi Cemerlang



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210216849151
Tanggal Billing	: 16-02-2021 13:33:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 23-02-2021 13:33:18
Tanggal Bayar	: 18-02-2021 10:20:45
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I	: Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor	: 5.740.685 (IDR)
Terbilang	: Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000096348
NTPN	: 241D21JNF2RM8JNV

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 5.740.685 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) An. CV. Galvin Mitra Tama



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210119697587
Tanggal Billing	: 19-01-2021 11:27:28
Tanggal Kedaluwarsa	: 26-01-2021 11:27:28
Tanggal Bayar	: 21-01-2021 14:28:43
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I	: Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor	: 14.400.000 (IDR)
Terbilang	: Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000220854
NTPN	: B7DA06U8E2741P5J

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 14.400.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian sesuai SPM No. 03302/LS/2015 An. PT. SUGITEK INDO TAMA (Temuan BPK)-ROUM



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210119701695
Tanggal Billing	: 19-01-2021 11:49:34
Tanggal Kedaluwarsa	: 26-01-2021 11:49:34
Tanggal Bayar	: 21-01-2021 14:30:19
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I	: Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor	: 2.200.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Juta Dua Ratus Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000256749
NTPN	: EE9A555DED2B7T5V

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 2.200.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian sesuai SPM No. 03614/LS/2015 An. PT. PROPERINDO JASATAMA (Temuan BPK)-PUSBANG ASN



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210323683952
Tanggal Billing	: 23-03-2021 14:16:04
Tanggal Kedaluwarsa	: 30-03-2021 14:16:04
Tanggal Bayar	: 24-03-2021 08:16:13
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: PT. Pinang Abadi Jaya
Kementerian/Lembaga	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I	: Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor	: 18.900.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 210324570118
NTPN	: DF4372G4UTH8HUJG

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 18.900.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian kelebihan pembayaran cleaning service Pusbang ASN An. PT. Pinang Abadi Jaya (Temuan BPK)



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820200630598632
Tanggal Billing	: 30-06-2020 08:21:54
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-07-2020 08:21:54
Tanggal Bayar	: 30-06-2020 08:39:02
Bank/Pos Bayar	: POS INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: ZULFIKAR
Kementerian/Lembaga	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I	: BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Satuan Kerja	: KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
Total Disetor	: 4.000.000 (IDR)
Terbilang	: Empat Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 906448180642
NTPN	: E29762G4UKGCCGEV8

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Kode Akun	: 425791 - Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Jumlah Setoran	: 4.000.000 (IDR)
Keterangan	: -



Badan Kepegawaian Negara

Jl. Letjend. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, Indonesia

Tel : (021) 8093423 / 8093008 - Fax : (021) 8010301

www.bkn.go.id